

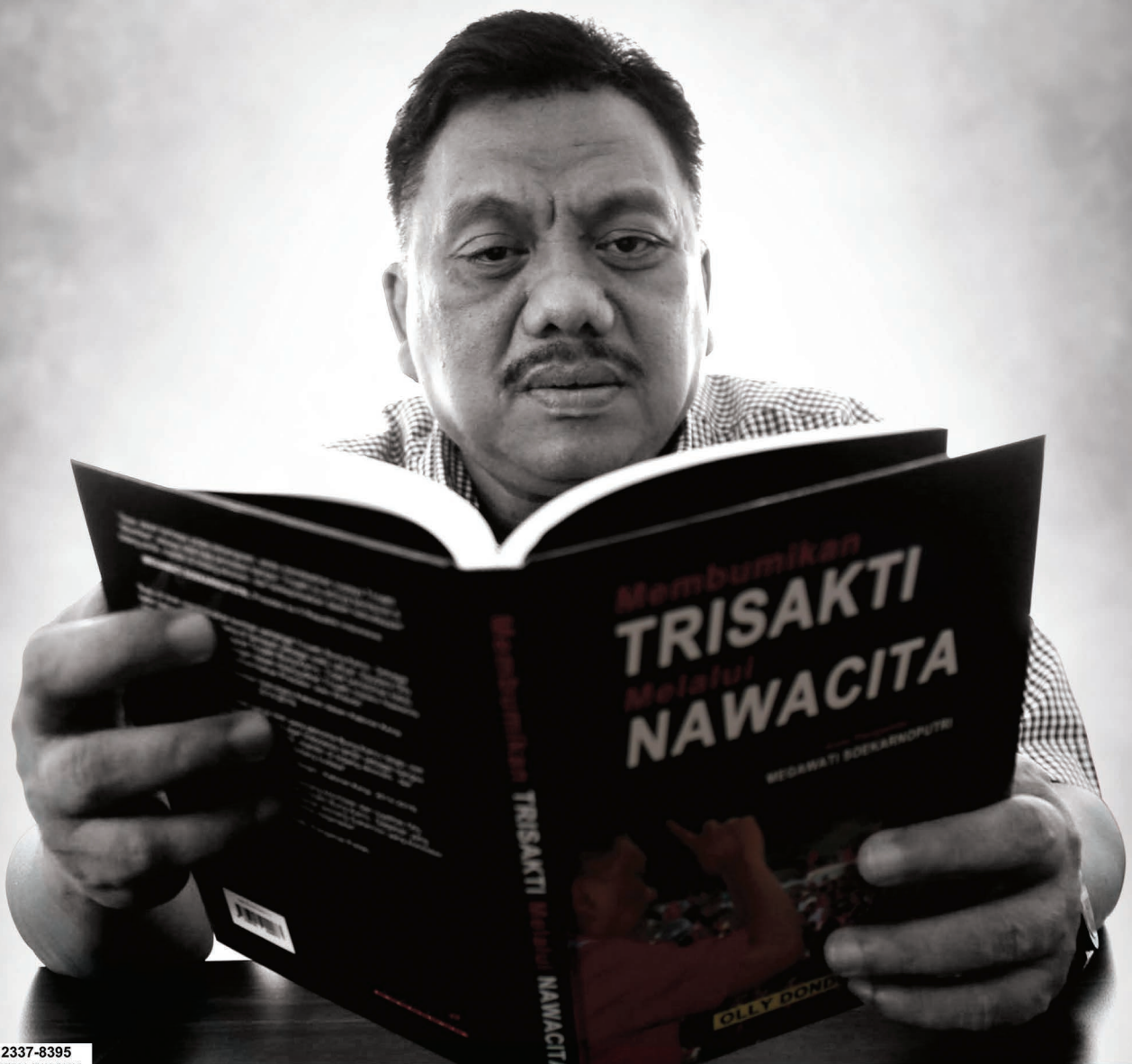
Laporan Utama: APBN Milik Siapa?

AKTUAL

Edisi 43 | 01 - 15 November 2015

Meneguh Nawacita

“Saya merasa terpanggil untuk menjawab tuntutan rakyat mengenai curiositas tentang ekonomi mandiri”



ISSN 2337-8395



Rp. 30.000

WWW.AKTUAL.COM

aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA

Menyajikan informasi terhangat dan terpercaya,
disampaikan secara cepat, tepat, benar,
serta makin progresif!



INFO & PEMASARAN

 **Dedy 081 20 53 8776**
Ranie 081 38 210 44 69
Rhiza 081 828 0941 009

 **marketing@aktual.com**
iklan@aktual.com

PENDIRI M Danial Nafis
KOMISARIS Yudi Latif
PEMIMPIN REDAKSI Faizal Rizki Arief
SEKRETARIS REDAKSI Tsurayya Zahra
REDAKTUR SENIOR Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi
SIDANG REDAKSI Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Wahyu Romadhony
REDAKTUR Ferro Maulana, Andy Abdul Hamid, Nebby Mahbubirrahman, Sukardjito, Ismed Eka Kusuma, Tino Oktaviano (Foto)
ASISTEN REDAKTUR Zaenal Arifin, M Vidia Wirawan, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu Yusep, Arbie Marwan
STAF REDAKSI Soemitro, Fadlan Syam Buttho, Maulana Khamal Macharani, Nailin In Saroh, Mochammad Zaky Kusumo, Muhammad Fikry Hizbullah, Novrizal Sikumbang, Warnoto (TV), Junaidi (Foto), Munzir (Foto), Dhanu Akbar Muhammad Daeng, Leonina K Lahama, Ludyah Annisah, Muhammad Fikry Hizbullah, Eko Sumaryanto (Foto Komersial)

DESAIN GRAFIS Shofrul Hadi, Nelson Nafis

HEAD IT DIVISION: Yudhi Astira

NETWORK: Tri Wahyudi (Hd), Rendra

SMC: Imelda, Taufik, Iqbal Maulana, Muhamad Farisi

KONTRIBUTOR LUAR NEGERI Fitra Ismu (Meksiko)

REPORTER DAERAH Masriadi Sambo (Aceh), Najamuddin Arfah (Makasar), Damai Oktavianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), A, Bobby Andalan (Denpasar), Andri Wawan MS Husen (Palu), Vina Fatma Sari (Bandung)

DIREKTUR OPERASIONAL Rinrin

Sukmariana

MANAGER KEUANGAN Kasep Natakusumah

STAF KEUANGAN Zulkarnain, Vinka H P

HRD & KESEKRETARIATAN Nuryana

HUBUNGAN INTERNASIONAL Fahad Thalib

SIRKULASI Widhi Maulana, Bayu Aji,

N. Subihantoro

MARKETING OFFICER Dedy Kusnaedi, Rhiza

Adittya, Ranie Anggoro

ALAMAT REDAKSI

Graha Aktual: Jl. Tebet Barat VIII no.50 Jakarta Selatan, Indonesia Kode pos: 12810
 Telp. 021 83794508 (Hunting)
 Fax. 021 83794706

redaksi@aktual.com
 iklan@aktual.com

aktual.com
 TERHANGAT TERPERCAYA

aktual
 MEDIA

APBN Milik Siapa?



Pembaca yang budiman.
 Di akhir penghujung bulan Oktober 2015 ini terjadi banyak kegaduhan. Baik itu di sektor ekonomi, politik maupun hukum.

Intinya, sebagian masalah tersebut berujung ke pengesahan RAPBN 2016 di mana anggaran penerimaan dan pembelanjaan negara dirumuskan dan disahkan untuk menjalankan pembangunan negara sampai setahun kemudian.

Laporan Utama Aktual kali ini mengupas tentang milik siapa RAPBN 2016 ini? Kubu KMP dan KIH di dewan semuanya mengatasnamakan rakyat dalam menyetujui dan tidak menyetujui beberapa hal di RAPBN 2016 yang ditawarkan pemerintah.

Dalam satu hal, KMP ngotot agar anggaran PMN 2016 untuk BUMN dipangkas atau dihilangkan. Itu belum soal besaran Tax Amnesty yang harus dikeluarkan negara yang mencapai sampai Rp500 triliun meski RUU Tax Amnesty belum disahkan.

Kisruh soal uang triliunan di RAPBN 2016 kali ini sebenarnya

sudah berproses beberapa bulan sebelumnya. Mulai dari tender kereta api cepat sampai kasus-kasus hukum yang menimpa banyak partai pendukung pemerintah. Ada sinyalemen, KPK digunakan lagi untuk kepentingan politik tertentu. Ini bisa Anda dibaca di rubrik hukum.

Tak salah jika isu *reshuffle* kembali muncul ketika peta politik mulai berubah pasca masuknya PAN sebagai partai pendukung pemerintah. Layak kalau PKB Hanura dan Nasdem yang jadi sorotan lewat kasus hukum petingginya jadi “marah”.

Soal kabut, Aktual juga menyorot hal ini. Bagaimana tidak, kebakaran dan kabut asap ternyata sudah jadi isu global. Bukan hanya sekadar bencana alam. Tapi itu bisa menjadi bencana politik jika Jokowi dan JK tidak mampu menyelesaikan hal ini dengan baik dan benar.

Kami juga menyajikan beberapa tulisan menarik untuk dinikmati dan menambah referensi Anda. Semoga bermanfaat...

Selamat membaca. ◌

Laporan Utama

32 RAPBN 2016 Milik Siapa?

Banyak lubang besar di RAPBN 2016 ini. Apakah benar RAPBN ini sudah mencerminkan janji Jokowi-JK untuk tetap di jalur Trisakti dan Nawacita?



34 Hikayat Swastanisasi PLN

Benarkah Indonesia dalam telukungan kapitalisme global sejak pasca reformasi 1998? Cerita seputar swastanisasi kelistrikan di Indonesia sudah dirancang oleh IMF dan Bank Dunia sejak 1997, agaknya jadi isyarat bahwa Indonesia sedang memasuki zona merah neoliberalisme.



38 RAPBN 2016 dan “Pengorbanan” Jokowi di Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur masih menjadi program kerja pemerintah di tahun 2016. Namun, di tengah melambatnya ekonomi, Presiden Jokowi terpaksa memangkas drastis anggaran sektor ini untuk dialihkan ke pengurangan pengangguran dan kemiskinan.



28 WAWANCARA

Olly Dondokambey: Nawacita Akan Wujudkan Kemandirian Ekonomi Bangsa

“Saya tergerak untuk menggali hal-hal mendasar atau hakikat dari gagasan ekonomi mandiri tersebut karena saya sadar bahwa sebagai wakil rakyat, saya bersentuhan secara langsung dengan politik ekonomi (anggaran) bangsa ini. Lebih dari itu, saya merasa terpanggil untuk menjawab tuntutan rakyat mengenai curiositas tentang ekonomi mandiri,” kata Olly Dondokambey



14 AKTUAL REVIEW

Ada Kabut Di Balik Kabut Asap

Sangat keras diduga bahwa ada rantai kait kuat yang menghubungkan kepentingan asing di industri Sawit Indonesia pada peristiwa ditandatanganinya RPP Gambut, ratifikasi AATHP, komitmen Indonesia Palm Oil Pledge, program Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sampai dengan kurcun dana dalam skala besar untuk penguatan LSM Lingkungan.

18 NASIONAL

Bencana Buatan Manusia

Bencana asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) adalah bencana buatan manusia. Akibat ulah manusia karena 99 persen penyebab karhutla adalah disengaja.

24 POLITIK

Selamat Ulang Tahun Nasdem

Diusianya yang masih balita malah mengalami musibah berat. Beberapa kadernya terjerat kasus dugaan korupsi dan dugaan suap.

40 HUKUM

Jumat Keramat KIH

Sungguh, Jumat itu adalah hari paling bersejarah untuk partai-partai pendukung pemerintah.

44 HUKUM

Menelusuri Jejak Hitam Pelindo II

Panitia Khusus Pelindo II terus mendalami dugaan penyimpangan dalam pengelolaan BUMN yang dipimpin oleh Richard Joost Lino.

48 EKONOMI

Jalan Terjal Freeport

“...Bahwa setelah UU Nomor 4/2009 diberlakukan, maka tidak akan ada lagi perpanjangan KK PT Freeport Indonesia, baik saat sekarang maupun 2019 mendatang...” (Anggota Poksi VII Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Adian Napitupulu)

54 LIFE

Mimpi Dapat Bantu Manusia Hadapi Sakaratul Maut

Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Palliative Medicine, menemukan bahwa memang benar bahwa penglihatan visual dan mimpi-mimpi itu adalah bagian dari proses manusia menghadapi sakaratul maut.

56 RESENSI

Dualisme Jepang Terhadap Indonesia; Sebelum dan Sesudah Pristiwa 1965

Saat Indonesia memilih jalan konfrontasi dengan Malaysia misalnya, AS dan Inggris mendesak Jepang untuk tampil sebagai penengah. Jepang meminta Indonesia untuk menghentikan konfrontasi tersebut. Hal yang sama juga ketika Indonesia memilih keluar dari PBB dan mulai menjalin hubungan dengan Tiongkok.



Drakula Anggaran Incar dan Mangsa RAPBN 2016

Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengungkapkan bahwa level perampokan anggaran oleh para oligarki politik yang membajak institusi negara saat ini, bila dianalogikan dengan bencana alam, bukan lagi di level waspada, namun sudah memasuki level awas.

"RAPBN 2016 sedang diincar dan dimangsa oleh drakula politik yang rencananya akan disahkan oleh DPR pada 30 Oktober 2015," ujar Salamuddin Daeng di Jakarta, Kamis (29/10).

Sumber daya alam saat ini, lanjutnya telah habis dimangsa oleh para drakula politik yang berkuasa di negeri ini, mereka menyisakan kerusakan lingkungan, kebakaran hutan, asap, kekeringan.

"Satu-satunya sumber yang mau dilahap adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui berbagai skema ribuan proyek infrastruktur, penyertaan modal ke BUMN, penyertaan modal ke lembaga keuangan internasional, seperti AIBB dan World Bank, untuk tujuan untuk melipatgandakan utang," jelasnya.

Dikatakan Daeng, di tengah kejatuhan harga komoditas seperti sawit, batubara, minyak, dan sumber daya alam lainnya, para taipan,

saudagar, yang di-backup oleh para marsose, *bodyguard* politik dan intelektual, semakin kelaparan dan kehausan, semakin ganas dan "haus darah segar".

"Darah paling segar itu adalah APBN. Itulah mengapa RAPBN 2016 sangat ambisius, naik dari target APBNP 2015. Padahal APBNP sebelumnya tersebut tidak mencapai target," tegasnya.

"Ini jelas tidak waras bagaikan pungguk merindukan bulan. Ambisi ini akan dicapai dengan mencekik rakyat dengan pajak berlipatganda, cukai yang selangit, dan berbagai pungutan yang mencekik leher," tambahnya.

Tidak hanya itu, lanjutnya, drakula politik akan menjual negara kepada asing dengan mengemis utang luar negeri, menjual BUMN dan menjadikan APBN sebagai proyek bersama antara para taipan, saudagar, yang menguasai negeri bersama sama dengan modal asing.

"Negara dipimpin oleh Presiden yang lemah, dengan sistem politik yang amburadul telah dimanfaatkan oleh para drakula politik yang habitatnya tidak punya nurani terhadap penderitaan rakyat, miskin, menganggur dan menderita berbagai penyakit akibat bencana pembakaran lahan dan asap," pungkasnya. *Ismed Eka*

Mantan Menkeu: RAPBN 2016 Sangat Buruk

Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier menilai postur anggaran dalam RAPBN 2016 sangat buruk. Baik dalam segi realisasi dan asumsi pendapatan.

"RAPBN 2016 tidak realitis dan asal-asalan," ujarnya kepada Aktual.com, Minggu (25/10).

Ia mencontohkan rendahnya asumsi makro dalam RAPBN dengan alasan lesunya kondisi ekonomi yang disampaikan pemerintah tidak sinkron dengan target penerimaan yang tinggi.

"Target-target penerimaan masih banyak yang tidak realistis, DPR harus meminta pernyataan kesanggupan eksekutif untuk merealisasikannya," ujarnya.

Lebih lanjut menurutnya postur anggaran yang lebih menitik beratkan pada proyek jangka panjang tidak menuntaskan permasalahan dimana pemutusan hubungan kerja terjadi besar-besaran.

Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan hingga bulan Maret sudah terjadi 300 ribu PHK disejumlah wilayah.

"Itu yang tercatat 300 ribu pada bulan Maret kalau sekarang sudah jutaan, karena yang tercatat itu hanya pada sektor formal, yang sektor nonformal tidak tercatat. Indikasi lainnya, orang berbondong-bondong mendatangi kantor BPJS untuk menarik tabungan Jaminan Hari Tua," demikian tutupnya. *Wahyu Romadhoni*





“Implementasi Pemanfaatan B20”, Keseriusan dan Komitmen Indonesia dalam Pengembangan Bahan Bakar Nabati

Indonesia, yang selama ini hampir 94% pemenuhan kebutuhan energi nasional bersumber dari energi fosil, akan mengalami ancaman pada ketahanan dan kemandirian energinya karena produktivitas minyak bumi nasional cenderung menurun dari waktu ke waktu sehingga mengharuskan Indonesia untuk mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berimbas pada neraca makro ekonomi Indonesia.

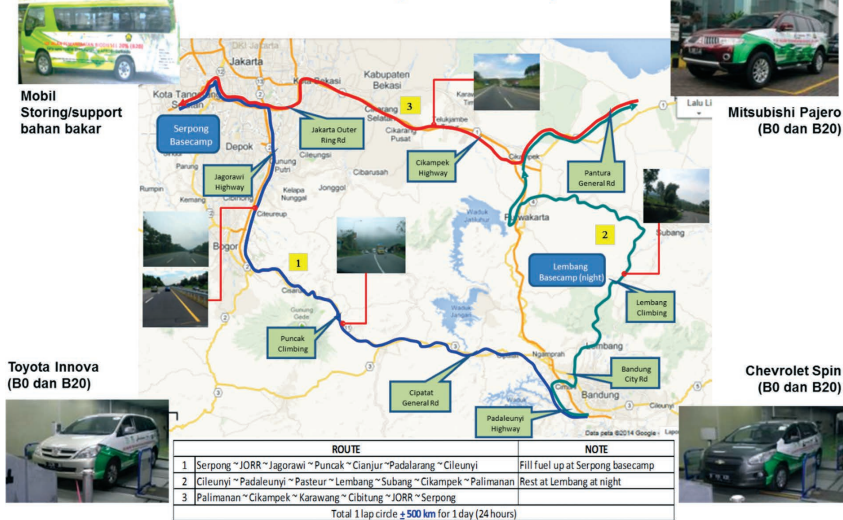
Sementara di sisi lain, Indonesia sebagai negara tropis memiliki potensi pemenuhan kebutuhan energi terbarukan untuk menggantikan energi fosil, khususnya BBM jenis minyak solar dengan memanfaatkan ketersediaan *Crude Palm Oil* (CPO) yang melimpah sebagai bahan baku

biodiesel. Berdasarkan data statistik Direktorat Jenderal Perkebunan, produksi minyak kelapa sawit (CPO) tahun 2014 berkisar 30,95 juta ton sedangkan konsumsi domestik berkisar 8,8 juta ton yang didominasi pemakaian industri *RBD Palm Oil* termasuk minyak goreng dan margarin serta untuk industri kosmetik. Industri biodiesel menjadi sektor terbesar kedua yang menyerap produk CPO sebesar 3,96 juta ton pada tahun 2014.

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (DJ EBTKE) sebagai *focal point* program mandatori biodiesel terus melakukan upaya-upaya dalam rangka memastikan program mandatori biodiesel berjalan sesuai

pentahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM No 12/2015. Setelah pada tahun 2014, DJ EBTKE melakukan uji coba (road test) pemanfaatan 20% (B20) yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait sejauh 40.000 km dengan kendaraan uji Kijang Innova, Mitsubishi Pajero dan Chevrolet Spin, dan hasilnya menunjukkan tidak ada kendala yang berarti, maka persiapan teknis implementasi mandatori biodiesel B20 kemudian dilanjutkan pada tahun 2015 dengan melakukan *roadshow* selama 13 hari dengan menempuh rute Jawa-Sumatera melalui rute Jakarta-Lampung-Palembang-Jambi-Padang-Pekanbaru-Medan dan kembali lagi ke Jakarta.

Rute Uji Jalan Kendaraan B20 (Tahun 2014)



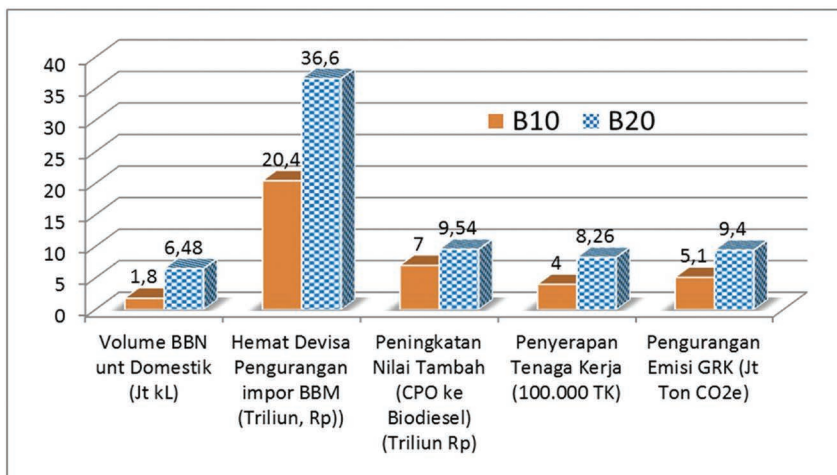
B20 adalah mendukung program pemerintah terkait pengurangan emisi gas rumah kaca. Dari total pemanfaatan biodiesel pada tahun 2014, menghasilkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 2,53 juta ton CO₂e dan akan terus meningkat seiring meningkatnya realisasi penggunaan biodiesel di dalam negeri.

Selain memberikan dampak positif terhadap lingkungan, pemanfaatan biodiesel juga akan meningkatkan ekonomi nasional melalui penghematan devisa negara, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah hilirisasi industri minyak kelapa sawit nasional.

Walaupun dalam implementasinya masih terdapat beberapa tantangan antara lain kepastian pasokan bahan baku CPO yang berkelanjutan, harga biodiesel yang bersaing dengan bahan bakar minyak jenis minyak solar, khususnya yang diimpor, kesiapan industri dan teknologi kendaraan, serta kesiapan infrastruktur *blending* untuk distribusi biodiesel. Namun ditengah upaya mengatasi hambatan dan tantangan tersebut, program B20 ini seakan memberi pesan pada dunia, bahwa Indonesia sungguh-sungguh siap dan berkomitmen dalam implementasi mandatori biodiesel.

Berbagai upaya juga terus dilakukan untuk dapat menjawab berbagai tantangan di atas antara lain mendorong investor untuk meningkatkan kapasitas produksi biodiesel yang akan mencapai kisaran kapasitas produksi terpasang sekitar 9 - 10 juta KL pada pertengahan tahun 2016, juga terus dilakukan kegiatan pengawasan kualitas dan kuantitas sesuai regulasi dan standar, serta sosialisasi penggunaan, penanganan dan penyimpanan biodiesel secara *masive* dan komprehensif untuk meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan dalam pemanfaatan biodiesel dan campurannya sebesar 20% dalam bahan bakar minyak solar yang dikenal dengan B20.

DAMPAK POSITIF IMPLEMENTASI MANDATORI B10 DAN B20



“Roadshow pemanfaatan biodiesel diselenggarakan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pemanfaatan Biodiesel B20 untuk pemenuhan kebutuhan energi nasional. Hampir semua industri otomotif siap menggunakan B20, bahkan ada yang tidak sabar menggunakan B30,” kata Direktur Bioenergi, EBTKE Tisnaldi di Jakarta pada saat acara “Peresmian/ Launching Uji Jalan dan Sosialisasi Pemanfaatan B20 Road Show to Sumatera” pada tanggal 19 Oktober 2015 di Gedung Direktorat Jenderal

EBTKE.

Roadshow tersebut direncanakan berlangsung dari tanggal 19 Oktober hingga 2 November 2015 menggunakan 6 (enam) kendaraan berbahan bakar B20 yaitu, kendaraan operasional Direktorat Jenderal EBTKE (minibus), Truk Hino, Ford, Toyota, Chevrolet Spin, dan Mitsubishi Pajero. Dalam roadshow tersebut, Direktorat Jenderal EBTKE juga melakukan sosialisasi terkait manfaat Implementasi B20 baik secara teknis, ekonomi maupun lingkungan serta jaminan suplai produk biodiesel. Salah satu manfaat



Gerakan Kebudayaan dan Mentalitas Kebangkitan

Apabila gerakan kebangkitan di masa lalu berhasil memancarkan 'pikiran' dan 'keberaksaraan' sebagai tanda kemajuan, lantas tanda apakah gerakan yang kita ciptakan masa kini, seabad setelah Budi Utomo berdiri? Inilah pertanyaan genting yang harus dicermati.

Terdapat tanda-tanda bahwa 'pikiran' dan keberaksaraan tak lagi menjadi ukuran kehormatan. Inteligensia dan politisi berhenti membaca dan mencipta, karena kepintaran kembali dihinakan oleh 'kebangsawanan baru': kroni dan kemewahan terdapat indikasi bahwa 'pikiran' dan keberaksaraan tak lagi menjadi ukuran kehormatan.

Penaklukan daya pikir dan daya literasi oleh pragmatisme dan banalisme membuat mindset kebangsaan kehilangan daya refleksivitasnya? Tanpa kemampuan refleksi diri, suatu bangsa kehilangan wahana pembelajaran untuk menarik, memperbaiki dan memperbaharui dirinya sendiri.

Tanpa kapasitas pembelajaran, bangsa Indonesia (secara keseluruhan) bergerak seperti zombie. Pertumbuhan penampilan fisiknya tak diikuti perkembangan rohaninya. Tampilan luar dari kemajuan peradaban modern segera kita tiru, tanpa penguasaan sistem penalarannya. Sebagai pengekor yang baik dari perkembangan fashion dunia, kita sering merasa dan bergaya seperti bangsa maju. Padahal, secara substantif, tak ubahnya bak Peterpan yang mengalami fiksasi ke fase "kanak-kanak" (jahiliyah). Bahkan bisa lebih buruk lagi. Dalam kasus strategi kebudayaan, kita cenderung

mempertahankan yang buruk dan membuang yang baik.

Dalam situasi demikian, gerakan kebudayaan yang mengeluhkan apa yang disebut Taufiq Ismail sebagai "generasi nol buku", yang berpotensi mengalami kelumpuhan daya tulis, daya baca, dan daya pikir, secara tepat menysasar pusat syaraf kelumpuhan kebudayaan Indonesia.

Gerakan kebudayaan seperti ini penting untuk melakukan koreksi terhadap kecenderungan untuk menjadikan politik dan ekonomi sebagai panglima. Dalam teori sosial secara umum, responsibilitas untuk perubahan biasanya dijamin pada faktor-faktor semacam modernisasi, kapitalisme, imperialisme, figur karismatik atau individu-individu berpengaruh

Hal ini mengabaikan kenyataan bahwa reformasi sosial tidak akan pernah muncul hanya mengandalkan reformasi politik dan ekonomi, melainkan perlu berjejak pada reformasi sosial-budaya.

Gerakan kebudayaan merupakan jantung dari reformasi sosial. Pada dekade 1960-an, Herbert Marcuse menekankan dimensi estetika dari gerakan sosial pada masa itu, dengan menegaskan bahwa dalam seni, musik dan sastra lah gerakan-gerakan sosial mengingat dan menyimpan tradisi kritik dan perlawanan (Marcuse, 1969). Hal ini diperkuat oleh Richard Flacks dalam analisisnya tentang "tradisi kiri" Amerika, yang mengindikasikan bahwa gerakan sosial seringkali lebih penting sebagai aktor budaya ketimbang politik (Flacks, 1988).

Reformasi sosial merupakan fungsi dari perubahan proses belajar sosial secara kolektif, yang membawa

transformasi tata nilai, ide dan jalan hidup (ways of life). Dalam hal ini, minat pengetahuan (knowledge interest) serta aktivitas produksi ide (ideas-producing activities) sangat esensial dalam mengkonstruksikan identitas kolektif baru yang memungkinkan gerakan sosial mampu memelihara vitalitasnya.

Dalam ketiadaan platform politik yang jelas, gerakan kebudayaan menjadi alternatif menjaga kewarasan publik. Adalah melalui sastra, nyanyian dan seni yang lain—yang dibudayakan dalam masyarakat—yang bisa membuat gerakan dan cita-cita sosial bisa bertahan dalam memori kolektif.

Menyongsong Revolusi Mental

Gerakan kebudayaan sebagai ikhtiar untuk merevitalisasi tenaga kejiwaan bangsa ini menemukan resonansinya lewat kampanye kepresidenan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang memunculkan tanda baru kebangkitan dalam tema "revolusi mental".

Apakah gerakan revolusi itu? Istilah revolusi terlalu sering disalahpahami. Dalam pemahaman umum selama ini, revolusi sering diasosiasikan sebagai perubahan cepat dalam ranah sosial-politik dengan kekerasan radikal yang menyertainya. Jarang orang yang menyadari bahwa sebelum digunakan dalam wacana dan gerakan sosial-politik, istilah revolusi sesungguhnya lebih dahulu muncul sebagai istilah teknis dalam sains (exact sciences).

Secara denotatif, revolusi berarti "kembali lagi" atau "berulang kembali"; ibarat musim yang terus berganti secara siklikal

untuk kembali ke musim semula. Maka dalam sains, istilah revolusi mengimplikasikan suatu ketetapan (konstanta) dalam perubahan; pengulangan secara terus-menerus yang menjadikan akhir sekaligus awal. Pengertian seperti inilah yang terkandung dalam frase “revolusi planet dalam orbit”.

Pada 1543, Nicolaus Copernicus mempublikasikan buku *De Revolutionibus Orbium Coelestium*, yang sering dinisbatkan sebagai penanda revolusi paradigmatis dalam sains yang mengubah keyakinan tentang pusat alam semesta dari geosentrisme (berpusat di bumi) menuju heliosentrisme (berpusat di matahari). Perubahan mendasar dalam keyakinan ilmiah ini kemudian dikenal sebagai revolusi Copernican. Istilah revolusi dalam kaitan ini bergeser dari pengertian sebelumnya menjadi apa yang didefinisikan Thomas Kuhn sebagai “perubahan dalam susunan keyakinan saintifik atau dalam paradigma”. Dengan kata lain, pengertian revolusi tidak lagi menekankan aspek kesinambungan dalam daur ulang (unbroken continuity), melainkan justru dilihat sebagai patahan dalam kesinambungan (break in continuity). Sejak itu, revolusi berarti suatu perubahan struktur mental dan keyakinan karena introduksi gagasan dan tanaman baru yang membedakan dirinya dari gagasan dan tanaman masa lalu (Cohen, 1985).

Pengertian revolusi seperti itulah yang diadopsi ke dalam wacana dan gerakan sosial-politik. Penggunaan istilah revolusi dalam bidang politik memperoleh popularitasnya menyusul Revolusi Amerika (1776) dan terlebih setelah Revolusi Perancis (1789). Seperti halnya revolusi dalam sains, pengertian revolusi dalam politik pun pada mulanya mengandung konotasi yang ramah (benign), hingga Revolusi Perancis berubah menjadi ekstrem dalam bentuk teror yang menakutkan. Konotasi menakutkan dari istilah revolusi tersebut menguat menyusul publikasi *The Communist Manifesto*

pada pertengahan abad ke-19, revolusi 1848, dan gerakan komunis internasional dengan agenda revolusi berskala dunia yang mengandung ekspresi kekerasan yang terkait dengan perubahan cepat.

Bagaimana pun juga, kekerasan dan perubahan cepat bukanlah elemen esensial dari suatu revolusi. Revolusi tidak mesti dengan jalan kekerasan. Pada 1986, Peter L. Berger mempublikasikan buku *The Capitalist Revolution* yang menunjukkan suatu bentuk revolusi nirkekerasan. Revolusi pun bisa ditempuh secara cepat atau lambat. Revolusi industri di Eropa ditempuh dalam puluhan bahkan ratusan tahun. Yang esensial dalam suatu revolusi adalah “kebaruan” (newness). Hannah Arendt (1965) mengingatkan bahwa “Konsep modern tentang revolusi terkait dengan pengertian bahwa jalannya sejarah seketika memulai hal baru. Revolusi mengimplikasikan suatu kisah baru, kisah yang tidak pernah diketahui atau diceritakan sebelumnya.” Revolusi menjadi jembatan yang mentransformasikan dunia lama menjadi dunia baru.

Alhasil, revolusi sejati yang punya dampak besar dalam transformasi kehidupan harus mengandung kebaruan dalam struktur mental dan keyakinan. Dengan kata lain, revolusi sejati meniscayakan perubahan mentalitas (pola pikir dan sikap kejiwaan) yang lebih kondusif bagi perbaikan kehidupan. Urgensi revolusi mental seperti ini sejalan dengan Firman Tuhan dalam Al-Qur’an (QS 13: 11): “Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sebuah kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada jiwa mereka.”

Kenyataannya, keberhasilan revolusi fisik merebut kemerdekaan serta jatuh bangunnya pemerintahan pasca kolonial tidak diikuti oleh perubahan mendasar pada struktur mentalitas bangsa. Pada relung terdalam kejiwaan bangsa ini masih bercokol mentalitas feodalistis yang menghisap ke bawah, tapi mudah bermetamorfosis menjadi

mentalitas budak di hadapan tuan-tuan agung. Mentalitas budak (inferior) menjadikan bangsa ini mudah mengekor bangsa lain; saat yang sama sulit menerima kelebihan dan kemenangan sesama bangsanya sendiri.

Dengan struktur mentalitas seperti itu, kemerdekaan dan pembangunan Indonesia tidak diikuti oleh kemandirian dalam ekonomi, kedaulatan dalam politik dan kepribadian dalam kebudayaan. Lemahnya mentalitas kemandirian membuat wajah perekonomian bangsa ini belum kunjung beranjak dari gambaran perekonomian negeri terjajah yang dilukiskan Bung Karno pada 1930-an. Pertama, sumber daya alam-nya hanya dijadikan bahan baku murah oleh negara-negara maju. Kedua, negeri kita hanya dijadikan sebagai pasar untuk menjual produk-produk hasil industri negara maju tersebut. Ketiga, dijadikan tempat untuk memutarakan kelebihan modal (kapital) oleh negara-negara kapitalis tersebut atau dengan kata lain menjadi tempat investasi asing.

Lemahnya mentalitas kedaulatan membuat politik negeri ini tak leluasa mengembangkan pilihan sistem dan kebijakan politik sendiri. Keluar, kewajiban Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam hubungan internasional kian memudar. Kedalam, pilihan-pilihan pembangunan tidak lagi ditentukan oleh apa yang disebut Tan Malaka sebagai “kemauan, pelor, atau bambu runcingnya Rakyat Indonesia sendiri”. Tanpa kedaulatan mengembangkan sistem pemerintahan sendiri, demokrasi padat modal membuat pilihan-pilihan politik kerap dimenangkan kepentingan korporasi, karena aspirasi rakyat tidak memiliki sarana yang efektif untuk mengekspresikan diri.

Lemahnya mentalitas kepribadian membuat kebudayaan bangsa ini tak memiliki jangkang karakter yang kuat. Tanpa kekuatan karakter, Indonesia

adalah bangsa besar bermental kecil; bangsa besar yang mengidap perasaan rendah diri. Bangsa yang selalu melihat dunia luar sebagai pusat teladan, tanpa menyadari dan menghargai kelebihan-kelebihan bangsa sendiri. Tanpa kekuatan karakter, kita sulit menjadi pemenang dalam era persaingan global. Sebab seperti diingatkan Napoleon Bonaparte, “Dalam pertempuran (baca: persaingan), tiga per-empat faktor kemenangan ditentukan oleh kekuatan karakter dan relasi personal, adapun seperempat lagi oleh keseimbangan antara keterampilan manusia dan sumberdaya material.”

Begitu terang-benderang, bahwa krisis mentalitas merupakan akar tunjang dari segala krisis kebangsaan. Bisa dipahami bila pesan Lagu Kebangsaan lebih mendahulukan pembangun jiwa daripada raga. Celakanya, perhatian yang berlebihan terhadap investasi material membuat kita mengabaikan investasi mental.

Dunia pendidikan yang biasanya dijadikan sandaran terakhir bagi transformasi sosial bukannya memberi harapan, malah menjadi bagian dari krisis itu sendiri. Lembaga pendidikan sebagai benteng kebudayaan mengalami proses pengerdilan, tergerus oleh dominasi etos instrumentalisme; suatu etos yang menghargai seni, budaya dan pendidikan sejauh yang menyediakan instrumen untuk melayani tujuan-tujuan praktis.

Suatu usaha “national healing” perlu dilakukan dengan melakukan gerakan revolusi mental melalui proses persemaian dan pembudayaan dalam dunia pendidikan. Proses pendidikan sejak dini, baik secara formal, non-formal maupun informal, menjadi tumpuan untuk melahirkan manusia baru Indonesia dengan mental-karakter yang kuat

Tricita Revolusi Mental

Sejauh bisa ditangkap dari kampanye kepresidenan Jokowi-JK, visi-misi pemerintahan baru akan

berusaha secara terencana, bertahap dan terstruktur mentransformasikan Indonesia menuju bangsa yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Untuk merealisasikan visi-misi “trisakti” tersebut, selain diperlukan dukungan sumberdaya material, keterampilan, dan manajemen, yang paling penting adalah kesiapan mental. Keduanya bahkan menyadari bahwa sandungan utama dalam mengemban visi-misi trisakti tersebut bersumber dari hambatan mental (mental block). Bahwa secara umum, manusia dan bangsa Indonesia mengalami kerentanan dalam mentalitas berdikari, berdaulat, dan berkepribadian, dengan berbagai implikasi destruktifnya bagi perkembangan bangsa.

Usaha revolusi mental harus menasar aspek terpenting yang menentukan perilaku manusia, yakni karakter personal dan budaya (sistem nilai, sistem pengetahuan dan sistem perilaku sebagai pembentuk karakter kolektif). Sedemikian pentingnya dimensi budaya dalam menentukan transformasi bangsa, sehingga mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew menyatakan: “Budaya adalah penentu nasib suatu bangsa.”

Dalam proyek transformasi budaya, perlu diidentifikasi mentalitas inti sebagai penggerak utama (prime mover) bagi kelahiran mentalitas-mentalitas turunannya. Dalam merumuskan budaya perusahaan (corporate culture), terdapat kesepakatan umum, bahwa jumlah mentalitas inti yang menjadi pusat perhatian itu harus terbatas, sehingga mudah diingat dan terukur. Demikian pula halnya dalam merumuskan budaya kebangsaan-kenegaraan (civic-state culture). Kita harus merumuskan beberapa mentalitas inti bangsa ini yang harus diubah dan diperkuat dalam kerangka transformasi budaya bangsa.

Dengan mempertimbangkan realitas hambatan mental yang

ada serta idealitas nilai-nilai budaya keindonesiaan, gagasan revolusi mental Jokowi-JK bisa berfokus pada tiga mentalitas inti sebagai sasaran utama. Ketiganya berkisar pada cita penguatan mentalitas-budaya kemandirian, mentalitas-budaya gotong-royong, dan mentalitas-budaya pelayanan. Untuk memudahkan pengingatan, Jokowi-JK bisa mengemas ketiga cita revolusi mental itu dengan mencanangkan suatu tanda perubahan, bernama “Tricita Revolusi Mental”.

Pentingnya mentalitas-budaya “kemandirian” berangkat dari asumsi bahwa secara kultural, sebab utama yang membuat manusia-bangsa Indonesia tidak berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam kebudayaan adalah karena manusia-bangsa Indonesia secara umum tidak bisa menghargai dirinya sendiri, kurang percaya diri, kurang aktualisasi diri, lemah pendirian, dan lemah kepribadian. Jika disederhanakan, manusia-bangsa Indonesia tidak memiliki mentalitas kemandirian.

Karena tidak memiliki mentalitas kemandirian, perilaku manusia-bangsa Indonesia cenderung terperangkap dalam dua pilihan ekstrem: melakukan apa yang orang (bangsa) lain lakukan, yang mendorong mentalitas konformis; atau melakukan apa yang diinginkan orang (bangsa) lain, yang menyuburkan mentalitas pecundang dan totalitarian. Revolusi mental harus menumbuhkan mentalitas kemandirian yang membuat manusia-bangsa Indonesia dapat menghargai dirinya sendiri untuk mengembangkan potensi diri dan mengambil pilihan menurut pendiriannya dalam rangka mencapai yang terbaik.

Pentingnya mentalitas-budaya “gotong-royong” berangkat dari asumsi bahwa nilai penting kualitas dan kepercayaan diri hanya menemukan kepenuhan maknanya dalam jaringan kerjasama dengan

yang lain. Setiap huruf Alfabet, dari A sampai Z, merupakan satu karakter yang masing-masing sama pentingnya. Meski demikian, betapapun pentingnya keberadaan setiap karakter (huruf) itu, tidaklah bermakna apa-apa tanpa bersekutu dengan huruf-huruf lain dalam membentuk kata dan kalimat.

Dalam kemajemukan karakter masyarakat Indonesia, gotong royong adalah nilai fundamental bangsa ini. Menurut pandangan Bung Karno, gotong-royong adalah intisari Pancasila sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku bersama. Dalam pandangannya, “Gotong-royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari ‘kekeluargaan’... gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan.... Gotong-royong adalah pembanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong-royong!”

Revolusi mental harus merestorasi warisan budaya gotong-royong yang mulai pudar ini dengan mengembangkannya dalam pengertian yang lebih luas. Restorasi dan transformasi budaya gotong-royong bisa mencakup pengembangan budaya “silih asih, silih asah, dan silih asuh”; berat sama dipikul, ringan sama dijinjing; tolong-menolong dengan semangat koperasi; saling menghargai dalam perbedaan seraya aktif meningkatkan pemahaman dan titik-temu dalam perbedaan (active engagement); mampu menghargai dan mengapresiasi karya dan prestasi orang lain; serta mampu menjalin sinergi antarpotensi, antaragensi, antarsektor, antarwilayah.

Pentingnya mentalitas-budaya “pelayanan” berangkat dari asumsi bahwa pemupukan kemandirian dan penguatan welas asih kegotongroyongan itu harus

bermuara pada pelayanan. Bunda Teresa mengatakan, “Buah dari kecintaan adalah pelayanan”. Dalam realitas hidup bangsa Indonesia, apapun yang dikerjakan Tuhan sebagai pelayanan kepada bangsa ini serba elok, fantastis, subur, dan makmur. Tetapi, apapun yang dikerjakan manusia sebagai pelayanan kepada nusa-bangsanya serba amburadul, asal-asalan, mandul, dan miskin.

Dalam realitas politik hari ini, praktik gotong-royong masih berjalan, namun dalam konotasi toleransi negatif, “tolong-menolong dalam kejahatan dan pengrusakan”. Gerakan revolusi mental harus menempatkan gotong-royong itu dalam konteks toleransi positif, “tolong-menolong dalam kebaikan dan pembangunan”. Semangat toleransi yang memadukan kemandirian dan kerjasama dalam menunaikan pelayanan publik dan kemanusiaan dengan penuh tanggung jawab dan bermutu untuk kebaikan dan kemuliaan hidup bersama.

Perubahan pada ketiga mentalitas-budaya inti tersebut bisa menurunkan mentalitas-mentalitas ikutan. Kreativitas dan inovasi, misalnya, akan lahir kalau tersedia ekosistem kreativitas yang merupakan perpaduan dari ketiga unsur tadi. Dalam pandangan Richard Florida (2002), kreativitas = $f(\text{talenta} + \text{toleransi} + \text{teknologi})$. Dengan kata lain, kreativitas merupakan fungsi dari pemupukan talenta (unsur kemandirian), yang didukung oleh adanya ruang toleransi untuk saling mengapresiasi (unsur gotong-royong) dan tersedianya sarana teknologis (peralatan teknis, perangkat informasi, organisasi, fasilitator) yang merupakan unsur pelayanan.

Tricita revolusi mental itu harus menjadi landasan ideologi kerja bagi penyusunan platform dengan segala turunan program dan kebijakannya di semua lini dan sektor pemerintahan. Keberadaan ideologi kerja memberikan framework (panduan dan haluan) yang memudahkan

perumusan prioritas pembangunan, pencaangan program kerja, serta pilihan kebijakan yang diperlukan.

Dalam implementasinya, gerakan revolusi mental ini tidak boleh dilakukan dengan pendekatan vertikal: negara yang ambil inisiatif, negara yang menafsir, negara yang melakukan. Cara terbaik mestinya dilakukan dengan pendekatan horisontal dalam bingkai semangat gorong-royong yang melibatkan partisipasi berbagai agen sosial dari kalangan masyarakat sipil, masyarakat media, pekerja budaya, dunia pendidikan dan dunia usaha.

Dengan prioritas dan pendekatan seperti itu, gerakan revolusi mental secara sinergis dan simultan bisa membawa perubahan mendasar pada struktur mental dan keyakinan bangsa. Dengan perubahan mendasar itu, suatu keputusan dengan mentalitas-budaya dan tantangan dekaden bisa dilakukan sehingga bisa menciptakan suasana kejiwaan yang lebih siap berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Betapapun hal itu merupakan proyek raksasa yang maha berat, tetapi kita tak boleh kehilangan optimisme. Dengan semangat kebersamaan dalam perbedaan, kekuatan cinta mengatasi putus asa. Seperti dingatkan kembali oleh Bung Karno: “Dan kita harus sabar, tak boleh bosan, ulet, terus menjalankan perjuangan, terus tahan menderita. Kita harus jantan! Jangan putus asa, jangan kurang tabah, jangan kurang rajin. Ingat, memproklamasikan bangsa adalah gampang, tetapi menyusun negara, mempertahankan negara buat selama-lamanya itu sukar. Hanya rakyat yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang saya sebutkan tadi—rakyat yang ulet, rakyat yang tidak bosan, rakyat yang tabah, rakyat yang jantan—hanya rakyat yang demikianlah dapat bernegara kekal dan abadi. Siapa yang ingin memiliki mutiara, harus ulet menahan-nahan nafas, dan berani terjun menyelami samudera yang sedalam-dalamnya.” ◦

UDI PANCASILA

CASIL BERJASAM
ANSI NGSAAN

elenga

R
ED

di





Buku 'Revolusi Pancasila' Ditujukan untuk Para Pemimpin

Revolusi mental, menurut Penulis buku 'Revolusi Pancasila', Yudi Latif Ph.D, harus sesuai dengan nilai dasar Pancasila dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Tambahnya, buku 'Revolusi Pancasila' menjadi landasan teori revolusi mental yang dicetuskan oleh Jokowi.

"Saya menggali lagi dari beberapa

referensi ditemukan di situ bahwa revolusi mental itu merupakan salah satu aspek dari 'Revolusi Pancasila'," katanya.

Ia kembali menjelaskan, bahwa buku 'Revolusi Pancasila' ditujukan untuk penyelenggara negara dan pemimpin di berbagai bidang.

"Karena 'Revolusi Pancasila' ini kan berbicara bagaimana nilai-

nilai Pancasila itu harus diturunkan dijabarkan ke dalam berbagai institusi politik, ekonomi, dan lain-lain. Jadi untuk para pengambil keputusan terutama paling penting untuk membaca buku ini," paparnya sambil tersenyum.

"Buku ini semoga bisa menjadi rujukan juga dalam mengulirkan revolusi mental," tandasnya. /Ferro Maulana

Ada Kabut Di Balik Kabut Asap



Sebelum lengser, ada beberapa langkah cepat dilakukan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Salah satunya, sebuah Peraturan Pemerintah penting yang ditandatangani SBY yakni PP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PP Gambut). PP tersebut ditandatangani SBY pada 16 September 2014, bersamaan dengan sidang paripurna DPR RI yang menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) atau Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas untuk menjadi Undang-undang.

Dengan meratifikasi AATHP itu, Indonesia adalah negara terakhir di ASEAN yang meratifikasi setelah 12 tahun Indonesia tegas menolaknya. Ratifikasi AATHP muncul untuk menjawab kasus polusi udara akibat kebakaran hutan di Sumatra (terbanyak di Riau) dan Kalimantan pada 1997-1998 lalu.

Sontak pengusaha, LSM dan beberapa akademisi yang bergerak di sektor kehutanan dan perkebunan saat itu mempertanyakan karena PP Gambut tersebut dianggap tidak sejalan dengan Undang-undang (UU) Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan dianggap bisa mematikan industri Hutan Tanaman Industri dan Kelapa Sawit yang saat ini masih menjadi andalan ekspor non migas Indonesia.

Menteri Kehutanan saat itu, Zulkifli

Hasan mengaku meski sudah disahkan, PP Gambut itu masih terbuka untuk direvisi secara hukum atau di-judicial review-kan.

Sepuluh hari pasca ratifikasi AATHP dan pemberlakuan PP Gambut tepatnya 26 September 2014, empat raksasa (konglomerat) perusahaan sawit Indonesia yang proyeknya tersebar di Provinsi Riau, Kalimantan dan Papua bertemu dalam sebuah acara penting yakni "United Nations Climate Summit Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN Indonesia)". Empat perusahaan itu, Golden Agri Resources, Wilmar, Cargill dan Asian Agri bersama Kadin Indonesia menandatangani kesepakatan bersama yang disebut "Indonesia Palm Oil Pledge".

Inti dari kesepakatan itu adalah komitmen dari produsen minyak sawit terkemuka di Indonesia untuk memutus keterkaitan antara produksi minyak sawit dan penebangan dan pembakaran hutan (deforestasi). Ikrar ini juga memuat sasaran berkelanjutan industri minyak sawit Indonesia termasuk dengan bekerja bersama Pemerintah Republik Indonesia dalam reformasi kebijakan untuk mempromosikan produksi minyak sawit yang berkelanjutan, tidak menanam di lahan kaya karbon (high carbon stock land) dan lahan gambut, dan memenuhi komitmen untuk mengimplementasikan standar-standar ini kepada supplier atau pihak ketiga. Ikrar ini tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga pada operasi perusahaan-perusahaan tersebut di seluruh dunia.

Saat itu, Presiden SBY, Menko Chairul Tanjung, Menko Agung Laksono, Menko Djoko Suyanto, beberapa Menteri kabinet, beberapa pengusaha Indonesia dan Amerika Serikat menyaksikan secara langsung penandatanganan komitmen itu. Ini salah satu peristiwa penting di akhir kekuasaan SBY.

Yang menarik, seminggu pascapenandatanganan itu, tepatnya pada 3 Oktober 2014, Kementerian Pertanian mengumumkan bahwa bantuan hibah turun dari UNDP sebesar USD15,5 juta untuk mendorong program Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Kementerian Pertanian pada hari itu juga (3 Oktober 2014) meresmikan pencahangan platform nasional untuk program tersebut yang akan dilakukan di Riau, Kalimantan dan Papua.

Inti dari ISPO ini adalah mendorong ribuan petani yang tanahnya terbatas untuk bisa menanam kelapa sawit di bawah binaan beberapa perusahaan sawit besar. "ISPO is rather like a driving license for palm oil farmers in Indonesia. By requiring all farmers to meet minimum sustainability requirements, the government is actually committing to formalize palm oil smallholders, and provide vital assistance such as land titles and capacity building. This is long overdue and will allow Indonesia not only to improve farming practices and the economic outlook from palm oil, but also protect the country's environment and forests," kata Tomoyuki Uno, Asia Manager for UNDP's Green Commodities Programme di laman UNDP.org.

Di hari yang sama juga, AFP (3 Oktober 2014) menurunkan sebuah berita bertajuk "US reduces Indonesian debt in exchange for wildlife protection". Dalam badan berita itu ditulis: "The United States has struck a deal to reduce Indonesia's debts in exchange for Jakarta pledging about USD12 million for programmes to protect endangered species and their habitats on Sumatra island, conservationists said Friday".... "The United States is proud to partner with the government of Indonesia and the NGO sector to help protect and preserve the diverse wildlife that exists on Sumatra," kata Kristen Bauer, charge d'affaires di Kedutaan AS di Jakarta saat itu.

Sangat keras diduga bahwa ada rantai kait kuat yang menghubungkan kepentingan asing di industri Sawit Indonesia pada peristiwa ditandatanganinya RPP Gambut, ratifikasi AATHP, komitmen Indonesia Palm Oil Pledge, program Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sampai

dengan kucuran dana dalam skala besar untuk penguatan LSM Lingkungan.

Rusli Tan, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) sempat mengatakan bahwa PP Gambut yang diteken pada detik-detik Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berakhir berbau campur tangan asing. “Asing selalu coba hambat sana dan hambat sini dengan berbagai isu lingkungan untuk menjadikan industri pulp dan kertas serta sawit sulit berkembang,” seperti dikutip Kantor Berita Antara, Rabu 21 Januari 2015 lalu.

Setahun Kemudian...

Peristiwa penting September tahun lalu itu terulang lagi pada bulan September tahun ini. Beberapa media dan LSM ramai-ramai melaporkan beberapa kebakaran hutan mulai terjadi. Puluhan demo menekan Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan masalah ini.

Data terakhir, sekitar Rp500 miliar sudah dihabiskan negara dan mungkin akan bertambah lagi hanya untuk mengatasi kebakaran lahan dan hutan di Sumatera Kalimantan dan beberapa titik yang tersebar di pulau lain. Dan negara tetangga siap mengajukan gugatan hukum ketika asap kebakaran tersebut ternyata mengganggu juga negaranya. Ya ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) tahun lalu itu membuat Indonesia tidak bisa berkutik lagi jika asap kebakaran sampai ke Singapura misalnya.

Kepolisian sudah mengumumkan beberapa perusahaan besar yang bergerak di industri sawit/HTI dan perusahaan yang terafiliasi dengan perusahaan besar itu yang diduga kuat menjadi penyebab kebakaran. Tapi kepolisian harus paham juga bahwa kebakaran itu ternyata disumbang juga oleh kebijakan pemerintah yang mengizinkan ratusan bahkan ribuan petani kecil membakar lahan sempitnya untuk membuka lahan sawit dalam kerangka mendorong program Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Itu belum yang diakibatkan karena kemarau panjang. Dan yang paling menyedihkan dada kita adalah dugaan kuat ada kelompok kepentingan tertentu yang memang sengaja membakar lahan-lahan yang ada. Ini sudah keterlaluan.

Lalu, Mengapa Kebakaran Hutan dan Kabut Asap yang Dulu Hanya Menjadi Isu Nasional Sekarang Menjadi Isu Geopolitik Penting?

Jawabannya, salah satunya adalah karena Indonesia dan Malaysia sudah mulai sepakat untuk membentuk sebuah

dewan sawit yang sudah direncanakan sejak 2006 lalu. Baru pada tahun ini kedua negara sepakat untuk membentuk “Dewan Negara Penghasil Kelapa Sawit (C Pop/Council of Palm Oil Producing Countries)”.

“Karena kita tahu 85 persen produksi minyak kelapa sawit (global) ada di Indonesia dan Malaysia,” kata Jokowi setelah menerima Perdana Menteri Malaysia Najib Razak di Istana Bogor, pada Minggu, 11 Agustus 2015 lalu.

Saat itu Jokowi menjelaskan dengan kekuatan pasar global sawit yang dimiliki Indonesia dan Malaysia, dewan itu akan menentukan sendiri standar minyak sawit global baru. Maklum, sampai saat ini standar minyak sawit global banyak dipengaruhi oleh kepentingan beberapa perusahaan multinasional dibalik Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang menentukan standar berdasarkan kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional saja.

Rencananya, kedua negara juga akan membangun zona hijau ekonomi yang juga akan mempromosikan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan (biofuel).

Data yang dimiliki Aktual, produk turunan dari industri kelapa sawit global mulai meningkat tajam sejak pertumbuhan permintaan global terhadap biofuel pada 2011 lalu. Sekadar catatan, produk turunan dari kelapa sawit tak hanya untuk bahan dasar produk kosmetik, sabun, plastik, karet, pelumas detergen cair, atau shampoo. Tapi sudah menjadi bahan dasar penting biofuel, pengganti bahan bakar minyak. Bahkan untuk bahan dasar pembangkit tenaga listrik.

Soal tersebut, masyarakat belum banyak yang paham. Bahwa di negara seperti AS dan Eropa, biofuel dihasilkan dari kedelai, jagung, bunga matahari sampai minyak daur ulang. Menurut data, produktivitas biofuel per hektar sawit Indonesia dibandingkan kedelai AS saja bisa mencapai 9-10 kali lipat untuk luas lahan yang sama. Intinya cost produksinya jauh lebih murah dengan menggunakan sawit dibandingkan dengan bahan lainnya.

Apalagi ketika terjadi defisit minyak nabati global pada 2013 lalu yang mencapai 7 juta ton per tahun. Dengan total luas lahan kedelai dunia yang saat ini mencapai 150 juta ha dibanding lahan sawit dunia yang baru 20 juta ha —sekitar 9 juta ha ada di Indonesia— sudah jelas industri sawit Indonesia sudah diprediksi akan mampu menggeser dominasi AS dan Eropa dalam menghasilkan minyak nabati juga. Ini yang membuat AS dan Uni Eropa deg-degan.

Sekadar informasi, Uni Eropa dan

Amerika Serikat sudah menargetkan biofuel menjadi energi yang paling penting untuk mengganti minyak dan gas sampai 10 tahun ke depan. Biofuel akan dijadikan bahan bakar untuk sektor transportasi agar emisi gas karbon turun sampai 20%. Uni Eropa bahkan sudah menargetkan bahwa pada 2050 nanti, 40% biofuel harus digunakan sebagai campuran bahan bakar pesawat terbang. Saat ini, International Air Transport Association (IATA) sudah menetapkan target penggunaan 6% biofuel sebagai campuran bahan bakar pesawat terbang sampai 2020 nanti.

Jadi, cara paling mudah untuk agar industri sawit Indonesia tidak besar dan menguasai pasar global adalah dengan menyerang industri sawit lewat isu-isu lingkungan, isu industri sawit berkelanjutan, kesepakatan bilateral sampai tekanan akibat disetujuinya pinjaman dari negara asing. Dan langkah terakhir, kapital asing harus mampu menguasai industri sawit Indonesia agar merekalah yang menjadi penguasa industri sawit global. Indonesia harus ditempatkan sebagai buruh penghasil bahan mentah sawit saja.

Jadi, ini adalah perang sesungguhnya yang terjadi dibalik kabut asap. Kunci yang harus dipegang teguh oleh pemerintah adalah Industri Sawit Indonesia harus menjadi kekuatan Indonesia menghadapi tantangan global dengan cara meningkatkan nilai tambah bahan baku kelapa sawit menjadi produk olahan.

Indonesia jangan lagi ekspor bahan mentah sawit. Indonesia harus bisa meningkatkan nilai tambahnya dengan menjualnya dalam bentuk lemak alkohol (fatty alcohol), surfactant, soap noodle, glycerine atau yang lainnya dan sekaligus menjadi bahan biofuel. Bukan saatnya lagi menggenjot produksi kelapa sawit besar-besaran dengan membuka lahan-lahan baru lagi di Riau tapi optimalisasi hasil yang ada. Untuk itu, harus dikembangkan industri hilir kelapa sawit yang kuat di Riau, Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Meski langkah ini pasti mendapat ganjilan dari banyak kepentingan.

Sebenarnya pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan Jokowi-JK bukan memadamkan api dan menghilangkan kabut asap tapi memadamkan kabut kepentingan besar dibalik kebakaran lahan dan hutan kita agar Indonesia tetap berdaulat di industri sawit.

Semoga rezim ini tidak menggadaikan industri penting ini ke tangan asing.  Faizal Rizki Arief



Rupiah stabil dan berdaulat adalah harapan kita semua. Meski demikian, kenyataan tak selalu berjalan seiring dengan harapan.

Dengan sistem nilai tukar mengambang bebas, nilai tukar Rupiah ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran. Ini artinya, apabila permintaan terhadap dolar AS lebih tinggi, secara alamiah dolar AS akan menguat. Kalau kita ingin menjadikan Rupiah lebih stabil dan menguat, jawaban sebenarnya sederhana, yaitu kurangi permintaan dolar, tingkatkan permintaan atau penggunaan Rupiah.

Namun masalahnya, tentu tak sesederhana itu. Sejak 2011, kondisi di pasar valuta asing (valas) kita diwarnai oleh lebih tingginya permintaan valas, terutama dolar AS, daripada pasokannya. Tingginya permintaan Dolar AS itu didasari oleh beberapa alasan, antara lain untuk kebutuhan impor, pembayaran utang luar negeri dan penjualan barang jasa dalam satuan valuta asing.

Kondisi ekonomi global saat ini juga memberi pengaruh. Rencana kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed, telah mengakibatkan dolar AS menguat terhadap berbagai mata uang lain di dunia, termasuk Rupiah.

Di sisi lain, tahun 2005, utang luar negeri atau korporasi atau swasta berjumlah sekitar 80 miliar dolar AS. Di tahun 2015,

jumlahnya meningkat hingga mencapai sekitar 160 miliar dolar AS. Selain itu, rasio pembayaran utang luar negeri swasta terhadap pendapatan ekspor, atau yang dikenal dengan istilah Debt Service Ratio (DSR), juga meningkat dari sekitar 15 persen di tahun 2007 menjadi sekitar 54 persen di tahun 2015.

Menyikapi hal tersebut, Bank Indonesia telah menempuh beberapa kebijakan, antara lain, upaya pendalaman pasar keuangan, agar pelaku pasar memiliki lebih banyak pilihan instrumen dan kemudahan dalam bertransaksi. Bank Indonesia juga melakukan monitoring yang ketat terhadap utang luar negeri, khususnya di sektor korporasi. Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Nomor 16/20/2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri yang mencakup tiga hal, yakni rasio lindung nilai, rasio likuiditas dan peringkat utang.

Simbol kedaulatan

Selain kedua faktor di atas, secara geoekonomi, kita juga melihat kecenderungan meningkatnya pemakaian mata uang asing, khususnya dolar AS, dalam berbagai transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam praktik sehari-hari, masih banyak masyarakat Indonesia yang enggan menggunakan Rupiah dan cenderung memilih menggunakan mata uang asing.

KEDAULATAN RUPIAH MEMPERSATUKAN 34 PROVINSI DI INDONESIA



Transaksi mata uang asing di wilayah NKRI yang dilakukan antar penduduk Indonesia jumlahnya cukup tinggi. Bayangkan, angkanya mencapai 7,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp78 triliun setiap bulan. Hal ini berarti sekitar Rp936 triliun per tahun.

Tingginya transaksi dalam dolar tersebut telah merambah ke segala sektor ekonomi, mulai dari sektor migas, pelabuhan, tekstil, manufaktur hingga perdagangan.

Fenomena penggunaan mata uang asing di wilayah NKRI tak bisa dipandang sebagai konsekuensi dari liberalisasi, namun dapat dilihat sebagai bentuk 'ancaman' atau *soft invasion* terhadap kedaulatan politik dan ekonomi suatu Negara.

Pengalaman beberapa negara di Amerika Latin, Karibia dan Pasifik, membuktikan bahwa sikap permisif pada penggunaan mata uang asing di dalam negeri pada akhirnya akan memperlemah perekonomian nasional dan menimbulkan ketidakpastian. Kita juga pernah memiliki pengalaman pahit saat lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI. Salah satu alasan yang muncul pada waktu itu adalah karena Rupiah tidak lagi digunakan untuk bertransaksi di sana.

Untuk menghindari terjadinya hal yang tidak kita inginkan tersebut, masyarakat perlu mendukung penggunaan mata uang Rupiah untuk bertransaksi di wilayah NKRI.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Mata Uang No 7 tahun 2011, dan selanjutnya, Bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI.

Menjadikan Rupiah sebagai mata uang yang stabil dan berdaulat memang bukan langkah mudah. Tekanan terhadap Rupiah ditentukan oleh banyak hal. Langkah meningkatkan produktivitas ekonomi dan mengatasi defisit ekspor-impor barang dan jasa, tidak dapat ditawar lagi.

Namun, di sisi lain, upaya menjadikan Rupiah berdaulat di negeri sendiri juga mutlak perlu didukung. Mata Uang Rupiah adalah salah satu simbol kedaulatan Negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia.



Bencana Buatan Manusia



Sudah lebih dari tiga perempat wilayah Indonesia tertutup kabut asap. Dari satelit, sebagian wilayah Indonesia seperti sudah hilang.

Itu disampaikan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, dalam keterangan persnya beberapa waktu lalu. Dia menjelaskan hanya ada 7 wilayah yang tidak tertutup asap yakni Jawa Tengah, DIY, sebagian Jawa Timur, NTT, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan bagian utara Papua. Sisanya selain wilayah yang disebut sudah terpapar kabut asap.

Selain itu pasokan asap dari *hotspot* juga masih besar. Berdasarkan pantauan satelit Terra dan Aqua hingga berita ini diturunkan ada 1.187 *hotspot* dan bisa bertambah lagi jumlahnya. Tak hanya itu, kualitas udara (PM10) di wilayah Sumatera dan Kalimantan juga terpantau di level tidak sehat hingga bahaya.

Ada pun angka kualitas udara di wilayah Sumatera dan Kalimantan juga masih berbahaya bagi kesehatan, seperti Pekanbaru 570 di level Berbahaya, Jambi 518 Berbahaya,

Palembang 325 Sangat Tidak Sehat, Pontianak 169 Tidak Sehat, Banjarbaru 73 Sedang, Samarinda 147 Sedang, dan Palangkaraya 1.511 Berbahaya.

Sementara itu, operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan masih terus dilakukan oleh tim gabungan. "Operasi pemadaman melalui udara seperti menggunakan bom air terus dilakukan, selain itu operasi pemadaman melalui darat juga terus dilakukan," katanya.

Dia melanjutkan bencana asap dari kebakaran hutan dan lahan



Sejumlah pekerja memadamkan lahan yang terbakar di Desa Sungai Merang, Bayung Lincir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Sabtu (10/10). Lokasi lahan yang terbakar di areal konsesi PT Rimba Hutan Mas (RHM) itu seluas 6.000 hektar.

menimbulkan asap tebal berbulan-bulan di Sumatera, belum dianggap sebagai masalah yang serius oleh pemerintah.

Kepala Divisi Kampanye Walhi Nur Hidayati mengatakan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah terjadi selama 18 tahun. Sejak pertengahan tahun 1990-an, perusakan hutan secara masif dilakukan demi membuka lahan perkebunan.

Dari catatan Walhi ketika era Presiden Soeharto terdapat 1 juta hektar hutan dihancurkan untuk proyek persawahan. Sedangkan hutan gambut digunduli lalu dibuat kanal yang mengakibatkan gambut kering. Sebab, tanaman komoditas seperti sawit tidak bisa ditanam di lahan yang basah. Jika dihitung, kanal itu totalnya hingga 2 juta kilometer dari seluruh Indonesia.

“Praktik itu berlanjut ketika pemerintahan pasca- reformasi. Praktik pembakaran lahan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa perkebunan untuk menekan biaya,” ucapnya.

Lalu Bagaimana dengan Penindakan Hukum Bagi Pembakar Lahan Ini?

Hingga saat ini pemerintah masih lembek terhadap para korporasi pembakar, dan hanya berani menyikat para operator pembakar lahan yang itu hanya warga biasa.

Seperti di wilayah Provinsi Sumatera Selatan masih diselimuti kabut asap akibat dampak kebakaran hutan dan lahan sudah bisa dideteksi sebelum terjadinya pembakaran ini.

Polisi pun menyebutkan bahwa peristiwa kebakaran di Sumsel adalah peristiwa rutin dan sudah berlangsung sejak 17 tahun silam.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol R Djarod P.H Madyo Putro menyatakan dari data yang ada, kebakaran ini sebetulnya sudah sejak

17 tahun lalu, setiap tahun selalu ada.

“Sudah kita inventarisir sejak 17 tahun lalu ada kebakaran-kebakaran pada saat musim kemarau,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Djarod juga menyebutkan polisi sudah melakukan langkah-langkah antisipasi sejak bulan April lalu berupa maklumat Kapolda tentang larangan pembakaran, informasi sanksi-sanksi baik kepada masyarakat maupun kepada badan usaha atau korporasi yang ada di wilayah Sumsel.

Meskipun demikian aksi pembakaran hutan tetap terjadi. Kendala apa? Dengan tegas Djarod menyebutkan ada dua kendala utama dalam mengatasi kebakaran di Sumsel. Pertama, soal kebiasaan masyarakat pada musim kemarau untuk membuka lahan dengan melakukan pembakaran lahan perkebunan karena dianggap cepat, murah, efektif, dan efisien.

Kemudian kendala kedua, kebakaran itu kebanyakan terjadi di lahan-lahan gambut yang cukup jauh dari pemukiman dan tidak terjangkau oleh alat transportasi.

Sementara itu di Polda Sumsel sendiri ada 35 laporan karhutla. “15 di antaranya merupakan korporasi yang telah masuk tahap penyidikan. Selain itu, 6 korporasi penanganannya dilakukan Bareskrim Polri,” ujarnya.

Keraguan terhadap penegakan hukum juga untuk menindak tegas para pembakar hutan juga disampaikan aktivis peduli lingkungan. Wawan Some, aktivis Telapak mengatakan upaya penegakan hukum terhadap sejumlah perusahaan yang terlibat pembakaran hutan diragukan efektivitasnya oleh para pegiat lingkungan selama upaya itu bersifat tebang pilih.

“Kelemahan aparat hukum dalam menangani isu lingkungan serta sanksi hukuman yang ringan juga dirasakan sebagai penyebab berulangnya kasus pembakaran hutan dari tahun ketahun,” ujarnya.

Kabut Asap Renggut Nyawa dan Pendidikan Warga Indonesia

Pergerakan kasus penderita ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) di daerah terkena kabut asap kebakaran

(karhutla) adalah bencana buatan manusia. Akibat ulah manusia karena 99 persen penyebab karhutla adalah disengaja.

“Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Sekarang saatnya kita tidak saling menyalahkan, tapi bagaimana mengatasinya secara cepat. Dengan skala kebakaran yang demikian luas tidak mungkin 1-2 minggu kedepan akan padam. Tapi semua ikhtiar kita lakukan bersama,” tutupnya.

Sementara itu, kebakaran lahan dan hutan yang terjadi sekarang dan

hutan yang meningkat tajam.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto di Jakarta, beberapa waktu lalu. Dia menjelaskan beberapa data terakhir tentang kasus ISPA sejak Agustus di beberapa kawasan yang terpapar kabut asap.

Untuk Kalimantan Tengah kasus ISPA 52.213, Riau: 65.232, Jambi: 90.747 sejak Agustus, Sumatera Selatan: 101.332 sejak 15 Agustus hingga sekarang, Kalimantan Barat: 43.477, dan Kalimantan Selatan 97.430 kasus.

Sementara itu Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan 10 nyawa melayang akibat kabut asap di Sumatera dan Kalimantan.

Selain itu, bencana asap juga telah menyebabkan 503.874 jiwa sakit ISPA di enam provinsi sejak 1 Juli-25 Oktober 2015.

“Rinciannya, 80.263 orang di Riau, 129.229 orang di Jambi, 101.333 orang di Sumatera Selatan, 43.477 orang di Kalimantan Barat, 52.142 orang di Kalimantan Tengah, dan 97.430 di Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Seorang balita Farah Nazwa menjalani perawatan medis karena menderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di RSUD Cut Mutia, Buket Rata, Lhoksemawe, Provinsi Aceh, Senin (26/10).



Kemudian lebih dari 43 juta jiwa penduduk terpapar oleh asap. Data ini hanya dihitung di Sumatera dan Kalimantan. Data ini dianalisis dari peta sebaran asap dengan peta jumlah penduduk.

Mendikbud Anies Baswedan mengungkapkan bahwa ada sekitar 4 juta siswa yang kegiatan belajarnya terganggu. “Kami tengah mempersiapkan sekolah terdampak dari SD, SMP, SMA, SMK serta SLB diperkirakan sekitar 187.217 sekolah dan ganrincian total sekitar 4.437.371 siswa yang terkena dampak asap, itu pun belum termasuk data dari PAUD dan madrasah,” kata Anies usai rapat koordinasi di kantor Kemenko

Polhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (23/10).

Waspada, Asap Mulai Masuk Pulau Jawa!

Penyebaran asap makin mengkhawatirkan. Sebarannya kini tak hanya dirasakan masyarakat Sumatera dan Kalimantan. Perkembangan terakhir, Sabtu (24/10) asap sudah mulai masuk Pulau Jawa. Kehadiran asap itu dirasakan sebagian masyarakat Jakarta dan sepanjang pantai utara Pulau Jawa dalam dua hari terakhir.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Andi Eka Sakya, asap terbawa angin di lapisan atas. Angin itu berhembus ke arah selatan. Secara geografis, Jawa berada di selatan Kalimantan yang sedang terpapar asap tebal. “Dua hari ini Jakarta diselimuti asap. Terasa berkabut. Matahari pagi pun tidak terlalu cerah,” paparnya.

Sementara itu lalu lintas kapal penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni atau sebaliknya mulai terganggu akibat kabut asap. Gangguan kabut asap bagi pelayaran ini mulai dirasakan dua hari terakhir.

“Hari ini kita sudah mengeluarkan surat (edaran) kepada seluruh nakhoda untuk kapal-kapal penyeberangan yang ada disini. Manakala mewaspadai jarak pandang yang mulai terganggu,” kata General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Utama Merak, Yanus Lentanga, Senin (26/10). a Sukardjito

BUMI HANGUS HUTAN INDONESIA



10 Korban tewas akibat kabut asap Sumatera dan Kalimantan, baik karena dampak langsung maupun tidak langsung.



43

Juta jiwa lebih penduduk terpapar asap Sumatera dan Kalimantan, data dianalisis dari peta sebaran asap dengan peta jumlah penduduk.



99

Persen penyebab terbakarnya hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap karena disengaja atau ulah manusia, bahkan hutan Suaka Margasatwa dan Taman Nasional



Pembakaran hutan dan lahan sudah terjadi selama **18 tahun** sejak pertengahan tahun 90-an

1 Juta Ha

Kawasan hutan dihancurkan untuk proyek persawahan



1.800

Titik api terpantau melalui Satelit Terra dan Aqua di daerah Sumatera dan Kalimantan serta dapat bertambah seiring kondisi



4 Juta siswa terganggu kegiatan belajar di daerah terpapar asap. Mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Paud, Madrasah. (187.217 Sekolah)



1.600

Lebih penerbangan dibatalkan hingga 25 Okt 2015

Potensi kerugian Maskapai penerbangan mencapai **US\$ 8 juta** atau **Rp 109 miliar**



Indonesia menjadi **sumber gas rumah kaca terbesar kedua di dunia** setelah Cina. Kajian World Resources Institute, emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah melampaui rata-rata emisi karbon AS.



Rp. 200 Triliun

Kerugian ekonomi yang dialami negara-negara terdampak asap.

Indonesia • US\$ 9 Miliar
Malaysia • US\$ 2 Miliar
Singapura • US\$ 2 Miliar

Ditambah dengan berbagai faktor seperti angka inflasi dan lain-lain



Rp. 20 Triliun kerugian diderita hanya dari Provinsi Riau



Rp.620 miliar

Total biaya yang telah dikeluarkan untuk pemadaman api di 6 provinsi. **Rp.650** miliar

Akan ditambah untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Provinsi

Korban ISPA

Kualitas Udara

Riau	Jambi	Sumsel	Kalbar	Kalteng	Kalsel
80.263 jiwa	129.229 jiwa	101.333 jiwa	43.477 jiwa	52.142 jiwa	97.430 jiwa
Berbahaya	Berbahaya	Sangat Tidak Sehat	Tidak Sehat	Berbahaya	Sedang
570	518	325	169	1.511	73

Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) adalah laporan kualitas udara kepada masyarakat untuk menerangkan seberapa bersih atau tercemarnya kualitas udara kita dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kita setelah menghirup udara tersebut selama beberapa jam atau hari. Penetapan ISPU ini mempertimbangkan tingkat mutu udara terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, bangunan, dan nilai estetika.

ISPU

LEVEL

0 - 50	Baik
51 - 100	Sedang
101 - 199	Tidak Sehat
200 - 299	Sangat Tidak Sehat
300 - 500	Berbahaya



"Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Sekarang saatnya kita tidak saling menyalahkan, tapi bagaimana mengatasinya secara cepat"

- Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho -

Ratusan Warga dan Pejabat Pekanbaru Lakukan Shalat Istisqa

Ratusan warga dan kalangan pejabat Pekanbaru, Provinsi Riau, kembali menggelar Shalat Istisqa di lapangan Batrai R, Jalan Imam Munandar guna meminta kemurahan Allah menurunkan hujan untuk menanggulangi kebakaran hutan serta terisnya kembali ketersediaan air untuk listrik dan keperluan lainnya.

“Semoga Allah SWT memberikan ampun atas diselenggarakannya shalat istisqa ini,” ungkap Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi di Pekanbaru, Rabu (28/10), usai shalat istisqa bersama warga dan Komandan Batalion Batrai R Pekanbaru dan Pengurus Rumah Zakat.

Ayat menyebutkan, imbauan shalat istisqa ini terus digaungkan pemerintah kota belakangan ini kepada warga, karena memang hingga kini kabut asap yang menyelimuti Pekanbaru, dan wilayah provinsi lainnya masih belum reda.

Ayat Cahyadi juga mengatakan, atas nama Pemko mengucapkan terima kasih kepada warga yang ikut shalat istisqa bersama.

Ia mengatakan, usaha manusia harus dibarengi dengan ikhtiar samawi, untuk memohon pertolongan, dengan diturunkannya hujan sehingga asap yang menyelimuti Pekanbaru bisa segera teratasi.

Menurut Ayat Cahyadi sebetulnya Pemerintah pusat, Provinsi Riau, Kabupaten/Kota sudah berusaha semaksimal mungkin bersinergi memadamkan api guna mengatasi kabut asap.

Tetapi hasilnya belum juga bisa dirasakan, kualitas udara berubah-ubah kadang tidak sehat hingga berbahaya.

Penyiraman dan hujan buatan yang dilakukan selama ini terbatas hasilnya. Hanya hujan alamiah merata yang mampu menghentikan bahkan memadamkan titik api.

“Kenapa shalat istisqa terus menerus kita minta dilakukan, karena



turunnya hujan kemaren di Kota Pekanbaru, belum merata,” bebernnya.

Apalagi analisa Ayat, saat ini titik api itu bukan di Pekanbaru, namun sumber asap itu berada di provinsi tetangga, seperti Jambi, Palembang, Pulau Kalimantan, Sulawesi, maupun Papua.

Sehingga lanjutnya, apapun yang dilakukan rumah zakat ini dengan menggelar shalat istisqa diharapkan bisa meningkatkan curah hujan.

“Dengan terus memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Bukan hanya di Pekanbaru tetapi seluruh titik api diseluruh Indonesia padam. Sehingga polusi asap dan kebakaran lahan bisa terselesaikan,” harapnya.

Masih sebut Ayat, dampak kebakaran lahan dan hutan, telah membuat Pekanbaru diselimuti kabut asap pekat.

“Kondisi tahun ini memang luar biasa, dan kami berterima kasih kepada panglima ABRI yang sudah mengirimkan dua kapal,” ujar Ayat.

Mayarakat Kota Pekanbaru sudah dirugikan, yang terparah sekitar, 6.000an warga terserang Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA).

Belum lagi dampak ekonomi, untuk itu kita mengingatkan lagi tidak ada daya dan kekuatan karena kita sudah berupaya semaksimal mungkin, dan sudah bekerja meminta bantuan pada negara tetangga namun asap belum juga tuntas, dan kita sebagai umatnya untuk selalu minta dan memohon pada Allah SWT semoga kabut asap ini hilang. /Zaenal Arifin-Ant

Jalan Layang Pluit, Bela Podomoro Ahok Remehkan Penolakan Warga

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akui meminta pengembang PT Agung Podomoro untuk biayai pembangunan jalan layang non tol (JLNT) di Pluit Barat pakai dana CSR.

Biaya untuk pembangunan jalan non tol berbentuk layang itu, diakuinya, memang besar. Bisa tiga hingga empat kali dibanding jalan biasa. Meski berbiaya besar, pihak Agung Podomoro ternyata tidak keberatan membiayai jalan yang diklaim untuk mengurangi kemacetan di kawasan Pluit tersebut.

Ahok menilai Agung Podomoro lakukan hal positif dengan gunakan dana CSR membangun jalan. Sebab, kata Ahok, dana Pemprov DKI untuk membangun jalan layang terbatas.

Mengenai alasan jalan layang itu dibuat, Ahok juga punya penjelasan. Kata dia, kawasan Pluit ke depannya diperkirakan bakal berkembang pesat. Sehingga jika tidak buru-buru dibuat jalan, kemacetan di sana akan semakin parah.

Untuk alasan mengapa dibangun jalan layang dan bukan jalan biasa, ini penjelasan Ahok. Kata dia, di daerah itu banyak pemukiman padat penduduk, sehingga tidak bisa dibuat jalan biasa.

Jalan layang itu nantinya akan menghubungkan kawasan Pluit dengan akses tol Bandara Soekarno – Hatta dan Tol Tanjung Priok.

Dia juga menepis kekhawatiran proyek itu bakal menimbulkan banjir. Kata Ahok, meski jalan itu dibangun pengembang tetapi pengawasan tetap Pemprov DKI yang lakukan. “Jadi dampak lingkungannya sudah benar-benar diperhitungkan,” begitu kata dia.

Dengan alasan-alasan itu, Ahok mengaku heran ada warga Pluit yang menolak. Bahkan Ahok menilai demo warga sebagai hal yang aneh.

“Jalan layang ini dibangun untuk mengurangi kemacetan di kawasan Pluit dan sekitarnya sehingga tidak

mungkin warga menolaknya. Jadi yang kemarin demo mengaku warga Pluit. Warga Pluit yang mana ?” ucap dia setengah menuding, di Jakarta, Senin (26/10).

Diketahui, Sabtu (24/10), ratusan warga Pluit berunjukrasa menolak pembangunan jalan layang Pluit yang digarap Agung Podomoro. Demo digelar di pertigaan Jalan Pluit Barat dan Pluit Utara, Pluit, Jakarta Utara.

Mereka menganggap pembangunan jalan layang itu hanya menguntungkan pengembang Agung Podomoro



dan penghuni perumahan elit Green Bay dan Pluit City saja. Warga menganggap jalan layang itu tidak ada kaitan dan untungnya dengan mereka.

“Tidak ada manfaatnya untuk warga sekitar,” ujar salah seorang pengunjukrasa, Sabtu (24/10).

Warga juga menganggap pembangunan jalan layang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang dan wilayah Pemprov DKI. Parahnya lagi, warga juga mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan dan sosialisasi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) proyek tersebut.

Klaim dari anak perusahaan Agung Podomoro yakni PT Muara Wisesa bahwa sudah ada sosialisasi ke warga juga

dibantah. Karena tidak diwakili warga secara representatif.

Kekhawatiran lainnya, warga menganggap proyek yang menggunakan sebagian besar badan Tanggul Pluit itu rawan membuat tanggul jebol sehingga bisa menyebabkan banjir.

Lagipula, pembangunan di atas tanggul adalah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, khususnya Pasal 15. Belum lagi dengan gangguan polusi terhadap warga selama proyek itu dikerjakan pengembang.

“Tapi seperti biasa, Ahok seperti hanya akan anggap angin lalu pendapat warga dan genjot proyek terus berjalan. Bila perlu tentara pun digunakan bila ada yang menghambat,” ujar seorang warga.

/M Vidia Wirawan

Gelar Sidang Rakyat, Mahasiswa Nilai Pemerintahan Jokowi-JK Gagal

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar Sidang Rakyat di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/10).

Sidang Rakyat ini merupakan pengejawantahan sikap mahasiswa terkait kegagalan satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang telah diumumkan melalui survei BEM-SI 20 Oktober 2015 yang lalu.

Aksi mahasiswa yang diikuti 57 perguruan tinggi ini dimulai dengan *long march* dari Patung Kuda, menuju Istana Negara. Dalam aksi tersbut, sekitar 2000 mahasiswa ini menyatu dengan elemen buruh yang sejak pukul 11.00 WIB telah menggelar aksi di depan Istana.

“Kami datang ke sini dari berbagai penjuru nusantara, untuk menyalurkan Jokowi atas pencapaian-pencapaian pemerintahannya selama satu tahun,” kata Bambang Irawan, Koordinator Pusat BEM-SI di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Disampaikan Presiden Mahasiswa Universitas Lampung ini perwakilan mahasiswa akan diminta



menyampaikan dakwaan kepada Presiden Jokowi di delapan bidang seperti Ekonomi, Kesehatan, Hukum, Energi, Kemaritiman, Lingkungan, dan Pangan.

Dari beberapa dakwaan tersebut, majelis hakim memutuskan terdakwa Presiden Jokowi telah gagal menjalankan pemerintahan Republik Indonesia dalam kurun waktu satu

tahun pemerintahannya.

“Kita menuntut Jokowi-JK merealisasikan dakwaan selambat-lambatnya 100 hari kerja dari sekarang,” pungkas Bambang yang didaulat menjadi hakim ketua didampingi Reido Deskumar (Presma Univ. Andal) serta Andi Aulia Rahman (Ketua BEM UI) sebagai hakim anggota. /Zaenal Arifin

Usianya masih balita, tetapi ia sudah menjejalkan kaki dan menyejajarkan diri dengan orang-orang remaja dan dewasa pada umumnya. Jenius kah balita itu hingga memaksakan diri melepas masa kecil yang sewajarnya membahagiakan.

Sejuta pertanyaan menggelut, bukan hanya dilingkaran sanak-saudaranya tetapi juga semua orang. Tetapi, si balita yang sejak awal dihias cantik nan molek percaya bahwa ia tidak salah asuh apalagi salah jalan.

“Kenapa Nasdem, di bawah usia lima tahun dihadapkan cobaan berat seperti ini? Ini harus menjadi pertanyaan bagi kita semua,” tegas Ketum DPP Nasdem Surya Paloh di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (27/10) pekan lalu.

Di daerah yang mencuatkan nama eks Sekjen Nasdem Patrice Rio Capella dalam pusaran kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial tersebut, bos Media Grup itu tengah mengadakan acara temu kader dan apel siaga pemenangan Pilkada se-Sumut. Acara dihelat di Tiara Convention Center, Medan.

Ia mengungkapkan partainya pada Rabu 11 November 2015 ini memasuki ulang tahunnya yang ke empat. Namun diusianya yang masih balita malah mengalami musibah berat. Beberapa kadernya terjerat kasus dugaan korupsi dan dugaan suap.

“Ini (restorasi) gagasan yang tidak mudah. Kita hadapi tantangan demi tantangan. Kita tidak boleh kalah sedikitpun. Di sisi lain kita manusia biasa yang artinya tidak terlepas dari kesalahan kekhilafan bahkan dosa. Tapi seluruh kader (harus) tetap berdiri tegak.”

Apa yang disampaikan Surya ini sejalan dengan dijratnya dua petinggi partainya, Ketua Mahkamah Partai Nasdem OC Kaligis dan Sekjen Nasdem Patrice Rio Capella. Bahkan, beberapa nama lainnya juga disebut-sebut dalam pusaran kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial di Kejagung dan kasus dugaan suap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka adalah Ketua DPW



Selamat Ulang Tahun Nasdem

Nasdem Sumut yang juga Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nurani dan kakak Surya Paloh yakni Rusli Paloh yang disebut di persidangan meminta sejumlah komitmen *fee* dan penempatan sejumlah pejabat eselon di Pemprov Sumut serta Surya sendiri.

Sepekan sebelumnya, Jumat (23/10), Surya akhirnya diperiksa KPK terkait kasus yang menjerat mantan anak buahnya Rio Capella dan Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho.

Ia datang tiga hari lebih cepat dari jadwal yang diagendakan penyidik KPK. Sesuai jadwal, pemeriksaan sedianya dilakukan pada Senin 26 Oktober, namun Paloh dengan alasan padatnya jadwal mendatangi KPK pada Jumat 23 Oktober malam.

Selama tiga jam ia diperiksa penyidik. Saat datang, ia didampingi Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Hukum, Taufik Bashari, dan beberapa stafnya. Surya mengenakan kemeja

putih dan jas hitam.

Pagi sebelum Surya diperiksa, KPK juga memeriksa Rio. KPK memutuskan menahan Rio setelah mencecarnya terkait kasus yang menjeratnya. Pemeriksaan Rio berlangsung sekitar 9 jam. Baju tahanan KPK berwarna oranye mewarnai penampilannya saat keluar dari Gedung KPK pagi itu. Rio harus menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama.

Rio Capella merupakan tersangka penerima gratifikasi dalam penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, serta penyertaan modal sejumlah badan usaha milik daerah Sumut. Kasusnya tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Sumut dan Kejaksaan Agung.

KPK menjeratnya dari hasil pengembangan kasus yang menjerat Gatot dan istrinya Evy Susanti. Gatot dan Evy diduga sebagai pemberi suap sebesar Rp 200 juta. Rio perimanya. Ia disangkakan Pasal

Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menyampaikan pidato politik pada Temu Kader dan Apel Siaga Pemenangan Pilkada se Sumatera Utara, di Medan, Selasa (27/10).

12 huruf a dan b atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.

“Materi pertanyaan memang seputar Pak Gatot dan Bung Patrice Rio Capella, khususnya pertemuan di DPP Partai NasDem ya, nah ini digali sedemikian rupa dengan se detail-detailnya dan dijawab juga dengan apa yang saya pahami,” kata Surya usai diperiksa.

Pendiri Partai Nasdem menyampaikan seluruhnya soal pertemuannya dengan eks Ketua Mahkamah Partai Nasdem OC Kaligis, Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan Wagub Sumut Tengku Erry Nuradi.

Untuk lebih meyakinkan KPK, ia bahkan menawarkan dilakukannya rekonstruksi soal pertemuan di Kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat. Jika dirasa perlu, rekonstruksi pertemuan yang disebut-sebut berlangsung pada Mei 2015 itu tidak masalah apabila disiarkan langsung melalui televisi nasional.

Rekonstruksi sekaligus untuk mengetahui teknis pertemuan, dari tata letak ruangan, posisi duduk masing-masing yang hadir, siapa yang mulai bicara berikut substansi pembicaraan dan sebagainya.

“Ini penting untuk transparansi. Kalau diperlukan. Kalau tidak ya tidak apa-apa,” jelas Surya.

Beberapa pengamat sebelumnya menyatakan perlunya dilakukan reka- ulang pertemuan di DPP Nasdem. Mudzakkir, pengamat hukum pidana Universitas Islam Indonesia misalnya mengatakan reka-ulang sangat penting dilakukan.

KPK tidak ada jalan lain untuk mengungkap pertemuan tersebut. Terlebih usai pertemuan itu disampaikan Evy, suaminya Gatot terkait kasus dugaan suap dana bansos di Pemprov Sumut tidak lagi dipanggil-panggil Kejaksaan Agung.

“Perlu sekali (direkonstruksi), karena Kantor Nasdem merupakan tempat terjadinya tindak pidana suap. Penegak hukum dalam hal ini KPK, harus mencari bukti-bukti untuk menjerat para pelaku lain,” ucap Mudzakkir.

Sekjen DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Jurham Lambong mengatakan siapapun yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana bansos di Kejagung dan kasus dugaan suap hakim PTUN Medan di KPK harus dilibas.

“Sekarang ini kan terang benderang, ada rekamannya, ada segala macam. Pertanyaannya, apakah itu benar atau tidak. Kita minta penegak hukum obyektif dan tetap memegang etika-etika hukum sehingga bisa memisahkan, menjernihkan mana persoalan hukum mana persoalan politik,” ucap Jurham.

Sementara Ketua DPP Gerindra Habiburrahman menambahkan bahwa pertemuan di DPP Nasdem sudah diakui sendiri oleh Surya Paloh. Rangkaian demi rangkaian juga terungkap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Publik akan berpraduga macam-macam terhadap KPK melakukan rekonstruksi ulang di kantor partai yang mengusung restorasi Indonesia tersebut. Minimal, apabila tidak dilakukan rekonstruksi, apa yang terjadi di Kantor Nasdem dibuka ke publik oleh KPK.

“Itu harus dijelaskan semua. Kalau perlu, di daerah Menteng seputar Kantor DPP NasDem kan rata-rata ada CCTV-nya, rekamannya. Ada itu, dibuka ke publik sehingga jangan katanya-katanya,” jelas Habiburrahman.

Pentingnya rekonstruksi di DPP Nasdem bahkan disampaikan Sekretaris

Fraksi NasDem DPR Syarif Abdullah Alkadrie. Dengan begitu akan terang 'hasil' dari pertemuan tersebut. Bukan apa-apa, ia berkeyakinan pertemuan semata-mata untuk mendamaikan Gatot dengan Erry karena ketidakharmonisan keduanya dalam memimpin Pemprov Sumut. Tidak lebih.

“Kalau mau dikaitkan dulu KPK harus melakukan rekonstruksi dulu, terhadap peristiwa pertemuan itu ke DPP supaya jelas,” tegasnya.

Di saat KPK melengkapi berkas penyidikan kasusnya, Rio mengajukan gugatan praperadilan atas kasus dugaan suap yang menjeratnya. Eks Anggota Komisi III DPR itu mempermasalahkan keabsahan tiga pimpinan sementara KPK yang disebutnya tidak sah.

Maqdir Ismail, kuasa hukum Rio, menyatakan dengan posisi ketiga pimpinan demikian maka tidak menetapkan Rio sebagai tersangka. Ia merujuk Perppu Nomor 1 tahun 2015 tentang pengangkatan pimpinan KPK pengganti yang diharuskan melalui DPR.

“Perppu tersebut menambahkan salah satu pasal, yakni pasal 33 A (UU KPK), yaitu mengenai pengangkatan pimpinan KPK pengganti. Bahwa calon pimpinan KPK harus diangkat berdasarkan persetujuan dari DPR. Ini yang tidak terjadi,” jelasnya, Selasa (27/10) pekan lalu.

Ketiga pimpinan KPK pengganti dimaksud adalah Taufiequrachman Ruki, Johan Budi dan Indriyanto Seno Adji. Rencananya, sidang perdana praperadilan akan digelar Jumat (30/10).

Soemitro-Wahyu Romadhony



Patrice Rio Capella

Belum Ada UU, KMP Tak Tertarik dengan Tax Amnesty

Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih (KMP) Idrus Marham menyebut bahwa pihaknya belum membahas soal Tax Amnesty (pengampunan pajak) yang masuk dalam RAPBN 2016.

Menurut Idrus, pemerintah harus terlebih dahulu menyelesaikan UU Tax Amnesty (sebagai pemasukan negara).

“Sejauh ini belum kita bahas (tax amnesty). Kalau pemerintah membutuhkan dana, harusnya inisiatif buat UU-nya,” kata Idrus kepada Aktual.com, Kamis (29/10).

Diketahui, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan tidak ada niatan dari anggota DPR untuk menunda pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.

Dikatakan Zulkifli, yang ditentang oleh dewan adalah asumsi pemerintah yang menggunakan tax amnesty (pengampunan pajak) sebagai pendapatan negara.

“Kan pemerintah mengajukan, memasukan pendapatan yang diperkirakan kalau UU Tax Amnesty, masuk. Cuma nggak terima dong (DPR). Ya uangnya belum ada, gitu loh,” ucap Zulkifli menjawab pertanyaan aktual.com, di Jakarta, Selasa (27/10).

Ia berpandangan, lantaran pemerintah memasukan asumsi tax amnesty sehingga menimbulkan penolakan, maka terjadi perubahan terhadap postur anggaran yang ada.

/Karel Stefanus Ratulangi



KMP Anggap RAPBN 2016 Terlalu Besar, PMN Harus Dipangkas

Koalisi Merah Putih (KMP) memandang RAPBN 2016 terlalu besar sehingga harus dipangkas. Salah satu cara memangkasnya yakni dengan menghilangkan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Disampaikan Koordinator Pelaksana KMP Idrus Marham, hal itu menjadi keputusan dari rapat yang digelar pimpinan partai yang tergabung di koalisi tersebut, Rabu (28/10) malam.

Kata dia, KMP berpendapat dari 24 penerima PMN hampir semua harus dipangkas. Alasannya, di samping tidak pro rakyat, tahun lalu PMN juga belum semuanya terserap.

“Sehingga sangat tidak logis itu masih dicantumkan (di RAPBN 2016-red),” ujar Sekretaris Jenderal Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie itu saat dihubungi Aktual.com, Kamis (29/10) dinihari.

Tapi, kata Idrus, ada satu PMN yang dianggap KMP masih memungkinkan untuk dikucurkan. “Kecuali satu itu Askrindo (persero). Perhitungannya kalau itu (Askrindo) diberikan PMN 500 miliar itu maka bisa memberikan asuransi Rp5 triliun,” ujar dia.

Berikut rincian PMN Rp39,42 triliun untuk BUMN di RAPBN 2016:

Penerima PMN dalam bentuk tunai:

1. Perum Bulog Rp2 triliun.
2. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Rp500 miliar.

3. PT SMI (Persero) Rp5 triliun.
4. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Rp1 triliun.
5. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Rp1 triliun.
6. PT Hutama Karya (Persero) Rp3 triliun.
7. PT Wijaya Karya Tbk Rp3 triliun.
8. PT Pembangunan Perumahan Tbk Rp2 triliun.
9. PT Angkasa Pura II (Persero) Rp2 triliun.
10. PT Jasa Marga Tbk Rp1,25 triliun.
11. PT PLN (Persero) Rp10 triliun.
12. PT Geo Dipa Energi (Persero) Rp1,16 triliun.
13. PT Krakatau Steel Tbk Rp1,5 triliun.
14. PT Industri Kereta Api (Persero) Rp1 triliun.
15. PT Barata Indonesia (Persero) Rp500 miliar.
16. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp500 miliar.
17. PT Askrindo (Persero) Rp500 miliar.
18. Perum Jamkrindo Rp500 miliar.
19. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Rp500 miliar.

PMN untuk BUMN dalam bentuk nontunai:

20. PT Perikanan Nusantara (Persero) Rp29,4 miliar.
21. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Rp692,5 miliar.
22. Perum Perumnas Rp235,4 miliar.
23. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Rp564,8 miliar.
24. PT Amarta Karya (Persero) Rp32,1 miliar.
25. PT Krakatau Steel Rp956,5 miliar.

/M Vidia Wirawan

ANTARA



171 Anggota DPR Dari 8 Fraksi Setuju Bentuk Pansus Karlahut

Inisiator Panitia Khusus (Pansus) Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) mendatangi pimpinan DPR, Rabu (28/10). Sebanyak 171 nama anggota DPR dari delapan fraksi menyetujui pembentukan Pansus yang diserahkan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron kepada Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

“Sekarang ini baru 171 tanda tangan yang terkumpul dan saat ini formulirnya masih beredar. Sehingga, dari 8 fraksi dengan minus fraksi Hanura dan Nasdem,” kata Herman, di ruang kerja Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (28/10).

Ketika ditanyakan, bagaimana dengan kedua fraksi yang tidak setuju pembentukan Pansus tersebut, apakah tidak diajak kembali untuk berpikir kepentingan rakyat agar diutamakan? Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto menilai jika kedua fraksi bukan dalam posisi tidak setuju.

“Bukan tidak setuju, tetapi kita kembali lagi pansus usulan DPR itu dilaksanakan atas perintah UU, apakah ada yang tidak menyetujui atau tidak diputuskan di paripurna, dan masih ada langkah *voting*, selama ini belum diketuk tentu masih ada kesempatan apakah akan masuk atau tidak,” tandas politikus Demokrat itu. /Wahyu Romadhoni



Mantan Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menyinggung proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinilai tidak tepat untuk direalisasikan.

Pasalnya, pemerintah seakan

Megawati: Apa Benar Kereta Cepat Sudah Jadi Kebutuhan Rakyat?

tidak sensitif terhadap kebutuhan yang diinginkan rakyat.

“Soal kereta cepat itu, apa benar sudah menjadi kebutuhan rakyat, apa sudah terakomodir rakyat di bagian timur,” ucap Megawati saat menjadi *keynote speaker* dalam acara bedah buku ‘Revolusi Pancasila’ karya Yudi Latif, di Gedung JCC, Senayan, Selasa (27/10).

Ketum DPP PDIP itu justru mengusulkan agar proyek kereta api cepat itu tidak dilakukan dan lebih baik pemerintah mengutamakan infrastruktur di daerah timur.

“Jangan dibangun kereta cepat dulu, kasih ke (daerah) timur, mungkin jangan juga kereta cepat, dengan kereta *double track* terlebih dahulu,” tandasnya. /Karel Stefanus Ratulangi

Defisit Rp273 T RAPBN 2016 Bebani Hutang Rp1,3 juta Per Orang

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Heri Gunawan mengatakan usulan RAPBN 2016 yang disodorkan pemerintahan Jokowi sangat fantastis namun tak sesuai kinerjanya. Di mana, dari kinerja pemerintahan Jokowi setahun terakhir masih banyak program-program kerjanya yang tidak mencapai target.

“Anda tahu berapa jumlah APBN tahun 2016? Ribuan triliun. Tepatnya, sekitar Rp1.823 triliun. Itu adalah jumlah yang fantastis. Dan uang yang hampir menembus Rp2.000 triliun itu akan dipegang dan dikelola Pemerintahan Jokowi-Kalla selama 1 tahun ke depan,” ujar Heri di Jakarta, Kamis (29/10).

Dalam APBN, kata Heri, anggaran pendapatan mencapai Rp1.822,5 triliun yang berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.546,7 triliun dan bukan pajak sebesar Rp273,8 triliun.

Di sisi lain, lanjutnya, anggaran belanja sudah mencapai Rp2.095,6 triliun atau naik 6,9 persen dari APBN-P tahun 2015.

“Belanja itu terdiri atas belanja

pemerintah pusat sebesar Rp1.325,6 triliun dan anggaran transfer ke daerah serta dana desa sebesar Rp770,2 triliun. Dengan postur seperti itu, maka APBN 2016 mengalami defisit sebesar Rp273,2 triliun atau sebesar 2,15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit itu naik sebesar Rp50,7 triliun dibandingkan APBN-P tahun 2015,” paparnya

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan postur APBN 2016 malah semakin menyengsarakan rakyat.

Heri mengungkapkan defisit yang besar akan dibiayai dengan utang. Tercatat, imbuahnya, pembiayaan defisit bersumber dari utang sebesar Rp330,9 triliun yang terdiri dari pinjaman Luar Negeri Rp398,2 miliar ditambah Pinjaman Dalam Negeri Rp3,3 triliun dan Surat Berharga Negara Rp327,2 triliun.

“Sudah pasti beban utang itu akan ditanggung hampir seper-empat miliar rakyat Indonesia. Jika dibagi rata, maka setiap rakyat Indonesia menanggung utang sebesar Rp1,3 juta,” pungkasnya. /Wahyu Romadhoni



OLLY DONDOKAMBEY

NAWACITA AKAN WUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI BANGSA

Pikiran-pikiran Soekarno kembali menjadi dasar dan pokok pikiran dalam hal bagaimana membawa bangsa dan negara ini ke depan.

Setelah “terbelenggu” sejak rezim Soeharto sampai Rezim SBY, Trisakti menjadi tulang punggung seluruh program dan kebijakan pemerintah Presiden terpilih Joko Widodo pada 2014. Presiden yang disokong langsung oleh PDIP ini menyatakan bahwa Nawacita (sebagai turunan dari Trisakti-nya Soekarno) sebagai landasan pemerintah untuk memutuskan segala kebijakan pemerintah.

“Saya tergerak untuk menggali hal-hal mendasar atau hakikat dari gagasan ekonomi mandiri tersebut karena saya sadar bahwa sebagai wakil rakyat, saya bersentuhan secara langsung dengan politik ekonomi (anggaran) bangsa ini. Lebih dari itu, saya merasa terpanggil untuk menjawab tuntutan rakyat mengenai kuriositas tentang ekonomi mandiri,” kata Olly Dondokambey ketika bertemu dengan Aktual.

Pria kelahiran Manado ini menilai, pikiran dan ide Soekarno lebih banyak diulas dalam konteks ekonomi dan politik secara makro. Ide-ide Soekarno soal kemandirian ekonomi secara teknis sangat sedikit yang mengulas.

“Soekarno menguraikan gagasan tentang ekonomi selalu dalam konteks dan keterkaitan dengan politik dan kebudayaan. Politik, ekonomi, dan kebudayaan, dengan begitu, adalah tiga fondasi utama yang berjalani-kelindan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” politisi senior PDIP ini.

Dengan membaca semua pikiran-pikiran Soekarno, politisi kelahiran

1961 ini menyimpulkan bahwa Soekarno sebenarnya menawarkan tiga ide besar yakni: ekonomi mandiri *an sich*, politik-ekonomi mandiri, dan mental-ekonomi mandiri.

Aktual sempat berbincang dengan Olly Dondokambey soal Soekarno, Nawacita dan bagaimana membumikan ide kemandirian ekonomi secara praktis. Bukan sekadar slogan.

Demikian petikannya....

Mengapa Ide Soekarno soal kemandirian ekonomi jarang diulas secara mendalam?

Banyak kalangan merujuk Soekarno sebagai pemikir dan tokoh politik. Hal ini disebabkan karena Soekarno lebih banyak tampil sebagai tokoh pergerakan politik ketimbang ekonomi.

Akan tetapi, jika membaca naskah pembelaannya saat pengadilan di Landraad Bandung tahun 1930, Deklarasi Ekonomi (Dekon), dapat dikatakan Soekarno lah sebenarnya soko guru ekonomi yang paham benar akan pondasi dasar ekonomi bangsa. Dia sangat paham soal akumulasi kapital, distribusi kekayaan, dan pasar.

Pidato itu jelas menunjukkan bahwa pikiran Soekarno adalah anti-kapitalisme. Bagi Soekarno, kapitalisme adalah cara yang dipakai oleh bangsa-bangsa yang memiliki kapital (modal) untuk mengeksploitasi sumber daya negara-negara modal kecil, yang ujung-ujungnya menghasilkan imperialisme. Coba Anda baca risalah “Indonesia Menggugat”, di sana Soekarno menjelaskan dengan sangat runut relasi antara kapitalisme dan imperialisme.

Bagaimana cara membumikan ide kemandirian Soekarno saat ini?

Saya harus memulai pembahasan soal ini dalam kerangka tata cara pembahasan anggaran. Bagi rakyat awam, mereka perlu tahu juga bagaimana proses, mekanisme dan prosedur penetapan anggaran. Mengurus anggaran adalah hal yang sangat sulit, karena harus memasukkan semua elemen penting terkait peri kehidupan rakyat. Politik anggaran berbasis Nawacita juga tidak mudah, butuh proses politik panjang dan komitmen agar agenda besar pemerintah harus tercakup di sana. Sebagai anggota partai pendukung pemerintah, saya harus berkomitmen agar agenda pemerintah harus tergambar jelas dalam APBN.

Jadi anggota DPR mempunyai peran penting menentukan regulasi, menyetujui rancangan pemerintah akan keuangan negara dan mengawasi kinerja pemerintah. Ketiga tugas yang dimilikinya itu, nasib warga negara ditentukan. Jika dewan memiliki niat tulus, maka bukan tidak mungkin negara makmur.

Sebaliknya, akan menuju ke gerbang kehancuran andaikata, dewan menggunakan fungsinya untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Maka sebagai ideologi, Tri Sakti Bung Karno yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara budaya ingin dihidupkan kembali oleh Jokowi-JK yang dituangkan dalam butir-butir Nawacita dalam menjalankan pemerintahan. Maka, DPR sebagai regulator, pelaku anggaran, pengawas dan penyalur aspirasi rakyat diharapkan agar dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, semangat Nawacita menjadi roh yang akan menggerakkan dewan

dalam menyejahterakan rakyat.

Soekarno tegas menolak “agenda paksaan” dibalik utang luar negeri. Menurut Anda, apakah penerapan Nawacita seperti itu juga?

Begini. Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang.

Desakan mereformasi arsitek-keuangan global bukan hanya dilontarkan dari Presiden Jokowi saat pidato di Konferensi Asia Afrika kemarin. Beberapa kepala negara di belahan dunia, seperti mantan Presiden Brasil, Lula Da Silva, sering mengecam dan mendesak agar tiga lembaga di atas segera mereformasi diri agar keadilan sosial dan pemerataan pembangunan di antara bangsa-bangsa tercapai.

Bukan hanya itu, ekonom beken seperti David Harvey dan David Korten misalnya. Mereka mendeskripsikan secara rinci dan sistematis soal kerusakan yang terjadi akibat salah urus lembaga-lembaga multilateral. Bagi mereka lembaga-lembaga keuangan global bukannya membantu mereduksi kemiskinan dan pengangguran di dunia-dunia miskin dan negara-negara pemimjam, tetapi malah memicu gap besar antara kaya-miskin.

Kritik yang sangat tajam justru datang dari mantan Vice President Bank Dunia, Joseph Stiglitz. Di bukunya “Globalization and Its Discontents”. Dia membongkar borok-borok tiga lembaga finansial global tadi. Kata Stiglitz, keberadaan mereka sangat syarat dengan kepentingan negara-negara maju dan kepentingan komunitas finansial yang ingin mengepaskan sayap ekspansi bisnisnya ke negara-negara lain.

Katanya juga, globalisasi di tangan lembaga-lembaga finansial itu lebih banyak mudaratnya daripada berkahnya. Stiglitz bahkan mengatakan lembaga-lembaga itu adalah sebuah *supra state* yang lebih berkuasa daripada Perserikatan

Bangsa-Bangsa karena organisasi-organisasi itu dapat memaksakan banyak kebijakan-kebijakan kepada negara-negara dunia ketiga.

Konstitusi UUD 1945 secara tegas sebenarnya menyatakan bahwa fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat adalah pemegang kedaulatan rakyat. Jadi, dari parlemen jelas saya akan berupaya keras mendorong reformasi arsitektur keuangan global yang tidak adil tersebut berdasarkan semangat Tri Sakti Bung Karno. Memang ini bukan langkah yang mudah seperti membalik gambar mata uang logam dari sisi satu ke sisi lainnya.

Dari sisi kebijakan, apa yang akan Anda lakukan?

Soal Pajak. Saya tetap yakin, pajak adalah salah satu instrumen penting untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Agar tidak lagi mengandalkan utang sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan pembangunan maka pemerintah harus memperkuat lewat instrumen fiskal yaitu pajak.

Anda pasti tahu kan saat Amerika dilanda krisis yang disebut Great Depression. Akibat krisis itu terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar. Tingkat pengangguran di Amerika sangat tinggi saat itu.

Lalu datanglah Keynes (John Maynard Keynes). Dia menawarkan solusi brilian dan bernas. Keynes mengatakan, dalam kondisi krisis, ketika instrumen monoter mentok dan tak bisa lagi mengatasi persoalan, maka pemerintah harus menggunakan instrumen lain untuk mengatasi krisis. Instrumen itu disebut instrumen fiskal.

Keynes mengusulkan saat itu, intervensi pemerintah dalam pasar mutlak dilakukan karena pasar sudah gagal. Dia usul saat itu agar pemerintah harus menggelontorkan uang yang cukup banyak untuk membangun infrastruktur publik dan proyek-proyek publik lainnya. Uang itu akan menghidupkan kembali perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur,

produsen semen, produsen aspal, produsen baja dan lainnya.

Kata Keynes, semakin besar *spending* yang dikeluarkan pemerintah, semakin besar pula permintaan tenaga kerja oleh perusahaan. Permintaan produksi juga ikut naik dan dengan sendirinya lapangan kerja akan meningkat pula.

Lantas pertanyaannya kemudian, dari mana anggaran untuk membiayai pembangunan yang sangat besar itu? Keynes mengatakan, tugas pemerintah melalui instrumen fiskal adalah menagih pajak perorangan, perusahaan, badan hukum dan lainnya.

Selain itu, tugas pemerintah melalui kebijakan fiskal adalah memungut pajak perusahaan dan orang-orang kaya, menurut skala-besar kecilnya usaha. Pajak orang kaya digunakan untuk menstimulus ekonomi, seperti membangun infrastruktur publik, membangun pendidikan dan membiayai asuransi kesehatan bagi warga miskin.

Itu cara Amerika Serikat menangani krisis saat itu. Apakah hal yang sama juga harus dilakukan di Indonesia saat ini?

Sebagai anggota Komisi XI DPR-RI, salah satu tugas penting saya adalah melakukan fungsi kontrol terhadap otoritas monoter, Bank Indonesia dan perbankan nasional.

Tugas Bank Indonesia adalah membuat kebijakan monoter. Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas kurs nilai tukar (rupiah). Stabilitas rupiah mencakup, kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa dan stabilitas terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangannilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Tugas Bank Indonesia bersama DPR juga adalah mengontrol perbankan secara individual. Karena jika bank mengalami krisis likuiditas, ekonomi Indonesia bisa goncang, seperti yang terjadi pada krisis ekonomi tahun 1998 lalu.

Maka, Bank Indonesia bersama



Otoritas Jasa Keuangan (OJK), wajib mengontrol kinerja keuangan bank. Modalnya harus dicek baik. Rasio-rasio keuangan, seperti CAR, NPL dan sederet rasio keuangan lainnya perlu mendapat kontrol ekstra ketat. Otoritas moneter dan OJK juga harus mengontrol pemberian kredit, agar perbankan selalu menggunakan prinsip *prudentiality* dalam pemberian kredit jangan sampai terjadi kredit macet.

Bukan hanya itu, regulasi sektor perbankan juga harus mengacu pada konstitusi UUD'45. Konstitusi memberi mandat besar agar bank-bank milik negara perlu diberi peran besar dalam mengontrol roda pembangunan. Maka, akuisisi dan proses merger perlu merujuk pada aturan main yang diberikan konstitusi.

Salah satu yang menjadi konsen saya secara pribadi di DPR adalah soal liberalisasi sektor perbankan. Sejak krisis 1998, perbankan kita cenderung terlalu liberal. Undang-Undang Perbankan No.10, tahun 1999, yang membuka ruang bagi bank asing mengontrol 99 persen kepemilikan bank lokal perlu diatur ulang. Saya kira kita di DPR memiliki spirit yang sama soal ini.

Apa yang sudah dilakukan DPR soal kemandirian negara di sektor industri finansial?

Pada periode yang lalu, DPR sebenarnya sudah berjuang merevisi Undang-Undang (UU) Perbankan, meskipun RUU Perbankan hasil revisi gagal disahkan. Namun kini, revisi UU Perbankan masuk agenda program legislasi nasional (prolegnas) 2015-2019.

Komisi XI DPR yang membawahi bidang keuangan menyatakan akan memprioritaskan pembahasan revisi UU Perbankan. Komisi XI bahkan telah membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Perbankan. Salah satu poin revisi yang akan dimasukkan RUU Perbankan adalah soal pembatasan kepemilikan asing.

Semangatnya adalah saya tidak ingin perbankan nasional didominasi asing lagi. Maka kepemilikannya tentu harus di bawah 50 persen. Panja RUU Perbankan sendiri belum merumuskan detail ketentuan pembatasan kepemilikan asing di perbankan ini. DPR akan meminta masukan dari pihak yang berkompeten.

Anda yakin kemandirian ekonomi akan tercapai?

Harus. Harus yakin. Kita harus menggelorakan kembali semangat revolusi agar kita sadar bahwa keterjajahan itu membuat martabat bangsa direndahkan. Penjajahan gaya baru dalam dunia modern, adalah bentuk paling nyata bagaimana kita dimanipulasi atas nama pembangunan selama ini. Maka, sudah saatnya kita harus berbenah diri agar bisa melangkah lebih pasti menuju Indonesia mandiri dan sejahtera.

Reformasi 1998 seharusnya mampu membawa Indonesia mampu berkompetisi dalam meja kompetisi global dan menciptakan banyak hal soal reformasi birokrasi pusat-daerah, reformasi hukum dan penegakan keadilan sosial. Sayangnya tanda-tanda perubahan pasca-reformasi belum juga bersemi.

Gelora revolusi tereduksi menjadi reformasi yang lunak dan prosedural. Negara tetap saja diselenggarakan dengan kuasa manipulatif dan pembangunan kita tetap berkarakter eksploitatif.

Negara tidak saja gagal menegakkan kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi, tetapi justru menjadi fasilitator sistem hukum dan tata ekonomi eksploitatif nir-keadilan. Pembangunan memang marak, investasi asing meningkat, pertumbuhan ekonomi relatif stabil. Namun bukannya mengentaskan kemiskinan, pembangunan eksploitatif itu menghasilkan proses pemiskinan sistemik lewat pencaplokan sumber daya, marginalisasi, dan kekerasan dalam berbagai bentuk.

Akibatnya, kita makin jauh dari cita-cita kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan ketangguhan budaya sebagaimana digelorakan Bung Karno. Peradaban bangsa ini mesti diselamatkan dari mental budak, mental centeng, mental penindas-pencuri hak sesama bangsanya sendiri.

Jadi, kita tidak punya pilihan lain selain menggelorakan kembali semangat revolusi yang telah mengantarkan kita ke pintu gerbang kemerdekaan. ◦

Hari itu, tanggal 28 Oktober 2015 ada beberapa orang penting kumpul di Bakrie Tower.

Tampak Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Waketum Gerindra Edhy Prabowo. Sekretaris Koordinator Harian KMP Fahri Hamzah dan Presiden PKS Sohibul Iman juga tampak. Yang mengejutkan adalah kehadiran Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Sebagai tuan rumah, Ketua umum Golkar versi Munas Ancol Aburizal Bakrie dan Koordinator Harian KMP Idrus Marham kelihatannya sudah mempersiapkan acara khusus tersebut.

Mengingat tinggal dua hari lagi rencana pengesahan RAPBN 2016, berkumpulnya tokoh-tokoh oposisi dibalik Koalisi Merah Putih (KMP) itu menjadi magnet awak media untuk tahu apa kesepakatan KMP soal RAPBN 2016.

Sebuah pernyataan dari Aburizal Bakrie (Ical) setelah pertemuan itu berakhir akhirnya bisa menjawab rasa penasaran banyak jurnalis yang ada di sana. "Tentang RAPBN 2016, kami berpendapat, kurang mencerminkan pro-rakyat," kata Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie usai pertemuan di Bakrie Tower, Jakarta Selatan, Rabu (28/10/2015).

Ada beberapa rekomendasi dari pertemuan itu, terutama soal PMN.

Pernyataan Ical itu mungkin adalah muara dari beberapa pernyataan "ketidakpuasan" dan kritik beberapa partai KMP terhadap postur RAPB 2016 sejak beberapa waktu lalu.

Partai Gerindra misalnya. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon melihat ada masalah besar dibalik Penyertaan Modal Negara (PMN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Fadli mempertanyakan alasan pemerintah mengalokasikan dana PMN cukup besar ke beberapa BUMN yang dianggap kinerjanya masih dipertanyakan.

Salah satu petinggi Partai



RAPBN 2016 Milik Siapa?

Gerindra ini melihat, daripada menyertakan dana PMN ke BUMN, lebih baik pemerintah fokus ke pembangunan desa. "Dana desa Rp1,4 miliar per desa belum terpenuhi. Kenapa tidak diarahkan ke sana," katanya.

Perlu diketahui, Komisi VI DPR RI sebelumnya telah menyetujui anggaran PMN untuk BUMN adalah Rp 34,32 triliun yang dibagi untuk 23 BUMN dengan rincian PMN tunai senilai Rp31,75 triliun dan PMN non-tunai sebesar Rp2,57 triliun.

Akan halnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mirip dengan sikap Partai Gerindra. Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah bahkan memberi catatan khusus soal RUU Tax Amnesty.

Petinggi PKS itu menganggap usulan pemerintah soal RUU tersebut aneh dan tak masuk akal. Saya menolak DPR disuruh menjadi pengusul (RUU Tax Amnesty). Menurut saya itu harus menjadi proposal pemerintah," tegas Fahri.

Dia melihat ada tekanan dari pemerintah untuk mendorong RUU Tax Amnesty agar DPR yang mengusulkan ini. Padahal, seharusnya pemerintahlah yang punya inisiatif. "Nanti orang bilang, DPR mau malak pajak. Nah, itu yang

kami tolak," ujar dia.

Soal RUU Tax Amnesty ini menjadi masalah sangat serius dalam postur RAPBN karena menyangkut uang di pos pengeluaran RAPBN yang mencapai Rp500 triliun.

"Kalau pemerintah mau (mendesak.red), silakan. Tapi pos dana pengeluaran sebesar itu tidak boleh muncul dulu di pengeluaran yang akan datang. Uangnya belum masuk," katanya.

Bahkan, Sekretaris Fraksi PAN DPR RI, Yandri Sutanto beberapa saat lalu mengisyaratkan hal tersebut. Tarik ulur politik di Gedung Bundar soal RAPBN 2016 ini tak lepas dari belum kelarnya pembahasan RUU Tax Amnesty.

"Rp 2.500 triliun dengan asumsi sudah memasukan tax amnesty. Tapi, kalau belum ada payung hukumnya, tidak logis dong masuk ke RAPBN 2016. Itulah yang menyebabkan pengesahan ditunda menjadi 30 Oktober," katanya beberapa waktu lalu.

Namun, kalau mau ditelisik lebih jauh akar masalah RUU Tax Amnesty sebenarnya ada di soal: siapakah yang menikmati pengampunan pajak dengan total Rp500 triliun itu? Apakah pemilik modal besar dan konglomerat atau rakyat kecil/UKM?

Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Komisi VI DPR Achmad Hafisz Tahir (kedua kiri) yang didampingi Wakil Ketua Heri Gunawan (kiri), dan Dodi Reza Alex Noerdin (tengah) usai mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).

Dalam hal ini pemerintah sangat tidak transparan.

Soal lain yang jadi isu penting di RAPBN adalah penyusupan munculnya kontroversial yakni pasal 12 ayat 2 tahun 2015 tentang program Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam RAPBN 2016.

Ada dugaan kuat bahwa hal itu dilakukan melalui Banggar DPR RI yang menekan pemerintah supaya menerima usulan DPR. Kalau pemerintah menolak maka besar kemungkinan RAPBN 2016 akan tersandera. "Kami tegas bahwa tidak boleh ada pasal itu karena itu melanggar prinsip penyusunan APBN," kata anggota Badan Anggaran (Banggar) Dadang Rusdiana dari Partai Hanura beberapa saat lalu.

Perlu diketahui, Sidang Paripurna DPR RI beberapa saat lalu sudah menolak usulan DPR untuk mengambil alih kewenangan pemerintah dalam mengusulkan anggaran dana aspirasi.

Namun yang menarik ketika bicara soal DAK ini adalah pernyataan dari pemerintah lewat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo soal arah kebijakan pengalokasian DAK tahun 2016 pada 21 Oktober lalu.

Menurut Boediarso Teguh, dalam RAPBN 2016, pemerintah lah yang mengusulkan DAK. Kata Boediarso, pemerintah sudah mengusulkan reformulasi dan penguatan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang merupakan bagian dari Dana Transfer Khusus.

Dalam pernyataan persnya Boediarso mengatakan DAK diarahkan untuk mendukung program Nawacita. Terutama Nawacita ketiga, kelima, keenam, dan ketujuh.

Sangat kental kelihatannya tarik ulur politik anatra Eksekutif dan Legislatif kali ini. Saling ancam dan

saling tekan, dan saling menyandera menjadi isu-isu yang tak terucap dengan lugas di media.

Pertanyaan Besarnya, Kisruh RAPBN 2016 Menguntungkan Rakyat?



Mari kita simak pernyataan Yusril Ihza Mahendra soal RAPBN 2016 ini. Dia menilai RAPBN 2016 tidak realistis.

Dengan menetapkan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen dan laju inflasi sebesar 4,7 persen saja, sudah menjelaskan bahwa asumsi yang dibangun dalam RAPBN 2016 tak realistis. "Publik mengetahui persis bahwa angka-angka tersebut tidak menggambarkan keadaan sebenarnya," kata Ketua Partai Bulan Bintang ini.

Dia minta pemerintah untuk mendesain ulang postur RAPBN 2016 agar benar-benar dirasakan manfaatnya untuk perbaikan ekonomi dan dinikmati oleh rakyat. Yusril bahkan meminta KMP untuk kritis terhadap RAPBN 2016 ini.

Kritik Yusril sebenarnya mewakili beberapa kritik pengamat ekonomi politik yang melihat RAPBN 2016 ini sangat tidak mewakili kepentingan rakyat tapi kepentingan pemodal. Di samping kelemahan-kelemahan mendasar di banyak asumsi yang seperti dipaksakan itu.

"Secara keseluruhan postur RAPBN 2016 terlihat hanya untuk melegitimasi sikap "ambisius liar" pemerintahan Jokowi-JK untuk bagi-bagi proyek infrastruktur yang dijamin APBN, yang jelas akan memberatkan dunia usaha dalam negeri dan akan semakin membebani rakyat," kata pengamat ekonomi dan politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng.

Dia melihat landasan kunci RAPBN 2016 adalah bagi-bagi mega proyek infrastruktur di antara oligarki. "Ini bukan tuduhan tidak beralasan karena hingga hari ini pemerintah tetap *keukeuh* dengan mega proyek listrik, tol, kereta cepat dan lain sebagainya. Lebih parah lagi APBN dijadikan bancakan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN senilai Rp48.2 triliun lebih. Padahal PMN dalam 2015 senilai 70 triliun rupiah telah memicu kontroversi karena mencederai keadilan, tidak akuntabel dan tak transparan," tegas dia.

Sementara itu, tambahna, BUMN terus dikerahkan untuk memburu utang luar negeri, menjual sebagian besar saham publik BUMN ke pihak asing. Semestinya hanya BUMN yang 100% sahamnya milik negara yang berhak mendapatkan PMN. Besar kemungkinan PMN ini akan menjadi strategi membentuk kembali *share* pemerintah di BUMN agar laku dijual ke pasar keuangan internasional.

Di sisi lain, pemerintah terus memangkas subsidi untuk rakyat, baik subsidi BBM, listrik, dan subsidi pertanian. Menghadapi liberalisasi ASEAN 2016 postur RAPBN ini akan sangat kontraproduktif dalam memperkuat daya saing nasional dan kemampuan kapasitas rakyat yang tengah terpuruk secara ekonomi.

Jadi, banyak lubang besar di RAPBN 2016 ini. Terutama soal sampai sejauh apa keberpihakan terhadap rakyat. Apakah benar RAPBN ini sudah mencerminkan janji Jokowi-JK untuk tetap di jalur Trisakti dan Nawacita? 

Ismed Eka, Arbie Marwan, Dhanu Akbar



Hikayat Swastanisasi PLN

Benarkah Indonesia dalam telikungan kapitalisme global sejak pasca reformasi 1998? Cerita seputar swastanisasi kelistrikan di Indonesia sudah dirancang oleh IMF dan Bank Dunia sejak 1997, agaknya jadi isyarat bahwa Indonesia sedang memasuki zona merah neoliberalisme.

Mari kita mulai dengan kesaksian John Perkins, seorang staf konsultan International Chast Boston yang pernah disewa badan intelijen CIA bidang ekonomi antara 1971-1981. Pada 1975, begitu punuturan Perkins dalam bukunya yang terkenal *Economic Hitman*, dirinya ditugaskan ke Indonesia untuk merusak sistem ekonomi Indonesia, antaranya melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN). Operasi subversif ekonomi macam apa yang dia lancarkan? Yaitu dengan membuat perencanaan makro kelistrikan dua kali lipat pertumbuhan ekonomi.

Misalnya, ketika pertumbuhan ekonomi diprediksi bakal mencapai 8 persen per tahun, maka perkiraan pertumbuhan kelistrikan adalah 16 persen. Ini yang disebut dengan parameter kontraksi sebesar 100 persen. Dengan membuat kontraksi 100 persen atau pertumbuhan kelistrikan sebesar dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional, maka besar kemungkinan akan terjadi ketertinggalan penyediaan infrastruktur tenaga listrik.

Operasi subversi ekonomi Perkins di sektor kelistrikan tersebut nampaknya cukup berhasil. Terbukti ketika Presiden Suharto kemudian terpaksa menyiapkan listrik swasta yang kelak lebih dikenal dengan

Independence Power Producer (IPP). Maka, tahapan awal untuk menciptakan prakondisi ke arah swastanisasi kelistrikan berhasil sudah.

Pada tahapan awal, 27 IPP atau listrik swasta yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun pada perkembangannya, akibat dari adanya skema IPP ini, harga listrik malah melambung tinggi dibandingkan pasar dunia lainnya. Seperti apa yang terjadi pada proyek Paiton atau PT Paiton Energy Company (PT PEC) milik konsorsium yang merupakan gabungan antara General Electric Corp (Amerika Serikat), Mitsui Corp (Jepang), dan PT Batu Hitam Perkasa.

Namun, itu baru sebagian cerita dari ulah John Perkins dalam mengacaukan sistem kelistrikan di Indonesia. Selanjutnya Perkins adalah mendorong terjadinya restrukturisasi PLN dengan menggiring PLN yang awalnya Perusahaan Umum, namun kemudian dengan alasan fleksibilitas,

kemudian dirubah jadi Persero (PT).

Alhasil, PLN diberi izin untuk mencari dana operasional dan investasi secara korporat, tanpa campur tangan pemerintah. Inilah tahapan awal diterapkannya skenario ekonomi neoliberalisme dalam perekonomian nasional melalui sektor kelistrikan. Betapa tidak. Pengelolaan perusahaan yang dilepas dari campur tangan pemerintah maka pelan tapi pasti telah menyeret PLN ke dalam praktik ideologi kapitalisme. Sebab, tarif listrik kemudian amat tergantung pada fluktuasi pasar energi dunia.

Tentu saja kerja dari Perkins baru tahapan awal untuk menerapkan skema para perancang ekonomi di Washington dalam meliberalisasikan dan men-swastanisasikan kelistrikan Indonesia. Rencana makro kelistrikan Perkins baru menemukan momentumnya untuk merekomendasikan penerapan privatisasi PLN pada 1997, setahun menjelang kejatuhan Presiden Suharto pada Mei 1998.

Kalau kita menelisik kembali aksi subversif korporasi-korporasi energi global AS melalui IMF dan Bank Dunia, sebenarnya mereka sudah mengincar sektor ketenaga-listrikan Indonesia sejak 1970-an. Lagi-lagi Perkins punya cerita menarik tentang soal ini. Waktu itu, Pemerintahan Suharto sempat menerapkan Proyek Listrik Masuk Desa atau Prolisdes. Sepintas kalau kita lihat secara kasat mata, gagasan tersebut sangat mulia mengingat yang disasar dari proyek ini adalah masyarakat desa. Namun agenda yang sesungguhnya, menurut pengakuan Perkins, Prolisdes merupakan salah satu strategi CIA untuk memprovokasi pemerintah Indonesia agar terjebak dalam skema utang luar negeri dengan dalih untuk peningkatan rasio elektrifikasi.

Selain itu, juga melalui skema utang luar negeri di sektor ketenaga-listrikan, pemerintah Suharto didorong agar membangun Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA), tenaga panas bumi (PLTP), tenaga uap dengan bahan bakar batu bara (PLTU), tenaga uap berbahan bakar

gas (PLGU) dan lainnya secara besar-besaran, dengan bantuan dana sebagian besar melalui pinjaman atau utang dari Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), JBIC dan sebagainya.

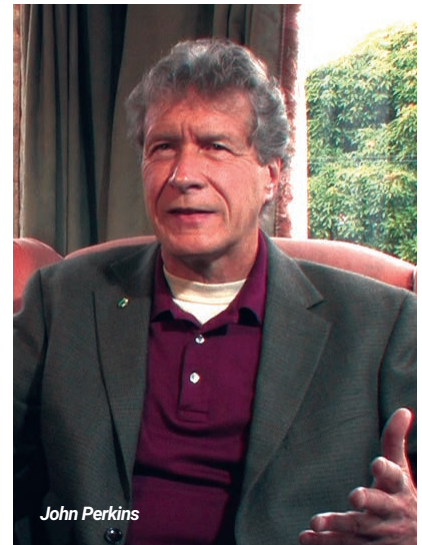
Dalam skenario para perancang ekonomi neoliberal yang bermarkas di Washington, membengkaknya sektor ketenaga-listrikan, pada akhirnya akan memaksa pemerintah mengikuti skenario Washington Consensus dalam membuat *road map* PLN ke depan. Jelaslah sudah bahwa misi sesungguhnya adalah untuk melakukan penjajah ekonomi perekonomian kita melalui salah satu sektor strategis negeri kita, yaitu di bidang kelistrikan.

Lahirnya Undang-Undang No 15 tahun 1985 tentang kelistrikan merupakan salah satu bukti nyata keberhasilan aksi subversif Amerika untuk menguasai sektor ketenaga-listrikan Indonesia. Karena melalui UU inilah, kemudian jadi dasar dikeluarkannya peraturan perundangan di bawahnya untuk memberi payung hukum masuknya Listrik Swasta di bidang pembangkitan yang selanjutnya kita kenal sebagai IPP tersebut di atas. Yang kemudian dilanjutkan dengan mengubah bentuk PLN yang semula Perusahaan Jawatan jadi Perusahaan Umum (Perum), dan bahkan akhirnya jadi PT PLN (Persero).

Melalui perubahan status tersebut, pada perkembangannya kemudian merupakan landasan awal untuk menelikung aset BUMN seperti PLN agar satu saat yang tepat dapat dikuasai oleh Amerika Serikat maupun sekutu-sekutunya dari Eropa Barat.

Rencana Bertahap Mencaplok Aset BUMN

Kata kunci untuk memahami skenario para kapitalis global bidang energi adalah, Strategi Merangkak atau *Creep Privatization*. Perubahan status kelembagaan PLN, secara bertahap ditujukan untuk menerapkan sistem ekonomi liberal di sektor kelistrikan. Dengan PLN yang tadinya merupakan penyangga



infrastruktur listrik kemudian dirubah jadi komoditas.

PLN sebagai penyangga infrastruktur listrik yang berbentuk Jawatan Perusahaan Listrik dan Gas Negara merupakan hasil dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan listrik Belanda seperti OGEM, ANEM, GEBEO, EBALOM, dan pada awak berdirinya hanya berkapasitas 300 MW (saat nasionalisasi pada 1956).

Skema nasionalisasi kelistrikan ini memang merupakan kebijakan strategis Presiden Sukarno sejak awal kemerdekaan untuk bebas dari belenggu penjajahan asing di bidang ekonomi. Artinya, listrik yang tadinya dikuasai asing, dan diperjual-belikan dengan mekanisme pasar sehingga hanya yang mampu saja yang bisa menikmati listrik. Lantas dirubah oleh pemerintahan Sukarno sehingga listrik dikuasai negara berdasarkan amanah pasal 33 UUD 1945.

Dengan dikuasai negara, pemanfaatan listrik diarahkan sesuai skala prioritas. Pertama, diarahkan untuk instalasi vital negara seperti radio, alat pertahanan dan pengembangan industri. Dengan begitu, sektor kelistrikan diarahkan sebagai infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ketika Sukarno lengser menyusul meletusnya Gerakan 30 September 1965, dan naiknya Suharto sebagai presiden kedua, aksi

pihak asing untuk meliberalisasikan sektor perekonomian, khususnya kelistrikan, mulai dilancarkan setahap demi setahap.

Pertama, digulirkannya Proyek Listrik Swasta IPP yang semakin banyak pada era 1980-an, kemudian diterapkannya Prolisdes serta dibangunnya pusat listrik, transmisi dan pengembangan distribusi yang semuanya mengandalkan utang luar negeri.

Dan gerakan pihak asing untuk meliberalisasikan sektor kelistrikan mulai menemukan momentumnya melalui *Letter of Intent* (LoI) yang ditandatangani oleh Presiden Suharto pada 1997. Maka, sejak saat itulah Indonesia mulai masuk perangkap The Washington Consensus. Apalagi pada 1994, melalui keluarnya Peraturan Pemerintah No 23 tahun 1994, PLN sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara berubah menjadi PT. Perubahan ini jelas sesuai skenario IMF dan Bank Dunia. Sehingga kultur PLN yang semula berstatus perusahaan penyedia kebutuhan infrastruktur listrik, kemudian digiring jadi sebuah perusahaan penyedia komoditi komersial listrik, meski waktu itu UU No 15 tahun 1985 masih menugaskan PT PLN sebagai pemegang kuasa Usaha Ketenaga-listrikan atau PKUK.

Menurut Ahmad Daryoko dalam bukunya *Konspirasi Penjualan PLN ke Asing*, hal ini merupakan trik CIA untuk menggiring PLN secara bertahap menuju perusahaan swasta yang siap dijual kepada kelompoknya, dengan tujuan akhir, untuk melumpuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara politis di bawah hegemoni barat.

Gara-gara adanya tekanan akibat membengkaknya utang luar negeri dan tekanan IMF melalui LoI, maka PLN kemudian diprivatisasi. Hal nampak jelas ketika pada 31 Oktober 1997 Presiden Suharto dengan amat terpaksa menandatangani LoI dengan disaksikan oleh Michel Camdessus, Managing Director IMF.

LoI merupakan semacam surat pengakuan utang (yang pada 1997 utang luar negeri Indonesia sudah

mencapai Rp 1400 triliun). Setelah LoI 1997 yang ditandatangani Indonesia di tengah-tengah krisis moneter, kemudian disusul beberapa LoI lagi pada periode berikutnya yang intinya melaporkan perkembangan persiapan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan komitmennya melakukan kebijakan reformasi struktural, yang mana privatisasi atau swastanisasi PLN masuk dalam kerangka Reformasi Struktural program LoI.

Pada Agustus 1998, Pemerintah cq Departemen Pertambangan dan Energi menerbitkan *The White Paper* Restrukturisasi Sektor Kelistrikan yang ditandatangani oleh Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto.

Kuntoro Mangkusubroto, Aktor Intelektual Privatisasi PLN

Bagaimana ceritanya kok Kuntoro Mangkusubroto sampai dianggap sebagai aktor kunci penerapan swastanisasi PLN? Harus ditelusur kembali ketika pada 16 Maret 1999, terbit LoI yang mengindikasikan adanya niat pemerintah untuk mengeluarkan undang-undang yang melandasi privatisasi PLN serta diterapkannya kebijakan liberalisasi sektor kelistrikan yang kemudian kita ketahui bersama, terbit pada September 2002 atau yang lebih kita kenal dengan UU No 20/2002 tentang Ketenagalistrikan.

Namun lahirnya UU No 20/2002 tentang kelistrikan ini tak mungkin terjadi jika tidak ada yang namanya *The White Paper* Restrukturisasi Sektor Kelistrikan yang ditandatangani oleh Kuntoro pada Agustus 1998. Dan *The White Paper* ini oleh Ahmad Daryoko yang pada waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Serikat Pekerja PT PLN, sejatinya merupakan *blue print* programnya IMF, ADB yang dipaksakan kepada pemerintahan Suharto pada waktu itu.

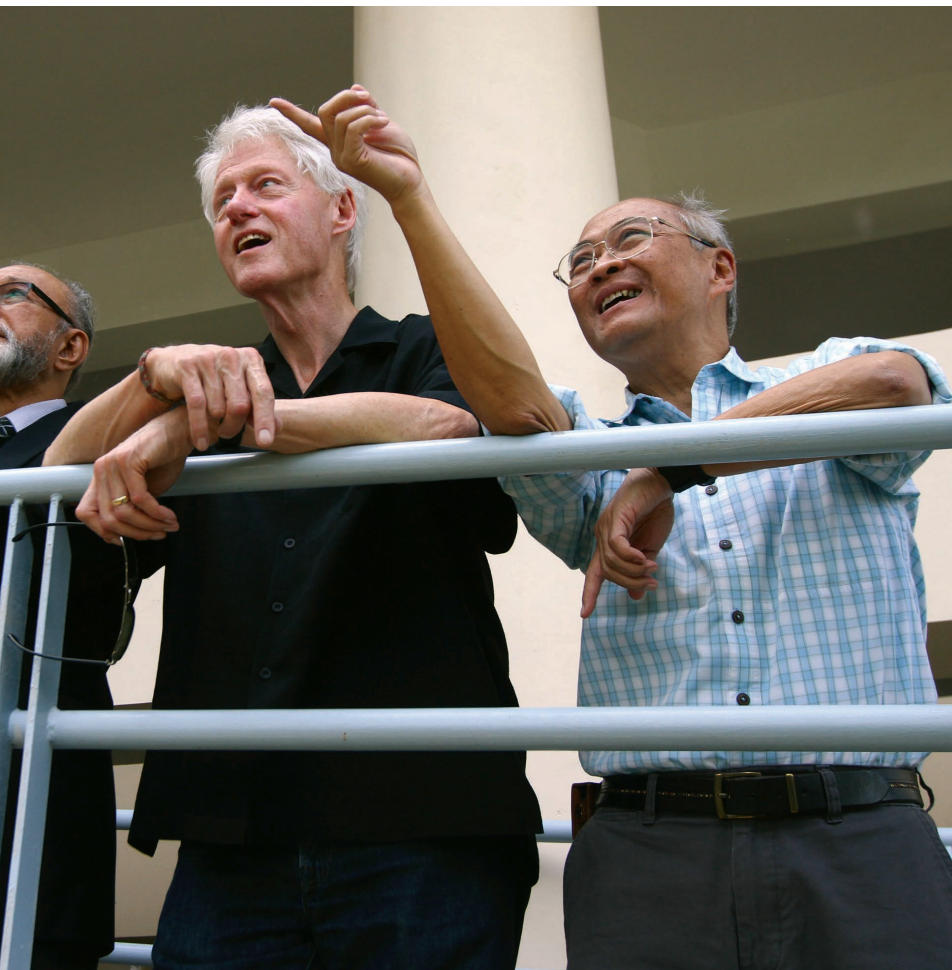
Keterlibatan Kuntoro dalam Rencana privatisasi PLN melalui terbitnya *the White Paper* pada Agustus 1998, nampaknya semakin jelas ketika alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) kemudian



Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto (kanan) memberikan penjelasan kepada mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton (kedua kanan) saat mengunjungi gedung penyelamatan di Banda Aceh, (19/7/2014).

dipercaya sebagai Direktur Utama PLN pada pasca reformasi hingga masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Dalam pandangan Serikat Pekerja PT PLN pada waktu itu, *The White Paper* yang sejatinya merupakan *The Power Sector Restructuring* Program konsep IMF dan ADB, bertentangan dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 2, sehingga penguasaan Negara atas ketenagalistrikan hilang. Padahal, pasal 33 ayat 2 UUD 1945 menegaskan: "Cabang-Cabang Produksi yang penting bagi Negara serta menguasai hajat hidup orang



banyak dikuasai negara.”

Begitupun, pemerintahan pasca reformasi nampaknya tidak mengubris kegusaran berbagai elemen masyarakat, termasuk dari kalangan PLN sendiri, terhadap tren ke arah liberalisasi dan swastanisasi PLN. Bahkan di era pemerintahan Megawati Sukarnoputri, UU No 20 tahun 2002 tentang Kelistrikan, diterbitkan. Namun ketika SP PT PLN mengajukan *judicial review* terhadap UU tersebut kepada Mahkamah Konstitusi, watak liberalistik dari undang-undang tersebut terungkap jelas. Dan UU tersebut dibuat dengan didasarkan pada serangkaian LoI antara 1997 hingga 2000 sebagai konsiderannya.

Melalui serangkaian LoI antara 1997 hingga 2000, terungkap bahwa pemerintah sedang merencanakan

penguatan kemampuan keuangan perusahaan dan mempersiapkan privatisasi dalam waktu dekat. Dalam menjalankan program reformasi sektor ketenagalistrikan ini, pemerintah Indonesia mendapat bantuan dana sepenuhnya dari IMF dan ADB.

Dengan kata lain, UU No 20/2002 yang didasari oleh LoI 1997 hingga 2000, sejatinya merupakan skenario dari lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia, IMF, ADB, dan USAID. Yang tentunya merujuk pada Skenario Washington Consensus.

Untunglah, masih banyak kalangan yang punya hati nurani, terutama di kalangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pertimbangan bahwa UU No 20/2002 tentang Kelistrikan bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945, maka UU tersebut dibatalkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi

pada 15 Desember 2004.

Ketika UU No 20/2002 tersebut dibatalkan MK, pemerintahan sudah beralih dari Megawati kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, menyusul dibatalkannya UU tersebut atas gugatan SP PLN, menyangkan direksi PLN yang tidak bisa mengendalikan SP PLN. Kemudian disusul peringatan keras kepada direksi PLN dan didesak menindak tegas SP PLN.

Singkat cerita, Pemerintahan SBY-JK ketika itu, tetap bersikukuh untuk mempertahankan UU yang bersifat liberal tersebut, membiarkan tarif listrik berlangsung sesuai mekanisme pasar, dan melepaskan tanggungjawab pemerintah/negara terhadap kesejahteraan rakyat sesuai amanah UUD 1945.

Buktinya, pemerintah kemudian mengirim kembali Rencana Undang-Undang Kelistrikan, yang kemudian merupakan embrio atau cikal bakal dari keluarnya UU No 30/2009, yang pada intinya masih sama dengan UU No 20/2002 yang sudah dinyatakan almarhum menyusul keputusan pembatalan UU tersebut oleh MK.

Nampaknya mata-rantai penting dari skenario mem-privatisasi PLN atas arahan IMF, ADB, dan Bank Dunia yang bermuara pada keluarnya UU No 20/2002, maupun UU kembarannya yaitu UU No 30/2009, adalah Kuntoro Mangkusubroto. Tak heran, jika sosok satu ini semakin berkibar semasa pemerintahan SBY-JK maupun SBY-Budiono. Setelah dipercaya oleh SBY jadi Ketua Rekonstruksi Aceh pasca tsunami sejak 2004, pada masa kedua pemerintahan SBY, bahkan Kuntoro dipercaya sebagai Ketua UKP4 yang tugas pokoknya adalah Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan. Namun jika kita amati secara lebih jeli, peran Kuntoro sesungguhnya di UKP4 itu sejatinya adalah sebagai Perdana Menteri Pemerintahan Presiden SBY-Budiono.

Dan sekarang, lebih tidak mengherankan lagi, kembali ke habitat lamanya di PLN, hanya kali ini bukan sebagai Direktur Utama, melainkan Komisaris Utama. ◻ Hendrajit

Lokasi Waduk Jatigede di Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (29/8).



RAPBN 2016 dan “Pengorbanan” Jokowi di Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur masih menjadi program kerja pemerintah di tahun 2016. Namun, di tengah melambatnya ekonomi, Presiden Jokowi terpaksa memangkas drastis anggaran sektor ini untuk dialihkan ke pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

Cita-cita tinggi yang berimplikasi pada perubahan besar dan mendasar jelas menuntut komitmen, kerja keras, dan pengorbanan untuk mencapainya. Itulah yang terjadi pada Indonesia saat ini, yang sedang melakukan transformasi fundamental ekonomi, dari yang semula selalu bertumpu pada konsumsi, penjualan komoditi dan bahan mentah, menjadi fokus ke

produksi, investasi dan industrialisasi.

Dalam kaitan itu, dua fokus utama pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan, ditambah pengendalian subsidi harga bahan bakar minyak. Persoalannya, dalam melakukan transformasi besar yang fundamental itu, Indonesia menghadapi tantangan perlambatan ekonomi global, seperti juga negara-negara lain, serta kurs rupiah yang fluktuatif.

Masalah itu ditambah dengan faktor cuaca berupa kekeringan, yang dikombinasikan dengan perilaku tidak bertanggung jawab perusahaan pembuka lahan, yang menghasilkan kebakaran hutan dan lahan, serta bencana kabut asap yang memakan korban, bahkan berdampak ke negara-negara tetangga.

Pernah mengalami tiga *booming* --harga minyak, kayu, dan mineral dan pertambangan (minerba)— Indonesia melakukan kesalahan besar karena menjadi terlena. Pembangunan Indonesia terus-menerus mengandalkan pada kekayaan sumber alam. Selama puluhan tahun Indonesia tidak menyiapkan industri, investasinya, dan hilirisasinya. Untuk membalik kondisi yang sudah runyam itulah, pemerintah ingin fokus pada pembangunan infrastruktur.

Pemangkasan Anggaran Infrastruktur

Tekad dan semangat boleh tinggi, tetapi realitas ekonomi yang melambat memaksa pemerintah Jokowi mengubah prioritas. Pemerintah telah memangkas drastis anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2016, serta merevisi prioritas-prioritas programnya. Pengurangan ini terlihat pada pagu anggaran dalam RAPBN 2016 untuk dua kementerian teknis yang selama ini membidangi infrastruktur, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian

Perhubungan (Kemenhub).

Pagu kebutuhan anggaran Kementerian PUPR pada 2016 mencapai Rp 178,2 triliun. Sedangkan alokasi yang disiapkan dalam RAPBN hanya Rp 103,8 triliun, atau lebih rendah 41,8 persen. Sementara itu, anggaran Kemenhub dialokasikan Rp 50,2 triliun, atau hanya 52,4 persen dari pagu kebutuhan sebesar Rp 105,4 triliun.

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, pengurangan anggaran infrastruktur itu disebabkan alokasi anggaran akan lebih diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Fokusnya adalah pada sektor-sektor yang akan mendorong pencapaian target pengurangan pengangguran. Target pengangguran terbuka itu saat ini tidak berubah, padahal kondisi ekonomi sedang sulit. Maka APBN harus digunakan untuk menyelamatkan atau menciptakan lapangan kerja.

Misalnya, dana desa tahun 2016 lebih dialokasikan untuk membangun industri atau pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di wilayah pedesaan, bukan lagi fokus untuk membangun infrastruktur. Alokasi anggaran nanti juga akan lebih difokuskan untuk mengurangi kemiskinan, dengan cara mengalokasikan anggaran yang berdampak lebih langsung pada masyarakat, seperti jaminan-jaminan sosial.

Pembangunan Bendungan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, untuk 2016, kementeriannya mendapat anggaran Rp 103 triliun. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan anggaran 2015 sebesar Rp 118,5 triliun. Dalam situasi demikian, kementerian itu akan melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan tahun 2015. Yakni, 22 bendungan yang mulai dikerjakan tahun ini, dan delapan bendungan baru lagi sesuai dengan rencana kerja pemerintah.

Yang juga dilanjutkan adalah pembangunan 78 ribu hektar irigasi rawa dan tambak, rehabilitasi 94

ribu hektar irigasi rawa dan tambak, pembangunan 126 km pengendali banjir, dan 7,3 km pengelolaan pantai. Juga, meneruskan pembangunan untuk konektivitas, termasuk jalan baru sepanjang 376 km, yang mencakup pula kawasan perbatasan. Sedangkan, pembangunan jalan Tol Trans Jawa ditargetkan harus tersambung paling lambat tahun 2018.

Di Kementerian PUPR, kekurangan anggaran terbesar berada di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 33,2 triliun. Pagu anggaran dalam RAPBN 2016 hanya Rp 46 triliun, dari rencana kebutuhan Rp 79,2 triliun. Di Ditjen Sumber Daya Air hanya dialokasikan Rp 29,7 triliun, dari rencana kebutuhan Rp 62 triliun. Ini artinya, ada kekurangan anggaran Rp 32 triliun.

Sedangkan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengakui, karena pengurangan alokasi anggaran, Kemenhub akan memetakan sejumlah program prioritas yang akan dikerjakan. Di Kemenhub, pengurangan terbesar berada di Ditjen Perkeretaapian yang menderita kekurangan anggaran sebesar Rp 25,9 triliun. Pagu anggaran dalam RAPBN 2016 hanya Rp 13,6 triliun, dari rencana kebutuhan Rp 39,6 triliun. Lalu di Ditjen Perhubungan Laut yang hanya mendapat anggaran Rp 15 triliun, dari kebutuhan Rp 28,6 triliun atau dipangkas hingga Rp 13,6 triliun.

Meski dihantam dengan pengurangan anggaran infrastruktur, Wakil Presiden Jusuf Kalla meyakini, kualitas dan jumlah pembangunan infrastruktur fisik pada 2016 akan lebih baik daripada tahun ini. Walau anggaran Kementerian PUPR menyusut hingga 10 persen, pembangunan infrastruktur fisik yang lebih baik itu akan terealisasi, asalkan Kementerian menjalankan tiga tahapan pembangunan dengan baik, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Proses Lelang yang Tertib

Untuk mencapai target pembangunan dengan anggaran yang terbatas, Kementerian PUPR diimbau menjalankan proses lelang yang tertib dan tetap mengutamakan kualitas. Kementerian ini menargetkan

penyerapan anggaran mencapai 44 persen pada akhir September 2015 dan terus meningkat hingga 93 persen pada akhir Desember 2015, dari total anggaran Rp 118,6 triliun.

Selain besarnya anggaran infrastruktur, faktor yang juga penting adalah langkah untuk mempercepat alokasi anggaran pemerintah, demi memicu pertumbuhan ekonomi 2016. Pihak Kementerian PPN/Bappenas tegas ingin memastikan agar proses tender, yang diselenggarakan di masing-masing kementerian dan lembaga, akan dilakukan di akhir 2015. Sehingga nantinya, ketika memasuki tahun 2016, pengerjaan proyek-proyeknya sudah dimulai. Selain mempercepat pertumbuhan ekonomi, ini juga menciptakan lapangan kerja.

Pembangunan infrastruktur merupakan unsur penting dalam transformasi ekonomi, yang akan memberi dampak signifikan pada jangka panjang. Dampak dari sulitnya konektivitas dan minimnya infrastruktur memicu disparitas harga barang konsumsi dan non-konsumsi yang sangat kentara. Harga kebutuhan pokok semen, misalnya, mencapai Rp 2 juta per sak di kawasan Pegunungan Tengah Papua. Hal ini menyebabkan lambatnya pelayanan pembangunan ke masyarakat di pedalaman Papua.

Dengan infrastruktur yang berkualitas layak dan berjumlah memadai, biaya distribusi logistik akan menjadi murah. Harga barang kebutuhan yang didistribusikan ke seluruh pelosok daerah juga menjadi lebih murah, sehingga pemerataan kesejahteraan rakyat juga diharapkan akan menjadi lebih mudah diwujudkan.

Oleh karena itu, dengan segala pemangkasan yang dilakukan terhadap anggaran infrastruktur pada RAPBN 2016, kita tetap berharap bahwa ini hanya kasus yang bersifat sementara dan tidak akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Fokus pemerintah harus tetap ditujukan pada pembangunan infrastruktur, meski dalam jangka pendek hasilnya tidak segera bisa dinikmati oleh masyarakat, yang menuntut hasil serba cepat. o Satrio Arismunandar



Jumat Keramat KIH

Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla baru saja melewati satu tahun masa pemerintah, atau lebih tepatnya pada tanggal 20 Oktober ketika mereka berdua mengucapkan janji setia kepada negara di depan ratusan wakil rakyat. Namun di saat sama, Koalisi Merah Putih (KIH), koalisi partai politik yang mengantarkan Jokowi duduk di singgasana tertinggi di Republik Indonesia, justru 'ramai-ramai' kesandung masalah hukum.

Awalnya, saat Otto Cornelius Kaligis terbelit persoalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sang Ketua Mahkamah Partai Nasdem (kini Mantan) itu, disinyalir memberikan suap USD27 ribu dan USDSin5 ribu kepada hakim dan penitera PTUN Medan. Suap itu diduga untuk menguji permohonan

keabsahan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana Bansos Pemprov Sumut, yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Medan.

Upaya tersebut, secara tidak langsung berimbas terhadap mandeknya penanganan kasus Bansos Pemprov Sumut, yang diduga melibatkan Wakil Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi. Pasalnya, Tengku Erry adalah Ketua DPW Partai Nasdem Sumut.

Kasus yang menjerat OC Kaligis ini, ternyata berhubungan erat dengan perkara yang menimpa Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Patrice Rio Capella. Orang nomor dua di partai besutan Surya Paloh itu disinyalir mencoba 'mengamankan' nama Gubernur Sumatera Utara dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos milik pemprov Sumut.

Rio Capella sendiri diduga menerima suap dari Gatot Pujo berupa uang sejumlah Rp200 juta. Uang tersebut adalah komisi untuk Rio Capella, lantaran dirinya bersedia mengomunikasikan penanganan perkara Bansos ke Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo.

Melalui dua upaya tersebut, pengajuan gugatan ke PTUN Medan serta melobi Jaksa Agung melalui Rio Capella, menjadi strategi yang justru berbuah pahit bagi Partai Nasdem, yang notabene diakui sebagai pendukung Jokowi-JK.

Kasus berhenti di Rio? Ternyata tidak. Sebab Wakil Ketua KPK, Zulkarnain menyebut, ada peran Kejaksaan Agung di kasus yang menjerat bekas Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella.

Mantan Jaksa itu menyatakan, jika tidak ada peran Kejagung tak mungkin 'pengamanan' Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho di kasus korupsi dana



(Foto kiri) Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo menaiki mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (27/10).

(Foto kanan) Mantan Menakertrans Muhaimin Iskandar (kanan) tiba di Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Rabu (28/10).

Bantuan Sosial bisa dilakukan.

“Itu kan pekerjaan nanti, pekerjaan penyidik, dalam kaitan ini tapi yang jelas tentu ada peran, ada fungsi, ada kewenangan. Kalau tidak (punya kewenangan.red), seperti anda saja kan tidak bisa melakukan itu (pengamanan.red). Karena dia (Kejagung.red) punya kewenangan, kaitannya di sana,” kata Zulkarnain.

Lalu, siapa pihak Kejagung itu? Zulkarnain tak mau buka suara. Alasannya demi kepentingan penyidikan. “Ada masalah, dan dengan masalah ini, dia (Kejagung.red) jadi punya kewenangan,” jelas dia.

Ironisnya, bukan hanya Nasdem yang tersandung masalah korupsi. Partai Hanura pun dapat giliran. Suap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN), menjadi batu sandungan bagi Partai ‘ciptaan’ Purnawirawan Jenderal Wiranto. Bermula ketika satuan tugas (Satgas) KPK membuntuti sekretaris pribadi Dewie Yasin Limpo, Rinelda Bandaso,

ketika tengah bertemu dengan seorang pengusaha dari PT Abdi Bumi Cendrawasih, Setiadi.

“Setelah terjadi serah terima antara SET dan HAR kepada RB, kemudian dilakukan penangkapan di sebuah rumah makan,” ujar pimpinan KPK, Johan Budi.

Pertemuan antara Rinelda dan Setiadi ternyata adalah rangkaian suap untuk Dewi Yasin. Di sana Setiadi kedapatan memberikan uang sejumlah US\$177.700 kepada Rinelda yang sebenarnya ditujukan untuk Dewi Yasin. Tak lama berselang penerimaan uang suap itu, Tim Satgas KPK berhasil meringkus Dewi Yasin di Bandara Soekarno-Hatta.

Pimpinan KPK menjelaskan, penyuapan dilakukan agar Dewi sebagai anggota DPR memasukkan proyek pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, ke dalam pembahasan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara tahun 2016.

Atas perbuatannya, Dewi Yasin, Bambang, dan Rinelda sebagai penerima dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 KUHP.

Setelah Nasdem dan Hanura, kini giliran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ketiban sial. Tak tanggung-tanggung, sasarannya langsung tertuju ke sosok Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, secara mengejutkan masuk ke dalam agenda pemeriksaan yang dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Cak Imin diminta oleh KPK untuk bersaksi sehubungan dengan kasus dugaan korupsi di Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sekarang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Sosok politikus muda itu memang tidak asing di Kemenakertrans. Pasalnya, selama periode 2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden, Cak Imin-lah yang menduduki jabatan sebagai Menakertrans.

Dalam kasus dugaan korupsi yang sudah menersangkakan mantan Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans Jamaludin Malik itu, nama Cak Imin diduga sebagai salah satu pihak yang ikut ‘menikmati’ uang haram itu. Cak Imin “menikmati” uang itu saat Kemenakertrans membangun sarana dan prasarana berupa gedung perkantoran di lahan Transmigrasi di daerah Kalimantan.

Akan halnya PDIP. Salah satu kadernya yakni Tri Rismaharini tanpa ada angin dan badai, ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dalam pemindahan Pasar Turi, Surabaya. Proses hukum di kasus Risma sempat membuat bingung. Pasalnya, Kepolisian membantahnya, namun di lain pihak Kejaksaan membenarkan.

Bermula dari Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polda Jatim yang diterima oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim, Romi Arizyanto, menginformasikan bahwa kader PDIP tersebut telah berstatus tersangka.

“Dari SPDP yang kami terima, ibu Risma melanggar pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang sudah tersangka,” kata Romy

Hal ini diamini Jaksa Agung, HM Prasetyo. Bahkan Jaksa dari Partai Nasdem itu justru mempertanyakan sikap Polda yang menyangkal status Risma. “Kalau Kapolda menyatakan tidak, ya aneh. Saya bahkan menerima SMS (dari Kejati Jatim), ada nomor SPDP (Risma),” kata dia.

Tak ingin kehilangan muka, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti membantahnya. Ia mempertanyakan ada urusan apa Kejaksaan mengumumkan Risma sebagai tersangka? “Mengapa kok baru sekarang disampaikan (penetapan tersangka Risma) kepada media oleh pihak Kejaksaan. Ini yang menimbulkan ramai di media,” kata dia.

Klimaksnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memerintahkan agar Polda Jawa Timur mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk Risma. Menurut beberapa kalangan, langkah itu diambil mengingat potensi kericuhan menjelang Pilkada. Seperti diketahui, Risma merupakan calon Wali Kota Surabaya.

Jauh sebelum kasus Risma

bergulir, sebenarnya politisi PDIP, Adriansyah (yang juga anggota DPR saat itu) lebih dahulu tertangkap KPK. Mantan Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan itu diduga menikmati uang suap dari Direktur PT Mitra Maju Sukses, Andrew Hidayat. Adriansyah mengakui uang suap tersebut digunakannya untuk membiayai pelaksanaan Kongres PDIP.

“Waktu kongres, banyak kader saya yang ikut, sekitar 100 orang. Dari Kabupaten dan Kota. Banyak yang minta bantuan ke saya. Itu dasarnya saya minta bantuan kepada Andrew,” kata Adriansyah.

Drama di Hari Jumat

Episode pertama. Tanggal 23 Oktober 2015, Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar dijadwalkan KPK untuk menjalani pemeriksaan. Cak Imin dipanggil untuk jadi saksi atas tersangka Jamaludin Malik, anak buahnya sewaktu menjabat sebagai Menakertrans. Namun, Cak Imin justru mangkir dari panggilan tersebut, dengan alasan tidak dalam kondisi sehat.

“Tadi diperoleh informasi Pak Muhaimin sakit dan diminta ulang jadwalnya,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan
KPK, Johan
Budi beberapa
saat lalu.



Tri Rismaharini



Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrim) Polda Jatim, Kombes pol Wibowo (tengah), Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono (kiri), saat memberikan keterangan pers mengenai penyalahgunaan wewenang dalam jabatan walikota Surabaya Tri Rismaharini di Mapolda Jatim di Surabaya, Jawa Timur (23/10) malam.

Episode ke dua. Di hari yang sama kala senja sedang malu-malu menghiasi cakrawala. Tiba-tiba saja, Mantan Sekjen Nasdem mengenakan rompi berwarna orange bertuliskan tahanan KPK. Ya, Rio Capella sejak sore itu mesti merasakan dinginnya tembok penjara.

Padaahal, saat itu Rio baru menjalani pemeriksaan perdana setelah dijadikan tersangka. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, Rio Capella masuk ke dalam mobil tahanan. Selama 20 hari ke depan,



pria yang sempat menduduki jabatan sebagai Ketua Umum Partai Nasdem itu, akan tinggal di Rutan KPK.

Epidode ke tiga, Juga pada hari yang sama 23 Oktober 2015. Nan jauh di Surabaya, terdengar kabar tentang politisi PDIP yang juga calon Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang dalam pemindahan Pasar Turi. Penetapan tersangka oleh Polda Jawa Timur, namun diumumkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Episode ke empat. Pada 23 Oktober 2015 ketika matahari sudah meninggalkan ufuk. Malam hari itu suasana kantor KPK yang mulai lengang tiba-tiba dikagetkan oleh munculnya Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Bos Media Grup itu, tercatat

menginjakkan kaki sekitar pukul 19.45WIB. Ia mengaku kedatangannya, guna menjalani pemeriksaan KPK. Sebenarnya, Surya dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Senin, 26 Oktober 2015.

“Senin itu ada acara yang betul-betul sudah direncanakan jauh hari. Saya memohon kalau bisa dilaksanakan pemeriksaan atau pun meminta keterangan dari saya malam ini jauh lebih baik,” begitu alasan Surya Paloh.

Alhasil ia pun menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tiga jam di KPK. Selama itu, Penyidik KPK mencecar dirinya soal pertemuan di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta.

Pertemuan yang dihadiri oleh Surya Paloh, Gatot Pujo, Wakil Gubernur Sumut, Tengku Erry

Nuradi dan OC Kaligis, disinyalir menjadi titik awal suap-menyuap antara Gatot dan Rio Capella. Bahkan, kuasa hukum Gatot, Yanuar Wasesa mengungkapkan bahwa suap antara Gatot dan Rio Capella terjadi pasca pertemuan tersebut.

“Masalah pak Gatot, Patrice Capella, pertemuan yang ada di DPP Nasdem itu digali di situ dengan sedetil-detilnya dan dijawab juga dengan semua yang kita pahami. Artinya bahwasanya apa yang dilakukan KPK pada malam hari ini, saya yakin dan percaya bisa memaripurnakan agar masalah ini cepat selesai,” terang Surya Paloh.

Tersangkutnya politisi dari partai yang kini berkuasa sudah barang tentu menambah citra buruk bagi Pemerintahan Joko Widodo. Terlebih itu terjadi ketika usia pemerintahan baru menginjak satu tahun. Karena disadari betul bahwa partai penguasa saat ini merupakan mesin politik pemerintah.

Perlu diingat pula, partai-partai ini secara otomatis ikut menyepakati janji pemerintah Jokowi-JK dalam Nawacita. “Ini semakin memperburuk citra partai pengusung pemerintah, apalagi setahun pemerintahan Jokowi-JK,” ujar Koordinator Badan Pekerja di Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan.

Ia menuturkan, kasus korupsi yang melibatkan kader tidak bisa dilepaskan dari Partai Politik. Artinya sambung dia, uang hasil tindak kejahatan itu pastilah masuk dalam kas partai politik.

“Walau kader yang korup tidak akan setor uang hasil korupsi secara langsung ke kas partai, tapi mereka bisa saja diminta atau berinisiatif membiayai kegiatan partai,” kata dia.

Terlebih menurutnya di partai, loyalitas kerap diukur dari sumbangan yang diberikan oleh kader. “Cara mereka korupsi?, menggunakan kewenangan terkait *budgeting*, pengawasan, maupun legislasi,” kata dia.

Sungguh, Jumat itu adalah hari paling bersejarah untuk partai-partai pendukung pemerintah. ● Nebby Habiburrahman

Menelusuri Jejak Hitam Pelindo II



Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka (tengah) bersama Wakil Ketua Pansus Aziz Syamsyuddin (kanan) dan Teguh Juwarno (kiri) memimpin rapat dengar pendapat dengan mantan direksi Pelindo II di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/10).

Panitia Khusus Pelindo II terus mendalami dugaan penyimpangan dalam pengelolaan BUMN yang dipimpin oleh Richard Joost Lino tersebut. Sejumlah nama sudah dipanggil oleh Pansus yang diketuai oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Rieke Diah Pitaloka. Sebut saja Kabareskrim Polri Komjen Anang Iskandar, mantan Kabareskrim Komjen Budi Waseso dan juga Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf juga sudah memberikan keterangannya kepada Pansus.

Terakhir Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah menyerahkan setumpuk data kepada Pansus untuk mendalami dugaan dan potensi pelanggaran hukum dan pengelolaan perusahaan yang bergerak dibidang bongkar muat kapal ini.

Dari dokumen yang didapatkan Majalah Aktual dari BPK diketahui sejak tahun 2010-2014 sejumlah temuan didapat dalam audit BPK. Setidaknya ada 10 temuan yang dipaparkan dalam laporan bertanggal 5 Februari 2015 dengan Nomor : 10/AUDITAMA VII/

PDDT/02/2015 tersebut.

Berikut hasil temuannya:

1. Ketidaksesuaian Hasil Pekerjaan Pengembangan Layanan Information and Communication Technology (ICT) dengan RKS atas pekerjaan dengan PT. Telkom.
2. Pengadaan Alat bongkar muat pada tahun 2012 untuk 2 (dua) unit Quayside Container Cranes (CCC) Twinlift untuk pelabuhan Palembang dan Pontianak Tidak cermat.
3. 3 (tiga) unit Quayside Container Cranes (CCC) Twinlift untuk pelabuhan Panjang, Palembang dan Pontianak Tidak sesuai Ketentuan dan terdapat kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebesar USD 770.000,-.
4. 10 unit Mobile Crane tidak sesuai dengan ketentuan dan kekurangan penerimaan sebesar

Rp. 456.000.000,- atas denda maksimal kurang dari ketentuan.

5. Perawatan peralatan bongkar muat di tiap cabang PT. Pelindo II tidak seragam dari sisi pelaporan sehingga berpotensi biaya perawatan tidak terkendali dan perawatan tidak sesuai kontrak/standar, serta anak perusahaan menyerahkan sepenuhnya pekerjaan pada subkontraktor di Palembang dan Pontianak.
6. Direksi terkait pengenaan Cost of Fund terhadap pemberian uang muka pekerjaan pembangunan terminal petikemas Kalibaru tahap I Pelabuhan Tanjung Priok membebani nilai pekerjaan sebesar Rp. 75.943.438.929,42
7. Proyek pembangunan terminal petikemas Kalibaru Utara memboroskan keuangan perusahaan sebesar Rp. 272.006.512.057,60. Pengerjaan Formwork A-Jack yang digunakan untuk produksi A-Jack memberatkan keuangan perusahaan sebesar Rp.22.374.841.126,91
8. Pekerjaan pembangunan terminal Kalibaru tahap I tidak sesuai dengan Kontrak.
9. Perpanjangan dermaga dan perluasan lapangan car terminal serta pembangunan jalan akses kalibaru yang dilaksanakan oleh PT. Wijaya Karya (Tbk) dilakukan penghentian kontrak dan pekerjaan dilanjutkan oleh PT. Waskita Karya, namun memasuki periode kontrak kritis karena terjadi deviasi sebesar 53,697 %.
10. Pembuatan Crane (HMJ/54t dan ke bawah) berpotensi merugikan keuangan negara cq. PT. Pelindo II (persero) dari kontrak yang diproses pengadaannya tidak sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan perusahaan (sampai dengan saat ini telah dikeluarkan uang muka senilai USD 3.110.800,-). Wahyu Romadhony

Rancangan Jadwal Acara Rapat-rapat Pasus Panitia Angket DPR RI Tentang Pelindo II

No	Tanggal/Hari	Waktu	Pihak yang diundang
1	Selasa, 20 Oktober 2015	Pukul 16.00 - Selesai Pukul 19.30 - Selesai	Serikat Pekerja JICT Komisaris Jendral Budi Waseso
2	Rabu, 21 Oktober 2015	Pukul 09.00 - Selesai Pukul 13.00 - Selesai Pukul 19.30 - Selesai	Brigjen Pol (Pur) Víctor Simanjuntak Rizal Ramli Kapolri
3	Kamis, 22 Oktober 2015	Pukul 09.00 - Selesai Pukul 13.00 - Selesai Pukul 16.00 - Selesai Pukul 19.30 - Selesai	Jaksa Agung BPK RI Deutch Bank dan FRI PPATK
4	Jum'at, 23 Oktober 2015	Pukul 09.00 - Selesai Pukul 14.00 - Selesai	Kunjungan Lapangan Pelindo II Rapat Internal Panitia Angket

No	Nama Perusahaan	Keterangan	Perkiraan Kerugian	Klasifikasi Dugaan Pelanggaran
1	PT. Mcinsey Indonesia PT. Price Waterhouse Coopers	Kelebihan Pembayaran Pengadaan Jasa Konsultasi	Rp. 21.466.083.490 dan USD 71.990	Berpotensi Pidana
2	Rothschild (Singapore) Limitted	Pemengan jasa konsultasi penasihat keuangan independen pembangunan Terminal Kalibaru	USD 350.000	Berpotensi Pidana
3	PT. Sucofindo II	Pengadaan Pekerjaan PEncatatan Kebenaran ukuran barang / volume Kalibaru	Rp. 16.044.942.100	Berpotensi Pidana
4	PT. LEN Industri (Persero)	Pelaksana pengadaan dua unit crane simulator dan satu unit ship simulator	Nilai Kontrak Rp. 11.090.923.000 Dugaan Kerugian Rp. 1.005.683.650	Berpotensi Pidana
5	PT. Wijaya Karya (Persero) (Pengawas pekerjaan: PT. Hasfarm Dian Konsultan)	Pekerjaan pembangunan gedung pusat pelatihan kepelabuhan PT. Pelindo II diCiawi	RP. 175.210.000.000	Pelanggaran Administrasi
6	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Persero)	Pekerjaan pengembangan layanan information adn communication technology (ICT)	RP. 105.093.610.134	Berpotensi Pidana
7	Wuxi Hua dong, Heavy Machinery, Co, Ltd.	Pengadaan alat bongkar muat untuk dua unit Quayside Container Cranes (QCC)	USD 11180.000	Pelanggaran Administrasi Berpotensi Pidana
8	Wuhan Machinery Plant, Co, Ltd	Pengadaan alat bongkar muat gantry Luffing Crane, Gantry Jib Crane, Fixed jib Crane	USD. 29.203.300 dan RP 1.650.000.000	Berpotensi Pidana
9	Wuxi Hua dong Heavy Machinery, Co, Ltd.	Pengadaaan 3 unit Quaside Container Cranes (QCC) Twinlift Tahun 2010	Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan US777.700,-	Berpotensi Pidana
10	PT. Lloyd Register Indonesia	Jasa Konsultasi Pengawasan pengadaan 3 unit QCC	Rp. 4.500.000.000	Pelanggaran Administrasi Berpotensi Pidana
11	Guangxi Narishi Century equipment Co, Ltd.	Pengadaan 10 mobile crane	Rp. 456.000.000	Pelanggaran Administrasi
12	PT. Pembangunan Perumahan (Persero)	Pengenaan Cost of Fund terhadap uang muka pekerjaan pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru Utara tahap I	Rp. 75.943.438.929	Berpotensi Pidana
	PT Pembangunan Perumahan (Persero)	Mega Proyek pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru Utara tahap I	Nilai Kontrak Rp. 9.029.674.888.708 Dugaan kerugian dalam penyusunan HPS Rp. 269.706.512.057	Berpotensi Pidana
			Dugaaan kerugian dalam pekerjaan Formwork A-Jack yang digunakan untuk produksi A-Jack Rp. 22.374.841.126	Potensi Pidana
13	PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk.	Pekerjaan Perpanjangan Dermaga dan Perluasan Lapangan Car Terminal serta Pembangunan Jalan Akses Kalibaru	Dugaan Kerugian Rp 12.731.317.927	Potensi Pidana
14	PT. Waskita (Persero) Tbk.	Pekerjaan Perpanjangan Dermaga dan Perluasan Lapangan Car Terminal serta Pembangunan Jalan akses Kalibaru	Dugaan Kerugian Rp. 44.017.292.000	
15	PT. Wihaya Karya (Persero) Tbk.	Markup nilai harga satuan pekerjaan pembesian dan beton dalam kontrak pekerjaan perkuatan dan peninggian lapangan penumpukan, pembangunan jalan RTGC dan perkuatan serta peninggian jalan yang dilaksanakan oleh PT. Wijaya Karya (Persero Tbk. Pada tahun anggaran 2013 kantor cabang pelabuhan.	Dugaan Kerugian Rp. 777.961.581	Potensi Pidana



Pemerintah Berencana Revisi UU Yang Perbolehkan Pembakaran Lahan

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Undang-Undang No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memperbolehkan pembakaran lahan akan direvisi.

“Ya tentu nanti UU itu direvisi karena ternyata memang aturannya dua hektar yang diizinkan tapi dapat menyebabkan kebakaran yang lebih luas lagi,” kata Wapres di Jakarta, Selasa.

Sejauh ini Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 69 ayat 1 (h) menyatakan, bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Namun dalam ayat 2 undang-undang tersebut disebutkan bahwa ketentuan terkait ayat 1 (h), memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Apa yang disebutkan dalam ayat 2 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu, disebut-sebut menjadi celah bagi sejumlah pemerintah daerah yang kemudian memperbolehkan pembukaan lahan dengan pembakaran dengan syarat-syarat tertentu, melalui peraturan gubernur dan izinnya dilimpahkan kepada lurah, camat hingga ketua rukun tetangga.

Seperti dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 15/2010, tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 52/2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat Kalimantan Tengah, pemerintah daerah memberi izin bagi warga setempat untuk membuka lahan dengan cara dibakar.

Pergub ini mempertimbangkan Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua tentang Larangan pada UU tersebut, Pasal 69 ayat (1) huruf (h) menyebutkan adanya larangan untuk membuka lahan dengan cara membakar.

Namun pada Pasal 69 ayat (2) ada pertimbangan lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (h) memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Dalam penjelasan, yang dimaksud kearifan lokal dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal dua hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya. /Nebby-Ant

Kasus Kebakaran Hutan, Kabareskrim: 247 Tersangka Perseorangan 17 Tersangka Korporasi



Kabareskrim Polri Komjen Pol, Anang Iskandar menyatakan, sejauh ini pihaknya tengah menangani 264 kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

“Polri telah menangani 264 laporan terkait pembakaran lahan dan hutan,” ujar dia, di Jakarta, Kamis (26/10).

Ia menuturkan, dari angka tersebut, 105 kasus dalam tahap penyidikan dan dua kasus lain telah P21.

Ia melanjutkan, 247 pihak telah dijadikan tersangka dalam kasus ini. “Dari 247 tersangka, rinciannya 230 orang tersangka kasus perorangan dan 17 orang tersangka kasus korporasi,” ungkap dia.

Ditambahkan dia, 87 orang telah ditahan. Sementara total areal yang masih terbakar lebih kurang 50.183,79 hektar di beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan.

Kabareskrim menambahkan ada 6 perusahaan asing yang tengah disidik kepolisian terkait kasus kebakaran hutan dan lahan Sumatera dan Kalimantan yakni PT ASP (ditangani Polda Kalteng), PT KAL (Polda Kalbar), PT IA (Polda Sumsel), PT PU (Polda Kalsel) serta PT PKM dan PT PU (ditangani Polda Riau). /Nebby-Ant

SDA Beberkan Sejumlah Politikus di DPR Nikmati Sisa Kuota Haji



Bekas Menteri Agama Suryadharma Ali mencak-mencak dalam persidangan, karena kesaksian Anggito Abimanyu yang merupakan bekas bawahannya di Kemenag hanya menyudutkan Partai Persatuan Pembangunan, yang diduga telah menikmati sisa kuota haji diusulkan anggota DPR.

Padahal, menurut Politikus PPP itu sejumlah nama anggota DPR periode 2009-2014 yang mengusulkan sejumlah nama untuk berangkat haji pada tahun 2012.

“Ini meluruskan saja, memang persidangan ini mengarahkan kepada partai politik yang saya pimpin. Saya bertanya kepada saudara, apakah saudara tahu bahwa ada permohonan dari saudara Ibrahim Sakti Batubara (PAN) tanggal 24 September, ini dari DPR,” kata Suryadharma memberi tanggapan atas keterangan Anggito dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (26/10).

Terlebih, lanjut Suryadharma, Ibrahim Sakti saat itu mengusulkan 10 nama untuk bisa menggunakan sisa kuota haji. “Kemudian ada permohonan dari DPR Syofwatillah Mozaib (Demokrat), jadi ada permohonan lima orang.”

Dalam kesaksiannya, Anggito yang pada tahun 2012 masih menjabat Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) tersebut mengaku tidak tahu. “Yang saya tahu Syofwatillah bukan dari PPP. Kemudian ada permintaan dari Firman Soebagyo (Golkar) dua orang. Ini bukan dari PPP. Kemudian ada permohonan dari Ade Komaruddin (Golkar) dua orang yang pasti ini bukan orang PPP,” ujar dia.

Bekas Ketua Umum PPP itu mengatakan, soal permintaan dimasukkan nama calon jemaah haji itu untuk diberangkatkan pada tahun 2012 sangat banyak, bukan hanya dari PPP yang disebutkan Anggito dalam persidangan.

Permintaan juga, kata dia, datang dari pihak lain seperti kantor kepresidenan, kantor wapres, menteri KIB jilid II, pimpinan partai politik dan LSM serta pesantren. “Yang Mulia mungkin jaksa bisa membacakan yang dari PPP,” kata Anggito.

Namun, majelis hakim yang dipimpin Aswijn menengahi dengan menegaskan nama-nama pemohon calon haji dari DPR akan diperlihatkan pada barang bukti yang dipegang Jaksa pada KPK. “Maksud saya begini terkesan bahwa dari PPP itu paling banyak. Jadi dikesankan seperti itu,” kata Suryadharma.

Anggito dalam persidangan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan Jaksa pada KPK. “Dalam pelaksanaannya pengisian kuota bebas nasional tersebut sumbernya sebagian besar dari Suryadharma Ali. Pemanfaatan sisa kuota bebas tersebut berdasarkan pada Kementerian Agama dan diisi atas arahan lisan Menag secara langsung atau melalui Ermalena,” kata Anggito dalam BAP.

Menurut Anggito sebagaimana dalam BAP yang dibacakan Jaksa, Suryadharma menggunakan sisa kuota bebas nasional untuk orang-orang dekatnya. “Sama-sama satu partai, kenalan, dan teman beliau, keluarga,” kata Anggito dalam BAP.

“Ada unsur-unsur subyektifitasnya. Ada dari partai, yang paling banyak dari unsur PPP,” kata Anggito.

Terlebih, lanjut dia, pemanfaatan sisa kuota nasional diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. “Dinyatakan dalam hal pendaftaran dalam hal kuota tidak dipenuhi maka harus dilakukan perpanjangan dan diikuti dengan sisa bebas nasional. Bebas nasional artinya tidak lagi mengikuti nomor urutnya karena sudah tidak ada lagi nomor urut berikutnya,” kata dia. /Wisnu



Kapolri Perintahkan Polda Jatim Segera Terbitkan SP3 Risma

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan tidak ada penyebutan nama tersangka dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), kasus penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan oleh mantan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini terkait pemindahan pedagang kios Pasar Turi.

Dalam SPDP bernomor B/415/V/15/Reskrim yang dikirimkan tanggal 29 September 2015 lalu, kata Kapolri, hanya tertulis dugaan tindak pidana itu, dilakukan oleh Risma.

“Di dalam SPDP itu disebutkan, (Risma) tidak sebagai tersangka. Di situ ditulis diduga dilakukan oleh Tri Rismaharini,” kata Badrodin di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Senin (26/10).

Badrodin menuturkan, penyidik Ditkrimum Polda Jawa Timur juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas perkara tersebut. Termasuk memeriksa anak buah Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan itu.

“Kemudian setelah selesai dilakukan pemeriksaan, pada tanggal 25 september 2015, itu dilakukan gelar perkara. Tetapi tidak ditemukan adanya unsur pidana,” tegas Badrodin.

Karena itu, Badrodin meminta kepada penyidik Ditkrimum Polda Jatim untuk segera mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) untuk kasus itu.

“Sudah saya perintahkan SP3. Saya sudah perintahkan segera (diterbitkan),” tuntas bekas Kapolda Jawa Timur itu. /Nebby

Jalan Terjal Freeport

Bahwa setelah UU Nomor 4/2009 diberlakukan, maka tidak akan ada lagi perpanjangan KK PT Freeport Indonesia, baik saat sekarang maupun 2019 mendatang. Sebelum memikirkan perpanjangan kontrak, status Freeport harus diubah dulu dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sehingga posisinya tidak lagi sejajar dengan negara. Kalau tidak mau silakan angkat kaki dari Papua. **(Anggota Poksi VII Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Adian Napitupulu)**

Freeport McMoRan Inc sempat membuat geger Tanah Air ketika mengklaim bahwa pemerintah Indonesia telah sepakat untuk memperpanjang kontrak Freeport Indonesia setelah kontraknya habis pada 2021. Berhembus kabar juga, Kementerian ESDM siap mengubah regulasi demi mempermudah sekaligus mengakomodir keinginan perpanjangan kontrak perusahaan tambang asal negeri 'Paman Sam' itu.

Chairman of Freeport-McMoRan Inc, James R. Moffett dalam laman resmi mengatakan dia senang karena pemerintah Indonesia akan melanjutkan kerja sama pertambangan milik Freeport di Tanah Papua.

"Kami diizinkan dengan jaminan kepastian hukum dan fiskal dari Pemerintah Indonesia untuk melanjutkan kerja sama ini," kata Moffett seperti diberitakan dalam situs Freeport-McMoRan.

Pengumuman tersebut juga memuat kutipan Menteri ESDM Sudirman Said yang memberi isyarat terkait kepastian izin Freeport Indonesia lantaran adanya perkembangan investasi yang dinilai menguntungkan.

"Kami sangat terbuka dengan keberlanjutan investasi Freeport di Papua. Ini sangat menambah *benefit* yang meningkatkan ekonomi lokal dan *benefit* nasional," kata Sudirman.

Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pertambangan

Minerba, perpanjangan izin kontrak karya dapat dilakukan secepatnya dua tahun sebelum masa kontrak berakhir. Nah, kontrak Freeport Indonesia sendiri berakhir pada 2021. Sehingga pembahasan perpanjangan izin kontrak seharusnya baru dapat dilakukan paling cepat 2019.

Setelah menuai berbagai kecaman, Pemerintah pun memberikan klarifikasi. Lewat Kementerian ESDM, pemerintah dengan tegas membantah untuk beri lampu hijau terhadap Freeport yang ingin melakukan perpanjangan sebelum 2019.

"Tidak ada kata-kata perpanjangan kontrak. Tetapi, rumusan itu menjadi solusi bagi persiapan kelanjutan investasi Freeport dalam jangka panjang," kata Menteri ESDM Sudirman Said beberapa saat lalu.

Sudirman mengklaim bahwa apa yang disepakatinya dengan pihak Freeport telah sesuai dengan arahan Presiden

Joko Widodo.
Kesepakatan antara Freeport dengan



Pemerintah pun diklaimnya sebagai kesepakatan strategis yang didasari pada *mutual respect* kedua belah pihak. Untuk itu, dirinya meminta kepada para spekulasi untuk berhenti membuat kabar-kabar yang tidak benar.

"Para pihak yang tidak paham harap menghentikan spekulasi tentang perpanjangan kontrak karena itu sama sekali tidak benar. Terima kasih," ujar dia.

Selain itu, Presiden Jokowi juga ikut membantah hal tersebut. Ia menegaskan jika saat ini bukan waktu yang tepat bagi pemerintah membicarakan masalah perpanjangan kontrak karya Freeport.

"Undang-undangnya jelas. Perpanjangan kontrak hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak



Sudirman Said



Anggota Poksi (Kelompok Komisi) VII Fraksi PDI Perjuangan DPR RI (dari kanan) Ardian Napitupulu, Mercy Christy Barends, Dony Maryadi, Yulian Gurhar, dan Tony Wardoyo memberikan pernyataan pers tentang operasi PT Freeport di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (23/10).

subjektif pada saat diberlakukannya UU Nomor 1/1967 dan UU Nomor 11/1967 yang mendasari lahirnya KK antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia sudah tidak relevan dengan situasi saat ini yang menuntut refleksi kritis untuk mereposisi peran negara menjadi superlatif atas kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang selama ini dalam bentuk KK.

“Bahwa setelah UU Nomor 4/2009 diberlakukan, maka tidak akan ada lagi perpanjangan KK PT Freeport Indonesia, baik saat sekarang maupun 2019 mendatang,” kata Adian di gedung DPR RI belum lama ini.

Ia menambahkan, Pemerintah dalam hal ini kementerian ESDM harus tegas dan konsisten melaksanakan amanat UU Nomor 4/2009 tentang minerba. Freeport pun diminta agar tunduk dan patuh terhadap UU yang berlaku di Indonesia.

“Sebelum memikirkan perpanjangan kontrak, status Freeport harus diubah dulu dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sehingga posisinya tidak lagi sejajar dengan negara. Kalau tidak mau silakan angkat kaki dari Papua,” tegas Adian.

Divestasi Freeport Berpotensi Khianati Konstitusi

Tidak hanya soal perpanjangan kontrak yang menjadi sorotan, rencana divestasi Freeport Indonesia juga turut menuai beragam kecaman. Pasalnya, setelah Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa tidak ada alokasi anggaran Pemerintah untuk membiayai divestasi tersebut, lantas mencuatlah wacana divestasi melalui skema Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

karya habis, yaitu pada 2019,” tegas Jokowi.

Selain itu pemerintah tetap menekankan lima persyaratan yang harus dipenuhi oleh Freeport jika ingin mendapatkan perpanjangan kontrak pada 2019 nanti. Kelima syarat tersebut adalah pertama, Freeport dituntut terlibat aktif dalam pembangunan di Tanah Papua. Kedua, Freeport wajib menggunakan lebih banyak konten lokal dalam proses produksi. Ketiga, Freeport mendivestasi sahamnya. Keempat, kejelasan tentang besaran royalti yang harus disetor ke Pemerintah. Kelima, perusahaan tambang itu berkewajiban membangun *smelter* untuk memproses hasil tambang emas di Indonesia.

Namun di kesempatan lain, Staf Khusus Menteri Energi Sumber

Daya Mineral (ESDM), Said Didu mengungkapkan bahwa apa yang telah dilakukan Menteri ESDM sudah melalui tahap diskusi dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Jadi bukannya jalan sendiri, tapi kami sudah mendapat perintah untuk bernegosiasi tanpa melibatkan banyak pihak, karena Presiden khawatir dengan banyaknya kepentingan dalam perpanjangan izin ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Poksi VII Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Adian Napitupulu menyatakan bahwa Kontrak Karya (KK) Freeport Indonesia sudah tidak boleh lagi diperpanjang baik saat ini maupun pada 2019 atau dua tahun sebelum berakhirnya kontrak.

Menurutnya, kondisi objektif dan



Bahkan secara gamblang Menteri ESDM Sudirman Said pun mengaku mendukung wacana ini.

Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika menyatakan jika skema tersebut jelas akan melanggar UU Minerba Nomor 4 tahun 2009. “Masalah Freeport ini saya kalau kasih judul ‘Freeport yang Repot’, karena masalah divestasi itu kan ada di UU, lalu ketentuannya harus dilakukan divestasi ke Pemerintah, kalau seandainya Freeport belum akan menawarkan divestasi yang sudah diatur UU, itu melanggar UU,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa UU diciptakan untuk mengatur dan wajib dipatuhi oleh siapapun,

termasuk Freeport. Ia mengimbau agar Pemerintah bertindak tegas dan jangan mau dikalahkan oleh Freeport.

“UU kan tidak bisa dilanggar siapapun di sini, masa negara kalah sama Freeport, dikontrak *gini* bilang begini, masa harus mendapatkan perpanjangan, jangan pakai kata perpanjangan, jadi seolah-olahnya diperpanjang. Kalau masih mau bekerja di Indonesia, harus ikut UU, perpanjangan kan bukan hak dia,” terang dia.

Menurutnya, IPO itu bukan merupakan bentuk divestasi yang tercantum di kontrak. Pasalnya, divestasi yang diatur dalam kontrak adalah penawaran langsung kepada

Pemerintah. “Sekali lagi, kalau IPO itu bukan divestasi, bukan yang divestasi yang diatur dalam kontrak. Kalau IPO bisa asing yang beli, divestasi kan tujuannya penguasaan oleh nasional semakin menguat,” jelas dia.

Padahal di sisi lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Aneka Tambang (Antam) mengaku siap baik secara permodalan maupun segi teknis untuk mencaplok divestasi saham Freeport Indonesia sebesar 10,46 persen. Sejumlah pengamat mengkhawatirkan divestasi Freeport justru akan diborong pihak asing jika pelepasannya dilakukan dengan skema IPO, sehingga kesempatan negara untuk menambah porsi



Rizal Ramli

Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika (tengah) bersama perwakilan kelompok fraksi (poksi) Komisi VII bergandengan tangan sesuai melakukan konferensi pers mengenai PT Freeport Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (27/10).

kepemilikan tambang emas tersebut akan hilang begitu saja.

Hal itu pun disayangkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Dirinya mengaku geram dengan Freeport yang hingga saat ini belum juga melakukan divestasi. Hal itu disebabkan adanya pejabat di Indonesia yang masih bermental *inlander* atau takut dengan intervensi pihak asing, bahkan beberapa pejabat negara juga kerap mudah disogok.

“Freeport selalu cari alasan untuk tidak divestasi. Macam-macam alasannya. Kenapa berani begitu? Mohon maaf, pejabat kita gampang disogok. Sebenarnya saya tidak perlu

minta maaf juga,” sindirnya.

Rizal pun mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang dengan tegas memberikan syarat Freeport untuk melakukan divestasi sebelum perpanjangan kontrak sudah benar. Terlebih, terkait kontrak, Freeport juga ditegaskan untuk tunduk kepada UU yang berlaku. Ia berharap, Pemerintah bisa dengan kompak memojokkan posisi Freeport harus dengan memberi syarat-syarat yang sedianya dapat memberikan keuntungan lebih banyak untuk Indonesia.

“Tapi sayang ada Menteri *keblinger* yang maunya (negosiasi) sekarang. Pasti Freeport tandatangan kalau dipepet. Karena mereka bisa rugi. Tapi mental kita masih mental *inlander*. Kita sudah 70 tahun merdeka masih *inlander*. Sama orang asing aja takut,” kata Rizal.

Performa Sudirman Said Dikecam Barisan Relawan Jokowi

Setelah genap satu tahun pemerintahan Jokowi-JK, Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP)

mengkritisi kinerja Menteri yang bergerak di bidang ekonomi, salah satunya yang disoroti adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said.

Ketua Umum BaraJP, Sihol Manullang mengatakan, kinerja Sudirman Said saat ini banyak disorot publik karena kebijakannya di sektor energi, seperti permasalahan PT Freeport Indonesia yang saat ini dinilai malah menimbulkan banyak polemik.

“Disinilah para menteri harus membantu Jokowi. Negeri ini akan bangkrut jika semua menteri bertindak dan berpikir seperti Menteri Perlindungan Freeport Sudirman Said,” kata Sihol.

Menurutnya, revolusi mental harus bisa dimaknai secara kreatif dan harus dimaknai sebagai kesadaran kembali. Termasuk dalam menyikapi masalah Freeport. “Sejak tahun 1967 negara kita hanya menerima royalti 1 persen sedang di berbagai negara 6-7 persen,” ujarnya.

Padahal, lanjut dia, di kuartal I 2015, produksi emas Freeport mencapai 225 ribu troy ons. Sedangkan, tahun ini Freeport juga telah memproduksi 1,35 juta troy ons. Jumlah ini, adalah 93,6 produksi emas Freeport di seluruh dunia.

“Lalu masyarakat Papua dapat apa? Papua harus kita anggap sebagai kampung halaman kita sendiri. Salim Kancil di Lumajang menjadi perhatian nasional, padahal ribuan orang di Papua mengalami nasib sial yang sama. Namun, tidak menjadi opini nasional,” terangnya.

Dikatakannya, kondisi saat ini ibarat dalam permainan sepak bola, Menteri ESDM Sudirman Said telah melakukan *off side*, dan juga telah memperoleh kartu kuning.

“Pelatih sepak bola yang baik, tentu akan mempertimbangkan untuk mengganti pemain yang sudah dua kali melakukan *off side*. Kepercayaan rakyat dengan sendirinya akan terbangun dengan konsistensi ucapan, rencana, janji dengan realita,” tutupnya. ◻

Dharu Akbar-Arbie Marwan

Indonesia Akan Bergabung ke Trans Pacific Partnership

Presiden Indonesia Joko Widodo setelah berbicara dengan Presiden AS Barack Obama, mengatakan bahwa Indonesia berniat untuk bergabung dengan perdagangan Trans Pacific Partnership (TPP). Sebelumnya diketahui, Amerika Serikat telah tergabung ke TPP diantara 11 negara lainnya.

“Kami adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia akan bergabung dengan TPP,” kata Jokowi melalui seorang penerjemah di AS, Senin (26/10) waktu setempat.

Perwakilan Dagang AS Michael Froman mengatakan Amerika Serikat akan terus berbagi informasi tentang TPP, yang akan menetapkan standar umum tentang berbagai isu, mulai dari hak-hak pekerja hingga perlindungan kekayaan intelektual.

“Seperti yang telah kami katakan dari awal, TPP dimaksudkan untuk menjadi sebuah platform terbuka yang negara-negara lain mampu dan bersedia untuk memenuhi standar,” katanya pada pertemuan puncak bisnis yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang AS

Lebih lanjut Forman mengatakan, Indonesia harus mengatasi hambatan seperti konten lokal dan persyaratan kemasan lokal, menghilangkan pembatas impor dan ekspor serta melindungi hak kekayaan intelektual.

Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin tersebut juga membahas perubahan iklim, mengatasi kebakaran hutan dan memperkuat keamanan maritim.

Sebelumnya Pemerintah Indonesia mengatakan bahwa Joko Widodo akan mempersingkat kunjungannya di AS, untuk kembali ke Indonesia dan mengatasi “krisis kabut asap” yang disebabkan oleh kebakaran hutan.

Jokowi mengaku, kebakaran hutan di Indonesia tidak terlepas dari efek perubahan iklim. /Ismed Eka



Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama (kanan) di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, Senin (26/10).

Jokowi Kunjungi AS, Kontrak IDD Chevron Bakal Diperpanjang

Indonesia memikirkan untuk memperpanjang kontrak perusahaan migas asal AS Chevron setelah pertemuan dilakukan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Executive VP Upstream Chevron James Johnson.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said setelah “one on one meeting” antara Presiden Jokowi dan jajarannya dengan sejumlah petinggi Chevron di Blair House Washington DC, mengatakan Chevron sebagai perusahaan yang telah beroperasi selama 90 tahun menyampaikan keinginannya untuk melanjutkan komitmen investasi di Indonesia.

“Di Indonesia mereka mempunyai 40.000 karyawan yang 90 persen adalah WNI. Mereka mempunyai komitmen untuk membangun di Indonesia,” kata Sudirman Said, Senin (26/10).

Chevron, kata Said, memiliki proyek yang sedang disiapkan khusus untuk Indonesia yakni Indonesia Deepwater Development (IDD).

Proyek tersebut merupakan proyek yang penting bagi Indonesia berupa proyek laut dalam yang dikembangkan oleh Chevron.

“Karena situasi minyak kurang baik dan tiga POD sudah direvisi,” katanya.

Ia menekankan dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menegaskan perlunya berpikir jangka panjang karena kehadiran Chevron yang sudah cukup lama di Indonesia.

/Ismed Eka-Ant

Pulang dari AS, Jokowi Bawa "Oleh-Oleh" USD20 Miliar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan membawa pulang komitmen investasi lebih dari 20 miliar dolar AS dari kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat (AS).

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi dalam jumpa persnya, di Blair House Washington DC, Minggu (25/10) malam, mengatakan soal ekonomi menjadi prioritas dalam kunjungan Presiden Jokowi ke AS.

"Lebih dari 20 miliar dolar AS dari 19 perusahaan bermacam sektor yang akan dikerjasamakan," katanya.

Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan dari sekian banyak *deal business* yang akan diumumkan atau ditandatangani, prosesnya sudah berjalan lama.

"Ada beberapa yang prosesnya sudah sangat lama, terutama yang non energi umumnya sudah cukup matang tinggal finalisasi. Kedatangan Presiden menjadi momentum bagi mereka," katanya.

Pada Senin (26/10) pukul 09.50 waktu setempat, Presiden Jokowi dan rombongan akan menuju Lee Dining Room, Blair House, untuk agenda One on One Business Meeting.

Suhu di luar ruangan diperkirakan akan berkisar 7-16 derajat celsius mengantarkan Presiden Jokowi untuk bertemu pengusaha AS di antaranya CEO Conoco Phillips Ryan Lance, Vice Chairman General Electric John Rice, CEO Millenium Challenge Corporation Dana Hydr, dan Executive VP Upstream Chevron James Johnson.

Selanjutnya dilakukan pengumuman dan penandatanganan *business deals* di Lee Anderson Room di antaranya yang akan diumumkan yakni antara Pertamina dengan Corpus Christie Liquefaction, ekspansi Phillip Morris, investasi Cargill, ekspansi Coca Cola di Bekasi dan Surabaya, Saka Energy dengan

Swift Energy, PLN dengan General Electric, Universitas Udaya dengan SkyChaser Energy.

Sedangkan *business deals* yang akan ditandatangani yakni antara PT PLN dengan UPC Renewables, PT PLN dengan Caterpillar, PT PLN dengan General Electric, PT Indonesia Power dengan General Electric, PT Kereta Api dengan General Electric (LoI), Perum PERURI dengan Crane Currency, BNI Syariah dengan Master Card, Cikarang Listrindo dengan General Electric, Kilat Wahana Jenggala dengan Hubbell Power Systems, PT Pertamina dengan Bechtel Corporation, dan *self-signing* pembuatan fasilitas Cylinder Head Caterpillar.

Pada pukul 17.15 Presiden Jokowi akan menuju Kantor US Chamber of Commerce.

Saat tiba, Presiden akan disambut oleh Presiden US Chamber of Commerce Tom Donohue, Presiden US ASEAN Business Council Alex Feldman, dan Presiden UNISINDO Ambassador David Merrill.

Pada pukul 18.00 Presiden RI mengadakan Business Roundtable Discussion dengan para pengusaha AS di Library Room Kantor US Chamber of Commerce.

Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan perusahaan AS yakni Nike, General Electric, ConocoPhillips, Phillip Morris International, Caterpillar, Chevron, Pfizer, Chapman Taylor, dan MetLife serta didampingi oleh US Chamber of Commerce, USINDO, dan USABC.

Acara selanjutnya resepsi oleh US Chamber of Commerce di Daniel Webster Room Kantor US Chamber of Commerce dilanjutkan dengan jamuan makan malam oleh US Chamber of Commerce untuk menghormati Presiden RI di Hall of Flags Kantor US Chamber of Commerce.

Pada kesempatan itu hadir 250 pengusaha dan pengambil kebijakan Indonesia dan Amerika Serikat.

IMF: Ekonomi China Bisa Tumbuh di Luar Perkiraan

Pejabat senior IMF mengungkapkan Ekonomi China bisa melampaui perkiraan Dana Moneter Internasional dan tumbuh mendekati 7 persen tahun ini meskipun prospek jangka menengah tak menentu.

Changyong Rhee, direktur Asia dan Pasifik Departemen IMF, mengatakan Potensi pengaruh Cina ke negara regional lainnya, lebih besar dari yang diperkirakan.

Tingkat pertumbuhan China sebesar 6,9 persen antara Juli dan September berarti China bisa mengalahkan perkiraan IMF sebesar 6,8 persen pada 2015, kata dia.

"Sebenarnya saat ini keseluruhan tingkat pertumbuhan 2015 mungkin dekat 7 (persen) dan di atas 6,8 persen," katanya di sebuah acara di Carnegie Endowment for International Peace dilansir Aktual dari Reuters, Kamis (29/10).

Rhee mengatakan IMF tidak mepermasalahkan pertumbuhan bagi China namun ia lebih mempedulikan tentang potensi dampak pertumbuhan lebih lambat di negara-negara lain di kawasan itu, dikarenakan ikatan perdagangan yang lebih dekat.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, perhitungan IMF menunjukkan sebuah pertumbuhan satu persen dari China bisa mengambil lebih dari 0,3 persentase poin dari pertumbuhan Asia secara keseluruhan. /Ismed Eka



Mimpi Dapat Bantu Manusia Hadapi Sakaratul Maut

Barry, pasien berusia 88 tahun dari rumah sakit di New York, Amerika Serikat pada suatu malam bermimpi. Dia merasa saat itu sedang mengemudi di suatu tempat yang tidak pernah dia kenal. Kemudian, Barry mendengar suara almarhum ibunya yang memanggil dirinya, “Tidak apa-apa. Kau anak yang baik. Aku cinta kamu.”

Mimpi seperti Barry adalah mimpi-mimpi yang sering terjadi pada diri kita. Meski tak harus sama seperti mimpi Barry.

Namun, kali ini Barry dan mimpi-mimpinya jadi penting artinya ketika mimpi-mimpinya dijadikan bahan penting sebuah penelitian yang berusaha

mengungkap hubungan mimpi dan kematian. Penelitian ini bermula dari beberapa fakta yang memperlihatkan bahwa menjelang hari-hari kematian, banyak orang seperti memiliki indera ke enam. Apakah itu dalam bentuk visual atau dalam bentuk mimpi. Sebagian besar yang mengalami itu mengatakan penglihatan visual dan mimpi mereka banyak membantu mengurangi ketakutan dalam menghadapi kematian.

Penelitian yang diterbitkan dalam *Journal of Palliative Medicine*, menemukan bahwa memang benar bahwa

penglihatan visual dan mimpi-mimpi itu adalah bagian dari proses manusia menghadapi sakaratul maut. Dan manusia cenderung “lebih melakukan hal positif, realistis, dan melakukan kegiatan bermanfaat” ketika menghadapi kematian.

Hasil penelitian tersebut menyatakan setidaknya setengah dari pasien yang sedang sekarat (sakaratul maut) akan sadar dan mengalami penglihatan visual tertentu, dan “mereka sering menggambarkan diri mereka sebagai sosok yang mendalam,” begitu hasil penelitian



Christopher Kerr

tersebut.

Memang sampai saat ini minat untuk riset di sekitar pengalaman sakaratul maut sangat jarang. Dan sedikit dibicarakan dalam kajian ilmiah dan kajian dunia medik.

"Ini selalu dibicarakan dalam kajian filsafat - Shakespeare, Plato, Alkitab -, tapi 'obat' solusi untuk mengatakan tentang hal itu masih jarang," demikian kata Dr Christopher Kerr, pimpinan medis dari Center for Hospice & Palliative Care, di kota New York, AS bersama peneliti utama studi tersebut.

"Saya ingin fokus terhadap fakta

bahwa ini adalah fenomena yang selalu terjadi selama manusia sekarat. Dan, bahwa ada peluang untuk terapi di dalamnya, karena bagi kebanyakan orang sangat terbantu."

Namun demikian, para ilmuwan lebih cenderung mengabaikan pengalaman-pengalaman ini sebagai hasil dari kebingungan mental (delirium), meskipun pasien dalam studi terbaru yang dilakukan peneliti yang netral tidak menunjukkan tanda-tanda 'delirium'.

Untuk penelitian ini, para peneliti mewawancarai sekitar 59 pasien pria dan wanita (dengan usia

rata-rata 75 tahun), yang menjalani rawat inap di rumah sakit New York, Amerika Serikat.

Para peneliti meminta para peserta menceritakan mimpi terbaru mereka dan visual yang dilihat. Berdasarkan lebih dari 400 hasil wawancara, ilmuwan kemudian menganalisis frekuensi, konten dan signifikansi dari mimpi serta penglihatan. Dan, juga ditambah jumlah waktu yang berlalu antara pasien yang memiliki mimpi dan pasien sekarat.

"Mimpi dan penampakan visual mereka menjadi bahan cerita oleh oleh keluarga mereka," demikian ungkap Dr. James Donnelly, seorang Psikolog dari Universitas Kanisius kepada The Huffington Post dalam surat elektronik-nya.

"Studi kami adalah yang pertama dalam prospektif mewawancarai pasien itu sendiri selama sepekan terakhir mereka dan bukan mengandalkan laporan retrospektif dari anggota keluarga mereka."

Untuk diketahui, sangat mudah untuk membayangkan bagaimana mimpi itu bisa hidup dan lamunan akan memberikan kenyamanan bagi orang yang sedang sekarat. Banyak pasien menjelaskan bagaimana memiliki visual untuk pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui, atau mempersiapkan sebuah "keberangkatan".

Dalam bentuk visual lain, pasien mengungkapkan, bahwa orang yang dicintai atau tokoh agama tertentu mengatakan kepada mereka segala sesuatu yang berbau kebaikan, atau bahwa mereka tidak sendirian.

"Ketakutan seseorang dari kematian sering berkurang sebagai akibat langsung dari (mimpi dan penglihatan, red), dan apa yang muncul adalah wawasan baru ke dalam kematian," demikian penulis penelitian menyimpulkan.

"Dampak emosional begitu sering positif, bermanfaat. Individu secara fisik mati, tetapi identitas emosional dan spiritual mereka tetap hadir seperti yang dituturkan oleh mimpi." ◻

Ferro Maulana

Kesimpulan Penelitian:

- 88 persen dari peserta telah mengalami setidaknya satu mimpi atau visual dalam hari, minggu atau bulan menjelang kematian mereka.
- Pengalaman yang bermakna secara pribadi dan emosional yang begitu signifikan.
- Terlepas dari fakta, bahwa hampir setengah dari mimpi atau visual itu terjadi selama tidur, mayoritas pasien mengatakan bahwa mereka merasa dalam dunia nyata.
- Penglihatan yang paling umum terjadi adalah dari keluarga

almarhum dan teman-teman mereka, diikuti oleh visual keluarga dan teman-teman yang masih hidup.

- Visual orang yang sudah meninggal "signifikan lebih membantu" ketimbang jenis lain dari penglihatan yang mereka alami.
- Menjelang ajal, mimpi atau visual dari orang yang sudah meninggal menjadi lebih umum.
- 60 persen dari pengalaman itu tergambarkan sebagai sesuatu yang bermanfaat.

Dualisme Jepang Terhadap Indonesia; Sebelum dan Sesudah Pristiwa 1965

Oleh: Kenang Kelana
Pustakawan di Perpustakaan Kandang Buku

Aiko Kurasawa dalam buku ini memberikan kita paparan soal persepsi dan sikap Jepang terhadap Indonesia sebelum dan sesudah peristiwa politik 1965, sama seperti yang tertulis didalam judul buku ini.

Buku ini diangkat berdasar wawancara terhadap orang-orang yang hidup (dan bersinggungan) pada zaman itu dan kemudian dijadikan rujukan utama dalam buku ini. Aiko mengakui, sempat ada kendala saat ia datang ke Indonesia. Di Bandara Kemayoran saat itu, beberapa buku bahan studinya ditahan selama satu minggu. Ia juga sempat akan dipanggil oleh BAKIN untuk mengetahui apa aktifitas politiknya. Maklum, pada tahun 1968, ia termasuk orang yang diberangkatkan ke Tiongkok sebagai anggota "Student Friendship Group" oleh pemerintah Jepang. Berkat bantuan Kedubes Jepang yang kenal dengan pihak TNI, akhirnya Aiko mendapat izin.

Aiko datang ke Indonesia pada tahun 1972 untuk melakukan studi soal perubahan sosial di Jawa. Disertasi dan studinya sudah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Mobilisasi dan kontrol; Indonesia masa pendudukan Jepang".

Aiko memulai buku ini sejak negara merdeka Indonesia membangun kontak diplomasi dengan Jepang. Hubungan yang sebenarnya dibangun atas dasar kebutuhan dan tuntutan. Di satu sisi Jepang dituntut untuk menyepakati persetujuan mengganti biaya ganti

rugi yang diakibatkan oleh perang—selanjutnya digunakan istilah dana pampasan perang, sementara di bagian lagi ada kebutuhan Indonesia terhadap dana ganti rugi pampasan perang guna menjalankan roda ekonomi di Indonesia.

Komunikasi itu terjadi pada tahun 1951. Negoisasi harga yang harus dibayar berlangsung cukup panjang, karena antara kedua negara sama-sama bersikeras mempertahankan argumen terkait alasan pengajuan harga ganti rugi.

Djuanda Kartawijaya yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri diutus ke Tokyo untuk memulai negoisasi. Indonesia menilai USD17,5 miliar adalah harga yang pantas untuk biaya ganti rugi dan itu belum termasuk ganti rugi korban jiwa akibat perang.

Pada 1957, Perdana Menteri Kishi berkunjung ke Indonesia untuk bicara soal biaya ganti rugi itu. Tercapai kesepakatan yakni sebesar USD177juta, tidak lagi USD17,5 miliar. Namun yang menarik adalah cerita bahwa dalam hitungan Jepang, seharusnya Indonesia dapat angka USD240 juta. Tapi Sukarno berulang kali menyebutkan angka USD177 juta. Meski sudah diingatkan oleh asissten penerjemah atas kekeliruan Sukarno itu, PM Kishi hanya menyatakan "Kita tidak usah mempersoalkan hal-hal sepele," katanya.

Menurut Aiko, ganti rugi itu dijadikan modal Sukarno untuk menasionalisasi aset-aset milik asing di Indonesia yang



sebelumnya sudah menjadi bahan pembicaraan di parlemen Indonesia sejak awal-awal tahun 1950-an. Hal ini diperkuat dengan langkah politik Sukarno yang menginstruksikan nasionalisasi aset asing sehari sesudah *deal* dengan PM Kishi.

Saat itu Sukarno menilai Jepang adalah ‘teman baik’ Indonesia. Tak heran jika pada tahun 1950-1960-an investasi Jepang banyak masuk ke Indonesia. Namun, ini yang ditekankan Aiko, pasca kekalahan perang, Jepang masih dibawah pengawasan pihak sekutu. Jepang saat itu sesungguhnya memainkan politik bermuka dua. Ada intervensi kuat Amerika Serikat ke Jepang untuk menjinakkan Sukarno. Menurut Partai Komunis Jepang saat itu, Jepang adalah *broker*-nya Amerika.

Saat Indonesia memilih jalan konfrontasi dengan Malaysia misalnya, AS dan Inggris mendesak Jepang untuk tampil sebagai penengah. Jepang meminta Indonesia untuk menghentikan konfrontasi tersebut. Hal yang sama juga ketika Indonesia memilih keluar dari PBB dan mulai menjalin hubungan dengan Tiongkok. Jepang lagi-lagi diminta AS dan Inggris untuk membendung laju politik Sukarno itu.

Ketika terjadi pembunuhan 7 Jenderal Angkatan Darat dan kudeta tidak langsung lewat Supersemar, Jepang semakin menunjukan dirinya sebagai bagian dari negara-negara barat. Ratna Sari Dewi, salah satu istri Sukarno yang berasal dari Jepang itu sempat mengatakan bahwa ada dana sekitar 6 juta Yen bantuan yang diberikan ke pemimpin kelompok mahasiswa anti Sukarno saat itu. Dana tersebut diberikan secara tidak resmi (rahasia) ke Sofjan

PERISTIWA 1965



AIKO KURASAWA



Wanandi yang saat itu menjadi salah satu pemimpin mahasiswa yang menentang Sukarno.

Sikap Jepang saat itu yang mulai ‘meninggalkan’ Sukarno, menurut Aiko, dilatarbelakangi oleh modus ekonomi. Jepang mencari aman atas dasar masa depan dan kepentingan ekonominya di Indonesia. Di samping tetap menjaga posisinya di mata negara-negara barat.

Mirip seperti pidato Menteri

Luar Negeri

Jepang di depan banyak pengusaha Jepang pada tahun 1955:

“Pembayaran hutang pampasan perang ini jangan dilihat sebagai sebuah tanggung jawab dan kewajiban. Ini adalah kesempatan kita untuk mengambil keuntungan ekonomi atas pembangunan di Asia Tenggara.”

Sebuah buku yang sangat perlu dibaca...o

Judul Buku: **Peristiwa 1965;**
Persepsi dan Sikap Jepang
 Penulis: **Aiko Kurasawa**
 Penerbit: **Kompas**
 Tahun Terbit: **Cetakan I, 2015**
 Tebal: **iv + 476 halaman**

Kabut Legitimasi Politik

Hendrajit

Ketika kabut asap ‘membunuh’ banyak balita. Ketika kabut asap sudah membuat banyak rakyat sakit. Ketika kepala sekolah memutuskan untuk meliburkan sekolah karena takut anak didiknya sakit.

Ketika kabut asap ternyata mampu menghentikan seorang kepala rumah tangga untuk bekerja menafkahi keluarganya karena sakit berkepanjangan akibat asap. Ketika kabut asap juga mampu membuat seorang Kepala Daerah akhirnya meminta tolong Ulama dan rakyatnya untuk shalat istisqo, minta ke hadirat Allah SWT untuk turun hujan.

Ketika kabut asap bukan hanya terjadi di beberapa provinsi saja seperti Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan dan Papua tapi mulai mendatangi provinsi lain.

Ketika pemerintah dianggap tidak mampu lagi menghilangkan kabut asap dan dampaknya maka akan dengan mudah dan cepat menyulut kemarahan rakyat. Ketika puluhan LSM, ormas dan organisasi-organisasi dadakan mulai menggesek dan mempercepat proses kemarahan rakyat.

Dengan guyuran uang miliaran rupiah mereka bersama-sama mempertanyakan pemerintah dalam menangani kabut asap.

Bahkan ketika kabut asap juga didorong oleh banyak ormas dan LSM menjadi isu lingkungan internasional, hukum internasional dan HAM internasional maka

lengkap sudah cerita soal kabut asap ini.

Ketika semua itu terjadi, maka kabut asap bukan lagi soal bencana alam. Tapi berubah menjadi bencana politik. Ini sudah menyangkut legitimasi politik sebuah rezim.

Ya. Sebuah pondasi penting sebuah krisis legitimasi (baca: kepercayaan) politik sudah ada, sudah muncul. Kalau ini ditambah dan digabungkan dengan isu ekonomi, politik dan hukum saat ini maka akan sangat mudah sekali krisis legitimasi ini menguat.

Perlu diketahui, seluruh isu politik, hukum dan ekonomi yang muncul saat ini sebagian besar bermuara di rancangan keuangan negara: RAPBN 2016. Ingat, keuangan negara adalah urat nadi kehidupan sebuah negara. Dalam konstitusi, keuangan rumah tangga negara bangsa ini ini dituangkan dalam APBN. Jadi APBN hakikatnya adalah cermin kedaulatan rakyat. Namun, banyak yang menilai, RAPBN 2016 ini bukan lagi cermin kedaulatan rakyat. Tapi cermin kepentingan asing dan tekanan kreditur.

Isu besar dibalik kabut asap dan RAPBN 2016 ini harus jadi catatan penting pemerintah Jokowi-JK. Jika pemerintah tidak mampu mengelola dengan baik dan benar maka krisis kepercayaan akan menguat.

Lalu, apa yang akan terjadi ketika rakyat sudah tidak percaya lagi dengan pemerintah/pemimpinnya? ◻

AKTUAL

Berani
Beda
Karena
Benar



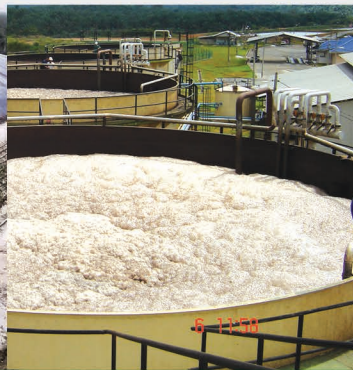
INFO & PEMASARAN

📞 Dedy **081 20 53 8776**
Ranie **081 38 210 44 69**
Rhiza **081 828 0941 009**
✉ marketing@aktual.com
iklan@aktual.com

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA



www.ebtke.esdm.go.id



Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)

DIREKTORAT BIOENERGI

Jl. Pegangsaan Timur No.1 Menteng Jakarta Pusat 10320

☎ 021-39830077 📠 021-31901087 ✉ info@ebtke.esdm.go.id